

2024

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO



# **LPPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Bondowoso Tahun 2024. LPPD Bupati Bondowoso Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kami berharap ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan dimasa Mendatang. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LPPD ini. Akhir kata kami berharap LPPD ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Bondowoso

Bondowoso, Maret 2024

**Pj. BUPATI BONDOWOSO**



**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. ....	1
<b>1.1.1 Penjelasan Umum</b> .....	<b>2</b>
Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :.....	2
Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: .....	4
Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur. ....	5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2023 sejumlah 9.093 orang dengan perincian: .....	15
<b>1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah</b> .....	<b>25</b>
<b>1.1.3 Standar Pelayanan Minimal</b> .....	<b>63</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>65</b>
<b>2.1 Capaian Kinerja Makro</b> .....	<b>65</b>
1. Pertumbuhan ekonomi .....	65
3. Indeks Gini .....	70
4. Persentase penduduk Miskin .....	71
5. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	72
6. Indeks Pembangunan Manusia .....	74
<b>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b> .....	<b>77</b>
<b>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b> .....	<b>255</b>
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	255
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	256
C. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 (Mengungkapkan analisis pencapaian kinerja antara perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya, realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level setara /provinsi/nasional) .....	259
<b>BAB III</b> .....	<b>314</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan</b> .....	<b>314</b>

3.1.1 Dana Dekonsentrasi .....	314
<b>BAB IV .....</b>	<b>340</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	340
4.2 Urusan Kesehatan .....	345
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	365
4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman .....	370
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; ....	370
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota .....	370
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	373
A. Permasalahan .....	383
B. Solusi .....	383
4.6 Urusan Sosial .....	385
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; .....	385
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; .....	385
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; .....	385
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan .....	385
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota .....	385
<b>BAB V .....</b>	<b>396</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati dan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Bupati dan DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Undang – Undang 32 Tahun 2004.

Sebagaimana pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

LPPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam penyusunan LPPD memuat beberapa penjelasan yang meliputi :

1. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi.
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
5. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

## **1.1.1 Penjelasan Umum**

### **A. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022;

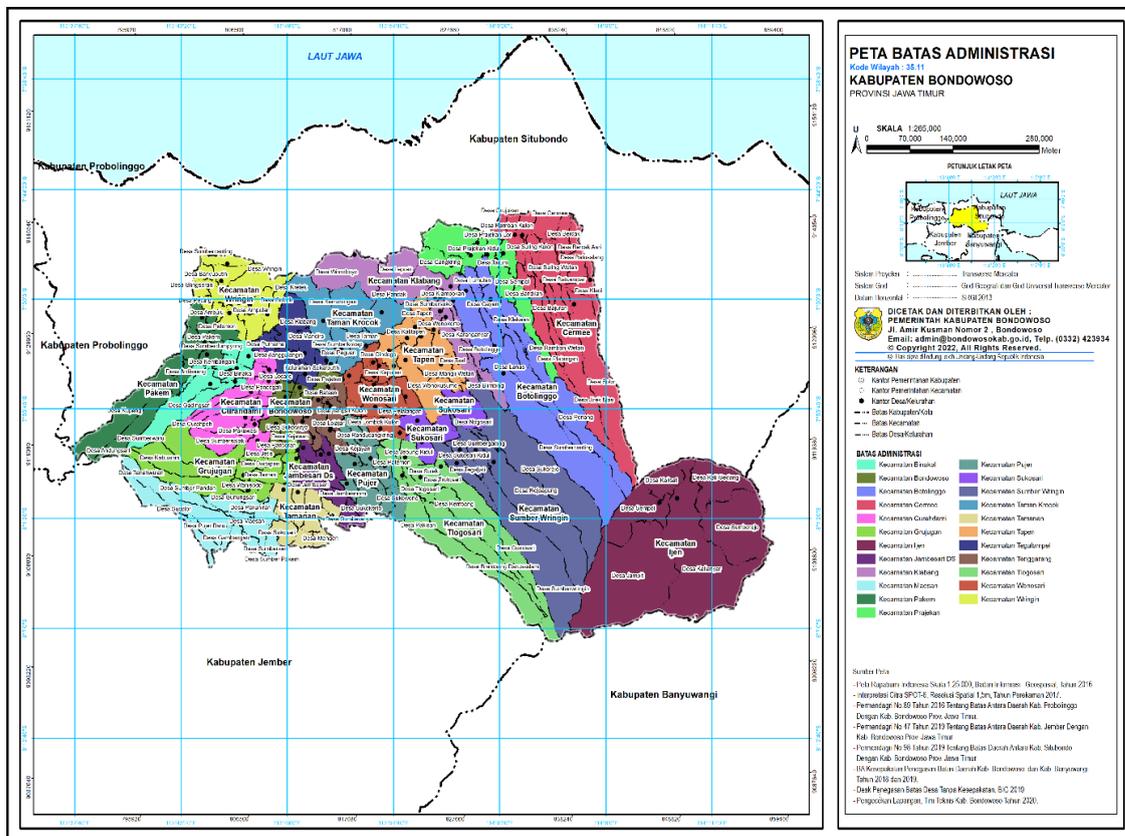
25. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022.

## B. Data Geografis Wilayah

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo;
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Jember;
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

**Gambar 1. 1**  
**Peta Administratif**



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Luas Wilayah Kab. Bondowoso mencapai 1.560,10 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 desa dan 10 Kelurahan.

Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai ± 347 meter diatas permukaan laut. Wilayah tertinggi ± 3.287 mdpl dan terendah ± 54 meter. Kondisi dataran di Kab. Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9 % dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah secara keseluruhan.

Pegunungan yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah pegunungan Ijen yang terletak di bagian timur dan pegunungan Argopuro di sebelah barat. Sementara itu ada sekitar 35 sungai yang mengalir di Kabupaten Bondowoso antara lain yaitu sungai Deluang, sungai Sampeyan Baru, sungai Mrawan, sungai Tlaga, sungai Wonoboyo, dll.

**Tabel 1. 1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi**  
**Kabupaten Bondowoso Tahun 2024**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1	Maesan	Maesan	-	12	62	13	5.608,30
2	Grujugan	Taman	-	11	49	7	7.44,70
3	Tamanan	Taman	-	9	52	15	2.815,10
4	Jambesari DS	Jambesari	-	9	41	10	3.010,50
5	Pujer	Kejayan	-	11	80	12	3.988,90
6	Tlogosari	Pakistan	-	10	98	17	11.091,70
7	Sukosari	Sukosari Lor	-	4	31	22	2.317,27
8	Sbr. Wringin	Sbr. Wringin	-	6	71	27	13.794,73
9	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.704,20
10	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.227,20
11	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.579,50
12	Bondowos	Dabasah	7	4	19	2	2.315,80
13	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	5.028,59

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
14	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.903,91
15	Pakem	Patemon	-	8	47	18	6.208,20
16	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.801,00
17	Tegalampel	Sekarputih	1	7	54	2	3.702,75
18	Taman Krocok	Taman	-	7	47	12	5.300,35
19	Klabang	Klabang	-	11	49	19	9.120,40
20	Botolinggo	Lumutan	-	8	100	25	12.741,45
21	Ijen	Sempol	-	6	38	74	20.720,00
22	Prajejan	Prajejan Lor	-	7	34	24	5.664,55
23	Cermee	Cermee	-	15	93	32	12.920,40
JUMLAH			10	209	1.412	385	156.010,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

### C. Jumlah Penduduk

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, 2023**

Kecamatan Subdistrict	Jeni Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maesan	24.332	24.980	49.312
Grujugan	18.907	19.364	38.271
Tamanan	19.565	19.848	39.413
Jambesari Darus Sholah	18.053	18.795	36.848
Pujer	20.136	21.132	41.268
Tlogosari	23.254	24.205	47.459
Sukosari	7.535	8.133	15.668
Sumber Wringin	17.442	18.180	35.622
Tapen	16.627	17.832	34.459
Wonosari	20.022	21.271	41.293
Tenggarang	21.719	22.591	44.310
Bondowoso	37.978	39.777	77.755
Curahdami	17.508	17.638	35.146
Binakal	8.465	8.971	17.436
Pakem	11.736	12.150	23.886
Wringin	20.148	21.035	41.183
Tegalampel	13.333	13.456	26.789
Taman Krocok	8.147	8.707	16.854
Klabang	9.153	9.773	18.926
Ijen	6.166	6.111	12.277
Botolinggo	14.569	15.194	29.763
Prajejan	12.635	13.286	25.921

Kecamatan Subdistrict	Jeni Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Cernec	22.878	24.174	47.052
Bondowoso	390.308	406.603	796.911

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2023

#### D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Nama Desa/Kelurahan**  
**di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023**

No.	Nama Desa/Kelurahan
<b>Kecamatan Binakal</b>	
1	Desa Gadingsari
2	Desa Sumber Waru
3	Desa Kembangan
4	Desa Baratan
5	Desa Binakal
6	Desa Jeruksoksok
7	Desa Sumber Tengah
8	Desa Bendelan
<b>Kecamatan Bondowoso</b>	
1	Desa Pancoran
2	Desa Sukowiryo
3	Desa Kembang
4	Desa Pejaten
5	Kel. Badean
6	Kel. Blindungan
7	Kel. Dabasah
8	Kel. Kademangan
9	Kel. Kotakulon
10	Kel. Nangkaan
11	Kel. Tamansari
<b>Kecamatan Botolinggo</b>	
1	Desa Lumutan

No.	Nama Desa/Kelurahan
2	Desa Botolinggo
3	Desa Lanas
4	Desa Penang
5	Desa Gayam
6	Desa Klekehan
7	Desa Sumber Canting
8	Desa Gayam Lor
	<b>Kecamatan Cermee</b>
1	Desa Solor
2	Desa Kladi
3	Desa Bercak
4	Desa Suling Wetan
5	Desa Suling Kulon
6	Desa Cermee
7	Desa Ramban Wetan
8	Desa Grujugan
9	Desa Ramban Kulon
10	Desa Bajuran
11	Desa Jirek Mas
12	Desa Batu Salang
13	Desa Palalangan
14	Desa Batu Ampar
15	Desa Bercak Asri
	<b>Kecamatan Curahdami</b>
1	Desa Jetis
2	Desa Pakuwesi
3	Desa Kupang
4	Desa Petung
5	Desa Penambangan
6	Desa Curahpoh
7	Desa Poncogati
8	Desa Sumbersuko

No.	Nama Desa/Kelurahan
9	Desa Selolembu
10	Desa Locare
11	Desa Sumber Salak
12	Kel. Curahdami
	<b>Kecamatan Grujugan</b>
1	Desa Tegal Mijin
2	Desa Pekauman
3	Desa Sumber Pandan
4	Desa Wanisodo
5	Desa Kabuaran
6	Desa Wonosari
7	Desa Dadapan
8	Desa Dawuhan
9	Desa Taman
10	Desa Grujugan Kidul
11	Desa Kejawan
	<b>Kecamatan Ijen</b>
1	Desa Sempol
2	Desa Kalianyar
3	Desa Jampit
4	Desa Kalisat
5	Desa Kali Gedang
6	Desa Sumber Rejo
	<b>Kecamatan Jambesari Darus Sholah</b>
1	Desa Jambesari
2	Desa Jambeanom
3	Desa Pucanganom
4	Desa Sumberjeruk
5	Desa Tegalpasir
6	Desa Pengarang
7	Desa Grujugan Lor
8	Desa Pejagan

No.	Nama Desa/Kelurahan
9	Desa Sumber Anyar
<b>Kecamatan Klabang</b>	
1	Desa Karang Anyar
2	Desa Blimbing
3	Desa Karang Sengon
4	Desa Wonokerto
5	Desa Klabang
6	Desa Klampokan
7	Desa Sumber Suko
8	Desa Besuk
9	Desa Pandak
10	Desa Leprak
11	Desa Wonobojo
<b>Kecamatan Maesan</b>	
1	Desa Sucolor
2	Desa Pujer Baru
3	Desa Tanahwulan
4	Desa Maesan
5	Desa Gambangan
6	Desa Suger Lor
7	Desa Sumber Pakem
8	Desa Sumbersari
9	Desa Sumber Anyar
10	Desa Penanggungan
11	Desa Pakuniran
12	Desa Gunungsari
<b>Kecamatan Pakem</b>	
1	Desa Andungsari
2	Desa Ardisaeng
3	Desa Kupang
4	Desa Gadingsari
5	Desa Pakem

No.	Nama Desa/Kelurahan
6	Desa Sumberdumpyong
7	Desa Petemon
8	Desa Petung
	<b>Kecamatan Prajekan</b>
1	Desa Bandilan
2	Desa Sempol
3	Desa Tarum
4	Desa Prajekan Lor
5	Desa Prajekan Kidul
6	Desa Cangkring
7	Desa Walidono
	<b>Kecamatan Pujer</b>
1	Desa Alas Sumur
2	Desa Kejayan
3	Desa Mangli
4	Desa Maskuning Kulon
5	Desa Maskuning Wetan
6	Desa Mengok
7	Desa Padasan
8	Desa Randu Cangkring
9	Desa Suko Kerto
10	Desa Sukowono
11	Desa Sukodono
	<b>Kecamatan Sukosari</b>
1	Desa Sukosari Lor
2	Desa Nogosari
3	Desa Pecalongan
4	Desa Kerang
	<b>Kecamatan Sumber Wringin</b>
1	Desa Sukorejo
2	Desa Sumber Gading
3	Desa Sukosari Kidul

No.	Nama Desa/Kelurahan
4	Desa Tegal Jati
5	Desa Rejo Agung
6	Desa Sumberwringin
	<b>Kecamatan Taman Krocok</b>
1	Desa Taman
2	Desa Gentong
3	Desa Kemuningan
4	Desa Trebungan
5	Desa Sumberkokap
6	Desa Paguan
7	Desa Kretek
	<b>Kecamatan Tamanan</b>
1	Desa Sukosari
2	Desa Karang Melok
3	Desa Mengen
4	Desa Kemirian
5	Desa Tamanan
6	Desa Wonosuko
7	Desa Kalianyar
8	Desa Sumber Kemuning
9	Desa Sumber Anom
	<b>Kecamatan Tapen</b>
1	Desa Wonokusumo
2	Desa Mangli Wetan
3	Desa Taal
4	Desa Mrawan
5	Desa Gunung Anyar
6	Desa Jurang Sapi
7	Desa Cindogo
8	Desa Kalitapen
9	Desa Tapen
	<b>Kecamatan Tegalampel</b>

No.	Nama Desa/Kelurahan
1	Desa Klabang
2	Desa Mandiro
3	Desa Tanggulangin
4	Desa Karanganyar
5	Desa Tegalampel
6	Desa Klabang Agung
7	Desa Purnama
8	Kel. Sekarputih
<b>Kecamatan Tenggarang</b>	
1	Desa Kasemek
2	Desa Lojajar
3	Desa Pekalangan
4	Desa Kajar
5	Desa Sumber Salam
6	Desa Koncer Kidul
7	Desa Bataan
8	Desa Gebang
9	Desa Dawuhan
10	Desa Tangsil Kulon
11	Desa Koncer Darul Aman
12	Kel. Tenggarang
<b>Kecamatan Tlogosari</b>	
1	Desa Kembang
2	Desa Gunosari
3	Desa Trotosari
4	Desa Jebung Kidul
5	Desa Sulek
6	Desa Tlogosari
7	Desa Pakisan
8	Desa Patemon
9	Desa Jebung Lor
10	Desa Brambang Darussalam

No.	Nama Desa/Kelurahan
<b>Kecamatan Wonosari</b>	
1	Desa Lombok Kulon
2	Desa Lombok Wetan
3	Desa Tumpeng
4	Desa Jumpong
5	Desa Tangsil Wetan
6	Desa Paserejo
7	Desa Bendoarum
8	Desa Kapuran
9	Desa Sumberkalong
10	Desa Traktakan
11	Desa Wonosari
12	Desa Pelalangan
<b>Kecamatan Wringin</b>	
1	Desa Ambulu
2	Desa Bukor
3	Desa Sumbermalang
4	Desa Jambewungu
5	Desa Gubrih
6	Desa Ampelan
7	Desa Jatitamban
8	Desa Banyuwulu
9	Desa Jatisari
10	Desa Glingseran
11	Desa Banyuputih
12	Desa Wringin
13	Desa Sumbercanting

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2024

## E. Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2023 sejumlah 9.093 orang dengan perincian:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 290 orang;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 6.579 orang;
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 2.224 orang.

Struktur dan Komposisi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

**Tabel 1. 4**  
**Komposisi Aparatur**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

No	Kualifikasi Pendidikan	ASN								
		CPNS			PNS			PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD/MI	0	0	0	37	0	37	0	0	0
2	SMP/MTs	0	0	0	120	0	120	0	0	0
3	SMA/SMK/MA	0	0	0	1.194	299	1.493	17	6	23
4	Diploma 1 (D-1)	0	0	0	0	3	3	0	0	0
5	Diploma 2 (D-2)	0	0	0	112	43	155	0	0	0
6	Diploma 3 (D-3)	31	146	177	157	379	536	24	66	90
7	Diploma 4 (D-4)	2	4	6	32	163	195	4	12	16
8	Sarjana Srata 1 (S-1)	39	68	107	1.706	2.012	3.718	1.001	1.094	2.095
9	Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	0	0	0	207	112	319	0	0	0
10	Doktoral (S-3)	0	0	0	2	1	3	0	0	0
JUMLAH		72	218	290	3.567	3.012	6.579	1.046	1.178	2.224

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024*

2. Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

**Tabel 1.5**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan**  
**Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Kualifikasi Agama	Jumlah CPNS		Jumlah PNS		Jumlah PPPK		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	69	215	3.541	2.951	1.039	1.169	8.984
2	Kristen	1	1	16	43	7	8	76
3	Katolik	0	2	5	9	0	1	17
4	Hindu	1	0	5	7	0	0	13
5	Budha	1	0	0	2	0	0	3
Jumlah Per Jenis Kelamin		72	218	3.567	3.012	1.046	1.178	9.093
JUMLAH		290		6.579		2.224		9.093

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

3. Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.6**  
**Komposisi PNS**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2023**

No	Golongan Ruang	Eselon						Non Eselon			Pelaksana			Jumlah
								Tenaga Fungsional						
		II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	* PEN D	* KES H	LAI N	PEN D	KES H	LAI N	
1	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5
2	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	31	50
Gol I (Juru)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	33	55
4	II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	4	18	2	59	84
5	II/b	0	0	0	0	0	0	3	0	18	47	10	131	209
6	II/c	0	0	0	0	0	0	12	44	33	53	165	201	508
7	II/d	0	0	0	0	0	0	49	77	5	126	81	582	920
Golongan II (Pengatur)		0	0	0	0	0	0	65	121	60	244	258	973	1.721
8	III/a	0	0	0	0	30	396	121	39	37	53	216	892	
9	III/b	0	0	0	16	33	507	161	43	21	66	136	983	
10	III/c	0	0	0	1	42	14	544	188	41	7	15	68	920

No	Golongan Ruang	Eselon						Non Eselon			Pelaksana			Jumlah
		II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	Tenaga Fungsional			PEN D	KES H	LAI N	
								* PEN D	* KES H	LAI N				
11	III/d	0	0	6	39	94	8	428	235	98	7	18	26	959
Golongan III (Penata)		0	0	6	40	152	85	1.875	705	221	72	152	446	3.754
12	IV/a	0	0	15	54	13	1	311	57	34	0	0	2	487
13	IV/b	0	6	40	3	0	0	701	44	4	0	0	0	798
14	IV/c	0	20	1	0	0	0	16	11	3	0	0	1	52
15	IV/d	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Golongan IV (Pembina)		1	26	56	57	13	1	1.028	113	41	0	0	3	1.339
16	Gol V (PPPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
17	Gol VII (PPPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	4	89
18	Gol IX (PPPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972	32	83	2.087
19	Gol X (PPPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	25
PPPK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972	138	114	2.224
JUMLAH TOTAL		1	26	62	97	165	86	2.968	939	322	2.303	555	1.569	9.093

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2024

\*PEN D = PENDIDIKAN

\*KESH = KESEHATAN

Dasar hukum yang mengatur tentang Tentang Honorer yaitu:

1. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin dan Kesejahteraan Tenaga Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/37/430.6.2/2021 tentang Perpanjangan Kontrak, Penetapan Honorarium dan

Penempatan Tenaga Honorer pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Dasar Hukum diatas, Jumlah tenaga honorer sebanyak 323 orang yang terdiri dari:

1. Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) sebanyak 47 orang; dan
2. Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sebanyak 276 orang.

Namun, sampai akhir tahun 2023 terdapat beberapa tenaga honorer yang meninggal dunia dan pensiun. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah pegawai honorer sebanyak 323 orang dengan rincian berikut:

**Tabel 1. 7**  
**Komposisi Tenaga Honorer**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

No	Kualifikasi Pendidikan	Non ASN		Jumlah
		Honorer K1	Honorer K2	
1	SD / MI	5	6	11
2	SMP / MTs	1	15	16
3	SMA / SMK / MA	17	181	198
4	Diploma 1 (D-1)	-	-	-
5	Diploma 2 (D-2)	-	28	28
6	Diploma 3 (D-3)	1	4	5
7	Diploma 4 (D-4)	-	-	-
8	Sarjana Srata 1 (S-1)	23	42	65
9	Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	-	-	-
10	Doktoral (S-3)	-	-	-
JUMLAH		47	276	323

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

## **F. Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso**

### **1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 250.803.864.324,00 dan terealisasi sebesar Rp. 211.009.393.993,12 atau 84,13% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 8**  
**Target dan Realisasi PAD Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Pajak Daerah	49.134.556.436,00	43.384.281.391,00	88,30%
2	Retribusi Daerah	22.663.724.898,00	21.566.432.779,68	95,16%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.629.838.580,00	4.629.838.583,13	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	174.375.744.410,00	141.428.841.239,31	81,11%
Total		250.803.864.324,00	211.009.393.993,12	84,13%

*Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa:

1. Pendapatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.49.134.556.436,00 dan realisasi sebesar Rp. 43.384.281.391,00 atau sebesar 88,30%
2. Hasil Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.663.724.898,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.566.432.779,68 atau sebesar 95,16%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.4.629.838.580,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.629.838.583,13 atau sebesar 100,00%
4. Pendapatan Lain–Lain PAD yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 174.375.744.410,00 dan realisasi sebesar Rp. 141.428.841.239,31 atau sebesar 81,11%

**b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 1.739.325.133.208,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.743.448.656.008,00 atau 100,24% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 9**  
**Target dan Realisasi Dana Pendapatan Transfer**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Pendapatan Transfer	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.389.056.385.732,00	1.364.855.214.487,00	98,26%
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	224.397.404.000,00	224.397.404.000,00	100,00%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.871.343.476,00	154.196.037.521,00	122,50%
Total		1.739.325.133.208,00	1.743.448.656.008,00	100,24%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp.1.389.056.385.732,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.364.855.214.487,00 atau sebesar 98,26%
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 224.397.404.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 224.397.404.000,00 atau sebesar 100,00%.
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 125.871.343.476,00 dan realisasi sebesar Rp 154.196.037.521,00 atau sebesar 122,50%

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 42.327.446.415,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.962.713.057,00 atau 84,96% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 10**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Pendapatan Hibah	-	-	0,00%

No	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96%
	Total	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa:

- 1) Tidak ada Pendapatan Hibah di Tahun Anggaran 2023
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp 42.327.446.415,00 dan realisasi sebesar Rp 35.962.713.057,00 atau sebesar 84,96%

## 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pada Penjabaran APBD Kab. Bondowoso TA 2023, yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target organisasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 1.665.134.077.426,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.643.045.947.03 atau 91,20 % dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 11**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Belanja Operasi	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Belanja Pegawai	888.555.037.995,00	806.488.789.870,40	90,76%
2	Belanja Barang dan Jasa	639.964.409.788,00	582.713.297.289,63	91,05%
3	Belanja Subsidi	1.781.923.800,00	1.781.923.800,00	100,00%
4	Belanja Hibah	130.888.705.843,00	124.626.774.987,00	95,22%
5	Belanja Bantuan Sosial	3.944.000.000,00	3.032.260.000,00	76,88%
	Total	1.665.134.077.426,00	1.518.643.045.947.03	91,20%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Belanja Operasi Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa:

- 1) Belanja Pegawai dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 888.555.037.995,00 dan terealisasi sebesar Rp. 806.488.789.870,40 atau sebesar 90,76%
  - 2) Belanja Barang dan Jasa dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 639.964.409.788,00 dan terealisasi sebesar Rp. 582.713.297.289,63 atau sebesar 91,05%
  - 3) Belanja Subsidi target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 1.781.923.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.781.923.800,00 atau sebesar 100,00%
  - 4) Belanja Hibah dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 130.888.705.843,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.626.774.987,00 atau sebesar 95,22%
  - 5) Belanja Bantuan Sosial dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 3.944.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.032.260.000,00 atau sebesar 76,88%
- 2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 223.286.778.648,00 dan terealisasi sebesar Rp. 169.833.845.333,03 atau 76,06% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 12**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Belanja Modal	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Belanja Modal Tanah	1.893.088.000,00	94.915.970,00	5,01%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.603.399.436,00	82.098.298.764,00	83,26%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.797.199.662,00	20.570.157.238,30	43,04%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.805.593.910,00	58.084.684.454,73	88,27%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.542.497.640,00	8.469.163.161,00	99,14%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10%
Total		223.286.778.648,00	169.833.845.333,03	76,06%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (anaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Belanja Modal Kab. Bondowoso tahun 2023 bahwa:

- 1) Belanja Modal Tanah dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 1.893.088.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.915.970,00 atau sebesar 5,01%
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 98.603.399.436,00 dan terealisasi sebesar Rp. 82.098.298.764,00 atau sebesar 83,26%
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 47.797.199.662,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.570.157.238,30 atau sebesar 43,04%
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 65.805.593.910,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.084.684.454,73 atau sebesar 88,27%
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 8.542.497.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.469.163.161,00 atau sebesar 99,14%
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 645.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 516.625.745,00 atau sebesar 80,10%

3) Belanja Tidak Terduga

**Tabel 1. 13**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Belanja Tidak terduga	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Belanja Tidak Terduga	20.025.307.180,00	749.265.471,00	3,74%

*Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)*

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 20.025.307.180,00 dan terealisasi sebesar Rp. 749.265.471,00 atau 3,74%.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 329.305.592.234,00 dan terealisasi sebesar Rp. 329.305.592.234,00 atau 100,00% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 14**  
**Target dan Realisasi Belanja Transfer**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No	Belanja Transfer	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1	Belanja Bagi Hasil	7.179.828.134,00	7.179.828.134,00	100,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan	322.125.764.100,00	322.125.764.100,00	100,00%
Total		329.305.592.234,00	329.305.592.234,00	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai Target dan Realisasi Belanja Transfer Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa:

- 1) Belanja Bagi Hasil dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 7.179.828.134,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.179.828.134,00 atau sebesar 100,00%
- 2) Belanja Bantuan Keuangan dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 322.125.764.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 322.125.764.100,00 atau sebesar 100,00%

### 3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kabupaten Bondowoso direncanakan sebesar Rp. 205.295.311.541,00 dan terealisasi sebesar Rp. 205.340.427.541,33 atau 100,02% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. 15**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kab. Bondowoso TA. 2023**

No	Pembiayaan Daerah	Target	Realisasi	Prosen
		(Rupiah)	(Rupiah)	
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	220.295.311.541,00	220.340.427.541,33	100,02%
1)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	220.295.311.541,00	220.295.311.541,33	100,00%
2)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	45.116.000,00	0,00%
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00%
1)	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00%
Pembiayaan NETTO		205.295.311.541,00	205.340.427.541,33	100,02%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso, 2024 (Unaudited)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. Bondowoso Tahun 2023 bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp.220.295.311.541,00 dan terealisasi sebesar Rp. 220.340.427.541,33 atau 100,02% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya terealisasi sebesar Rp. 220.295.311.541,33 atau sebesar 100,02%
- 2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terealisasi sebesar Rp. 45.116.000,00

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 atau 100,00% sehingga pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp. 205.340.427.541,33 atau 100,02%.

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kebijakan pemerintah daerah yang disusun didasarkan pada isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan kondisi atau hal yang harus dicermati dalam perencanaan pembangunan yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain : telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih agar terjadi keselarasan dalam merumuskan isu-isu strategis.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2019 yang disampaikan dalam dokumen LPPD Tahun 2019 merupakan tahapan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan telah mengacu pada visi, misi dan prioritas pembangunan daerah.

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas daerah tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023. Sedangkan program prioritas pembangunan tahunan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

## A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

**Tabel 1. 16**

**Masukan Permasalahan Aktual/Isu Strategis Di Daerah**

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
1	<p>Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi</p> <hr/> <p>Kemampuan keuangan daerah terbatas</p>	<p>1. Perekonomian Bondowoson tumbuh secara positif dari 3,49% pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,51% pada tahun 2022, tetapi masih lebih rendah, dibandingkan kabupaten sekitar</p> <p>2. PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK Kabupaten Sondowoso selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terus mengalami peningkatan</p> <p>3. Tahun 2022 Indeks Gini Kab, Bondowoso mencapai angka 0,365 menunjukkan Tingkat Ketimpangan Sedang/Moderat</p>	<p>1. Membaiknya kinerja pemulihan ekonomi.</p> <p>2. Menunjukkan aktifitas perekonomian di Bondowoso bergeliat ke arah positif pada setiap penduduk.</p> <p>3. Indeks Gini Bondowoso masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi akibat pandemic covid-19</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasllitasi usaha perdagangan konvensional dan non-konvensional (e-commerce), fasilltasi transformasi ekonomi digital dalam perdagangan, penguatan kemitraan dengan pelaku/ pengusaha pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi, revitalisasi pasar tradisional</p> <p>2. Meningkatkan identiflkasi potensi dan promosi .investasi serta meningkatkan sistem pelayanan</p>

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
		4. Pendapatan daerah sebagian besar dari Dana Transfer Pusat. Dana transfer sebagian besar bersifat spesifik, banyak kegiatan yang bersifat mendatang seperti stunting, kemiskinan, pengangkatan P3K, dan lain lain sehingga anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai seluruh kewenangannya.	4. Pembangunan daerah stagnan	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk mendorong kemudahan berinvestasi</li> <li>3. Peningkatan dana transfer</li> <li>4. Dana Black Grant diperbesar</li> </ul>
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	IKLH Bondowoso Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,58 poin dari tahun 2021 menjadi sebesar 68,97 dengan kategori SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas air meningkat dari 50% di tahun 2021 menjadi 55,33% ditahun 2022</li> <li>2. Indeks kualitas udara meningkat dari 85,33% ditahun 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran air, pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan</li> <li>2. Pengendalian pencemaran udara</li> <li>3. Pengendalian kerusakan tutupan lahan</li> </ul>

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
			menjadi 86,70% ditahun 2022 3. Indeks kualitas tutupan lahan meningkat dari 59,49% ditahun 2021 menjadi 59,57% ditahun 2022	4. Pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
3	Penanganan kemiskinan, pengangguran,dan kesejahteraan sosial	1. Tingkat kemiskinan tahun 2022 membaik pada level 13,47% turun sebesar 1,29 poin dari tahun 2021 yg mencapai angka 14,73%. 2. TPT tahun 2022 mengalami perbaikan pada angka 4,32 dibanding tahun 2021 mencapai angka 4,36 3. Penyelenggaraan pemilihan berpotensi konflik horizontal	1. Jumlah penduduk miskin menurun dari 115.175 orang (th 2021) menjadi 105.690 orang (tahun 2022) 2. Target tingkat kemiskinan 2022 sebesar 13,50% tercapai 13,47%	1. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Memperluas kesempatan kerja, fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan\ meningkatkan produktifitas tenaga kerja 3. Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
			3. Menurunnya jumlah pengangguran dari 20.835 orang (th 2021) menjadi 20.533 orang (tahun 2022) 4. Stabilitas keamanan terganggu	4. Meningkatkan bantuan sarana prasarana dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) 5. Perlunya partisipasi TNI dan POLRI untuk menjaga stabilitas dengan pendanaan dari Pusat
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Capaian penunjang tata kelola pemerintahan terdiri dari: 1. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat dari 73,62% ditahun 2021 menjadi 74,20% ditahun 2022 2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemda stabil di angka 3,2260	1. Indeks reformasi birokrasi menurun dari 66,35% ditahun 2021 menjadi 65,01% ditahun 2022. 2. Indeks kepuasan masyarakat menurun dari 81,78% ditahun	1. Menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan optimal 2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan satu data statistik daerah 3. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
			<p>2021 menjadi 81,12% ditahun 2022</p> <p>3. Laporan keuangan Pemda WTP</p>	<p>4. Meninikatkan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan program/kegiatan</p> <p>5. Meningkatkan mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 65,27% pada tahun 2018, meningkat menjadi 67,31% pada tahun 2022	selama kurun waktu 5 (Lima) tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup	<p>1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan,</p> <p>2. Meningkatkan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai</p>

NO	POKOK PIKIRAN	FAKTA DILAPANGAN	DAMPAK	REKOMENDASI
				<p>bidang pembangunan, peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas</p> <p>3. Meningkatkan perlindungan anak dan,implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan</p> <p>4. Meningkatkan kemandirian pemuda dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan</p>

## **B. Visi dan Misi Kepala Daerah**

### **1. Visi Kabupaten Bondowoso**

Visi pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi Pemerintahan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”.

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan, dalam Bingkai Iman dan Takwa yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Mandiri Ekonomi: adalah terwujudnya kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun, dan memelihara kelangsungan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri secara produktif.
- 2) Lestari: mengandung arti bahwa masyarakat Bondowoso memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula.
- 3) Sejahtera: adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat

mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

- 4) Adil dan Terdepan: mengandung arti adil yang bersifat distributif, yaitu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman, dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi tersebut diharapkan 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang untuk tercapainya Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.
- 5) Iman dan Takwa: adalah kondisi masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Misi Kabupaten Bondowoso**

Misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan hal yang sangat penting memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

- 1) Misi 1: Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
- 2) Misi 2: Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
- 3) Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 4) Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan Inofatif.
- 5) Misi 5: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

### 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 17**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan		Sasaran	
<b>Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.</b>			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
		2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata
		3	Meningkatnya Investasi Daerah
		4	Meningkatnya Usaha Skala Mikro
		5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi
<b>Misi 2 : Melestarikan Lingkungan Sebagai Keunggulan Kompetitif</b>			
1	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>			
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
		2	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
		3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
<b>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif Dan Inovatif</b>			
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	1	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan
		2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat
<b>Misi 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Unggul</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Derajat Pendidikan
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, serta pemberdayaan pemuda.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022

### C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

**Tabel 1. 18**  
**Program Pembangunan Daerah**  
**Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Berencana
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Dinas Penanaman Modal,

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
Membangun Keunggulan Ekonomi	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Nangkaan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Kotakulon
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Kademangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Kademangan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tenggarang
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tegalampel
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tamankrocok
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Wringin
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Pakem
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Curahdami
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Binakal
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	FKTP Grujugan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Maesan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tamanan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Jambesari
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Pujer
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tlogosari
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Wonosari
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Tapen
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	FKTP Sukosari

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Sumber Wringin
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Prajekan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Sempol
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Klabang
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Botolinggo
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	FKTP Cermee
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi
Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
			Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENATAAN DESA
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Terciptanya Desa Mandiri	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGELOLAAN	Dinas Koperasi, Perindustrian

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	dan Perdagangan
Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Anti Korupsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Bagian Organisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Bagian Umum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
			Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Badan Kepegawaian

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
			dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bondowoso
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bondowoso
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bondowoso
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bondowoso
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Badean

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kelurahan Nangkaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Nangkaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kotakulon
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tamansari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Dabasah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kademangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Blindungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tamanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Tamanan

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tamanan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tamanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tenggarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tenggarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tenggarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tenggarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tenggarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tegalampel
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tegalampel
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tegalampel

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tegalampel
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sekarputih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Curahdami
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Curahdami
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Curahdami
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Curahdami
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Curahdami
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wringin
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wringin
		PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan Wringin
			Kecamatan Wringin

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wringin
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pakem
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pakem
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pakem
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pakem
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Binakal
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Binakal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Binakal
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Maesan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Maesan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Maesan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Grujugan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Grujugan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Grujugan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Grujugan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Binakal
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Binakal
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Binakal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kecamatan Binakal

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PEMERINTAHAN DESA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wonosari
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wonosari
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wonosari
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonosari
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sukosari
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sukosari
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sukosari
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tlogosari
		PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan Tlogosari

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tlogosari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tapen
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tapen
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tapen
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tapen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sumber Wringin
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sumber Wringin
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sumber Wringin
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Prajekan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Prajekan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Prajekan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Klabang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Klabang
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Klabang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Klabang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cermee
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cermee
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cermee
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kecamatan Cermee

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PEMERINTAHAN DESA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ijen
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ijen
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ijen
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ijen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tamankrocok
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tamankrocok
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tamankrocok
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jambesari DS
		PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan Jambesari DS

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jambesari DS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Botolinggo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Botolinggo
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Botolinggo
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Botolinggo
Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup Serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya Olah Raga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

JANJI POLITIS	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bondowoso

#### D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

FOCUS PEMBANGUNAN	PENJABARAN CAPAIAN
Meningkatkan nilai tambah produksi Pertanian, Nilai Lebih Industri Pengolahan, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Skala Mikro, Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal, serta Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, Investasi daerah, usaha skala mikro dan kecil serta penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi
Meningkatkan Penataan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, kualitas air udara dan tutupan lahan
Menurunkan tingkat pengangguran masyarakat, Penduduk Miskin dan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan penanganan PMKS serta pengendalian penduduk

FOCUS PEMBANGUNAN	PENJABARAN CAPAIAN
Meningkatkan Kepedulian Sosial	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas pemerintah daerah
Meningkatkan Tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas, pemerataan serta pelayanan pendidikan dan kesehatan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bondowoso

### 1.1.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah alat ukur kinerja bagi Pemerintah Propinsi terhadap Kabupaten/Kota yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan bagian dari urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan yaitu Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial. SPM harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggarannya (pasal 18).

SPM adalah kebijakan yang mewajibkan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang merupakan hak-hak warga negara. Penetapan Indikator SPM dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Sedangkan, penerapan SPM diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Petunjuk teknis yang mengatur tentang operasional dan pelaksanaan setiap indikator SPM masing-masing urusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang membawahi setiap urusan. Berdasarkan kebijakan ini, maka setiap Pemerintah Daerah harus mampu mencapai target setiap indikator SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Laporan SPM sebagai kewajiban tahunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berlangsung sejak tahun 2005 yang terdiri dari 6 (enam) urusan yang sebelumnya berjumlah 15 (lima belas) urusan. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa indikator dan target SPM wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa SPM merupakan laporan wajib tahunan yang sangat

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Pembentukan Tim Penerapan SPM.

SPM menjadi prioritas target kinerja utama (Indikator Kinerja Utama) organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku SPM. Hal ini makin memantapkan peran SPM sebagai elemen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang harus ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Integrasi ini tidak hanya menjadi pertanda peran penting SPM, tetapi juga membantu memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan tahunan SPM mengingat jika SPM sudah diintegrasikan dalam RPJMD, maka perhitungan data dan hasil kinerja yang dilaporkan dalam berbagai indikator SPM akan menjadi mudah. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM bahwa laporan SPM wajib disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, Pencapaian SPM wajib dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertekad untuk membangun komitmen bersama seluruh jajaran OPD dalam rangka membangun perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan pada indikator SPM yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga negara. Salah satu upaya nyata saat ini adalah mengintegrasikan seluruh indikator SPM ke dalam RPJMD dan Renstra OPD Kabupaten Bondowoso 2019-2024. Selain itu, laporan wajib setiap triwulan dan tahunan juga secara rutin dan tertib dilaporkan melalui aplikasi eSPM. Dokumen ini adalah Laporan Tahunan SPM Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

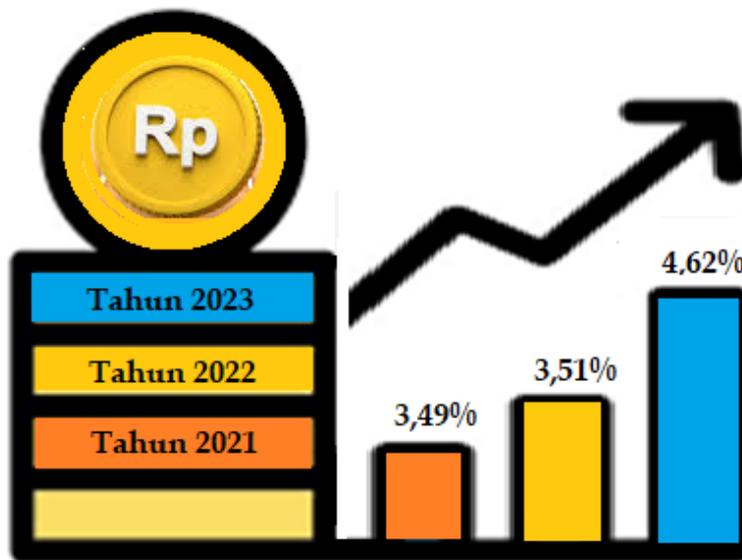
#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah antara lain : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

##### 1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.



**Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023**

Ekonomi Bondowoso tahun 2023 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,62% setelah tahun sebelumnya (2022) tumbuh sebesar 3,51%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,11% point. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi.

**Tabel 2. 1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023**

No	Uraian Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,38%	-1,61%	2,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,79%	5,91%	2,02%
3	Industri Pengolahan	3,81%	6,23%	5,02%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,34%	6,77%	7,02%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	6,31%	-0,77%	-0,33%
6	Konstruksi	0,38%	6,70%	6,00%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,43%	6,76%	6,42%
8	Transportasi dan Pergudangan	12,37%	14,09%	9,75%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15%	11,99%	10,41%
10	Informasi dan Komunikasi	6,85%	3,09%	7,31%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,05%	1,13%	4,69%
12	Real Estat	1,44%	5,25%	1,78%
13	Jasa Perusahaan	1,65%	4,72%	6,78%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,61%	-1,53%	-1,28%
15	Jasa Pendidikan	2,14%	1,93%	5,96%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43%	1,36%	4,34%
17	Jasa Lainnya	4,18%	10,75%	9,59%
	Pertumbuhan Ekonomi	3,49%	3,51%	4,62%

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,41%. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,76%. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 9,59%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,31%. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 7,10%.

**Tabel 2. 2**  
**Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan**  
**Usaha Tahun 2021-2023**

No	Uraian Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29,47%	28,34%	27,88%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,84%	1,86%	1,83%
3	Industri Pengolahan	24,42%	25,28%	25,43%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,04%	0,04%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,07%	0,07%	0,07%
6	Konstruksi	8,80%	9,13%	9,22%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	14,90%	15,37%	15,66%
8	Transportasi dan Pergudangan	0,75%	0,83%	0,91%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63%	0,68%	0,71%
10	Informasi dan Komunikasi	5,64%	5,40%	5,41%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83%	2,80%	2,80%
12	Real Estat	1,16%	1,14%	1,09%
13	Jasa Perusahaan	0,36%	0,36%	0,36%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,32%	3,07%	2,86%
15	Jasa Pendidikan	3,52%	3,34%	3,37%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80%	0,77%	0,76%
17	Jasa Lainnya	1,44%	1,54%	1,61%
	Jumlah	100%	100%	100,00%

Struktur PDRB Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,88%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 25%. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,43%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,66%; Konstruksi sebesar 9,22%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,41%. Besaran kontribusi Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terlihat semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Selain itu, lapangan usaha Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi cenderung konstan. Kontribusi dari 5 (lima) lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi mencapai 83,60% dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023

**Tabel 2. 3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023**

No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.818,35	3.756,87	3.834,43	6.204,93	6.489,78	6.906,68
2	Pertambangan dan Penggalian	257,49	272,71	278,22	388,06	425,65	453,48
3	Industri Pengolahan	3.358,39	3.567,46	3.746,55	5.140,41	5.788,78	6.300,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	7,41	7,93	9,01	9,74	10,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	12,06	11,97	11,93	15,68	16,12	16,37
6	Konstruksi	1.107,78	1.182,05	1.252,99	1.852,41	2.091,20	2.282,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.182,66	2.330,19	2.479,69	3.136,50	3.520,24	3.880,21
8	Transportasi dan Pergudangan	113,59	129,60	142,24	158,08	189,64	224,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,00	94,07	103,86	132,78	155,04	175,92
10	Informasi dan Komunikasi	1.041,68	1.073,90	1.152,35	1.188,01	1.236,89	1.339,17

No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	399,27	403,80	422,72	596,56	641,28	693,49
12	Real Estat	175,91	185,14	188,44	243,67	259,97	269,44
13	Jasa Perusahaan	47,61	49,86	53,24	76,35	81,73	89,40
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	440,13	433,39	427,86	697,89	702,78	709,43
15	Jasa Pendidikan	529,62	539,84	572,03	741,71	764,93	834,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,78	123,44	128,80	167,71	175,56	187,16
17	Jasa Lainnya	224,39	248,51	272,34	302,49	352,51	399,97
	Jumlah	13.921,65	14.410,20	15.075,62	21.052,23	22.901,86	24.773,36

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.21,05 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp.22.90 triliun pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai Rp.24,77 triliun. Begitu pula PDRB ADHK meningkat dari Rp.13,92 triliun tahun 2021, meningkat menjadi Rp.14,41 triliun pada tahun 2021 dan tahun 2023 mencapai angka sebesar Rp.15,08 triliun.

## 2. PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso**  
**Tahun 2021-2023**

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun (dalam Juta)		
		2021	2022	2023
1	ADHB (Rp)	27,01	29,22	31,43
2	ADHK (Rp)	17,86	18,38	19,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2023 mencapai Rp.31,43 juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas barang dan jasa sebesar Rp.2,62 juta/bulan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2023 mencapai angka Rp.19,13 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp.1,59 juta/per bulan.

### 3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

**Tabel 2. 5**  
**Indek Gini Kabupaten Bondowoso 2020-2022**

No	Uraian	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Gini Rasio	0,334	0,365	0,350

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Indek Gini sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan menjadi 0,350 atau menurun 0,015 point dari tahun 2022. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Bondowoso cenderung menurun meskipun masih dalam kategori ketimpangan “sedang”.

Distribusi pendapatan antar penduduk telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan?. Kondisi penduduk Bondowoso yang dibawah garis kemiskinan saat ini (tahun 2023) mengalami peningkatan ketimpangan berdasarkan indek

kedalaman dan indek keparahan kemiskinan dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 meskipun indek gini menurun secara agregat diwilayah Bondowoso. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat dirasakan secara merata pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan aspek yang kedua adalah distribusi pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersepit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 secara agregat di Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya indek gini serta menurunnya tingkat kemiskinan baik secara persentase maupun jumlah penduduk miskin.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Perlu adanya rumusan kebijakan lokal untuk lebih menurunkan besaran angka koefisien gini. Pemerintah akan lebih mengedepankan pengawasan terhadap pendanaan atau bantuan yang diberikan agar lebih tepat sasaran untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu serta distribusi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkarakteristik kewilayahan dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Persentase penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 2. 6**  
**Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2023**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2021	14,73	423.150	115,18	2,19	0,49
2022	13,47	449.760	105,69	1,62	0,33
2023	13,34	494.000	105,13	2,06	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bondowoso, 2024

Secara umum, dalam periode 2021-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 115,18 ribu jiwa, berkurang sekitar 10,05 ribu jiwa menjadi 105,13 ribu jiwa pada tahun 2023.

Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar 14,73%, berkurang sebesar 1,39% poin atau menjadi 13,34% pada tahun 2023.

Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.494.000,00 per kapita per bulan apabila dibandingkan tahun 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp.44.240,00 per kapita per bulan menjadi sebesar Rp.449.760,00. Peningkatan Garis Kemiskinan ini terjadi diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan nilai dari 1,62 pada tahun 2022 menjadi 2,06 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,33 pada tahun 2022 menjadi 0,51 pada 2023 yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan, semakin bertambahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut tentunya membutuhkan perlakuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dimana perlu adanya program pembangunan yang bersifat spesifik untuk tiap kelompok pengeluaran penduduk miskin.

## **5. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus tahun 2023 Kabupaten Bondowoso sebesar 4,15% mengalami penurunan 0,17% dari tahun 2022 yang mencapai 4,32%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Menurunnya TPT menunjukkan nilai kinerja yang positif. Dengan berkurangnya TPT, berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke lapangan kerja.. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2. 7**  
**Statistik Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023**

No	Rincian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	2	3	5	6
1	Usia Kerja (jiwa)	632.700	636.559	629.946
2	Angkatan Kerja (jiwa)	467.488	474.928	468.642
3	Bukan angkatan Kerja (jiwa)	165.212	161.631	161.304
4	Bekerja (jiwa)	446.653	454.395	449.210
5	Pengangguran Terbuka (jiwa)	20.835	20.533	19.432
6	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,46	4,32	4,15
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,89	74,61	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Statistik Ketenagakerjaan pada Agustus tahun 2023 terdiri dari 449.210 orang penduduk yang bekerja dan 19.432 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 yaitu kondisi dimana merupakan puncak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.154 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2.557 orang dan pengangguran menurun sebanyak 1.403 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun 2022, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 6.286 orang. Penduduk bekerja juga turun sebanyak 5.185 orang dan pengangguran turun sebanyak 1.101 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun 0,22% poin dibandingkan tahun 2022 menjadi 74,39%.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, terdapat tiga sektor lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan pekerjaan Pertanian meliputi subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Lapangan pekerjaan manufaktur (industri) terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi. Sedangkan lapangan pekerjaan jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan.

**Tabel 2. 8**  
**Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2023**

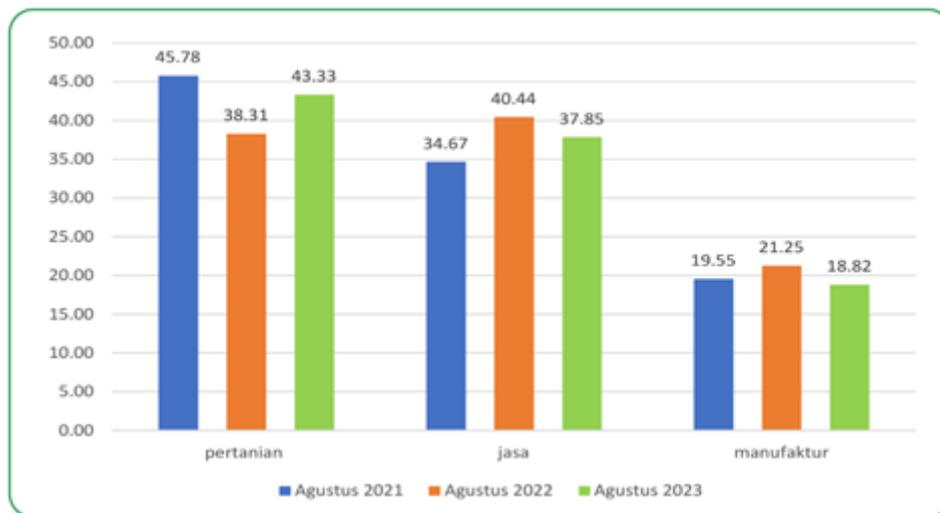
No	Jenis Pekerjaan	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian	204.486	174.079	194.643
2	Manufaktur	87.302	96.559	84.541

No	Jenis Pekerjaan	Th 2021	Th 2022	Th 2023
3	Jasa	154.865	183.757	170.026
	Jumlah	446.653	454.395	449.210

'Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Pada tahun 2023, penduduk yang bekerja sebanyak 449.210 orang, berkurang 5.185 orang dari tahun 2022 yang sebesar 454.395 orang. Sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja dengan persentase orang yang bekerja yaitu sebesar 43,33% (194.643 orang). Disusul dengan sektor jasa sebesar 37,85% (170.026 orang) dan manufaktur dengan persentase 18,82% (84.541 orang). Dibanding tahun 2022 dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, Pertanian mengalami peningkatan persentase sebesar 5,02%, berbanding terbalik dengan sektor jasa dan manufaktur yang turun sebesar 2,58% dan 2,43% orang yang bekerja.

**Gambar 2. 1**  
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Taun 2021-2023**



## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM juga menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya..

**Tabel 2. 9**  
**Perkembangan IPM Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
2	Indek pembangunan Manusia/IPM (Penyesuaian dengan menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF))	69,24	69,91	70,56

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023*

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso terus mengalami kemajuan hingga tahun 2022, dengan status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso berada pada level “sedang”. Pada tahun 2023 ini, status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi level “tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2023 mencapai 70,56, meningkat 0,65 poin (0,93%) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 69,91.

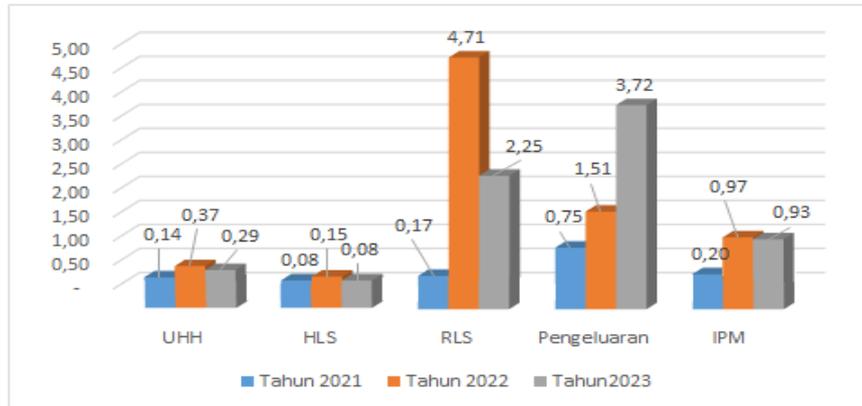
**Tabel 2. 10**  
**Perkembangan Komponen**  
**Pembentuk IPM Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,71	72,98	73,19
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,29	13,31	13,32
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,94	6,22	6,36
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.690	10.851	11.255

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024*

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM tahun 2023 sebesar 0,93% sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,97%. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami perlambatan, kecuali dimensi standar hidup layak yang mengalami percepatan. Selama 2021–2023, IPM Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,70% per tahun.

**Gambar 2. 2**  
**Persentase Pertumbuhan Komponen**  
**Pembentuk IPM dan IPM Tahun 2021-2023**



Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,48 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27% per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Bondowoso adalah 72,71 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,19 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,21 tahun (0,29%) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (0,27%).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, HLS Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat 0,10% per tahun, sementara RLS meningkat 2,38% per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,14 tahun (2,25%) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bondowoso mencapai Rp.11,255 juta per tahun. Capaian ini meningkat 404 ribu rupiah (3,72%) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 yang sebesar 1,99% per tahun.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Adapun mapping perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 11**  
**Perangkat Daerah Pelaksana**  
**Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilih**

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , Cipta Karya dan Tata Ruang
Pertanahan	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Penanaman Modal	
Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perhubungan	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian	

URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Statistik	
Transparansi Dan Partisipasi Publik	
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan	
Perindustrian	
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Pariwisata	
Kebudayaan	
Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan	
Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kehutanan	
Energi Dan Sumber Daya Minera	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Transmigrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Manajemen Keuangan	
Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Makro	Badan Perencanaan , Pembangunan , Penelitian , dan Pengembangan Daerah
Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah	
Fasilitasi Kepala Daerah, Dprd, Dan Hubungan Antar Lembaga	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
KKPD	

## 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

**Tabel 2. 12**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Out Put)**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Terhadap LPPD tahun 2023**

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	752	Unit	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek, emis kemenag dan Dukcapil
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	40333	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	40333	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD ( Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	2576	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	2866	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sebanyak .....	625	Orang	SIM Tunjangan Kemendikbudristek
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-	Sebanyak .....	261	Orang	SIM Tunjangan Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			formal dari lembaga pemerintah				
	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak .....	523	Unit	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	64288	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	31529	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	64288	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	31529	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	3166	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	1137	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	4112	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	1316	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	511	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	456	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	1056	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	544	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	1740	Orang	SIM Tunjangan Kemendikbudristek
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	606	Orang	SIM Tunjangan Kemendikbudristek
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	456	Orang	IM Tunjangan Kemendikbudristek
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	Sebanyak .....	86	Orang	IM Tunjangan Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pelatihan calon kepala sekolah				
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	1056	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	544	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	12	Unit	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	15419	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	15419	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	482	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	168	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sebanyak .....	91	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	Sebanyak .....	0	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pelatihan calon kepala sekolah				
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak .....	48	Orang	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan					
		1	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak .....	3	Unit	
	KESEHATAN	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi					
	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak .....	3	Unit		
	KESEHATAN	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2. Tablet Tambah Darah	2.225.548	Unit			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5. Buku KIA , dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sebanyak .....	1.272	Orang	
	KESEHATAN	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Formulir Fotograf 2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3. Buku KIA , dll	29.373	Unit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		1.272	Orang	Seksi SDM dan Seksi KGM
	KESEHATAN	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Vaksin Hepatitis BO 2. Vitamin K1 Injeksi 3. Salep/Tetes Mata Antibiotik 4. Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM 6. Buku KIA , dll	48.937	Unit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak .....	1.272	Orang	
	KESEHATAN	<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2. Formulir DDTK	216.413	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT - HB -Hib * Campak Rubella 6. Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sebanyak .....	6.707	Orang	
	KESEHATAN	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Buku Raport Kesehatanku	91.151	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Buku Pemantauan Kesehatan 3. Kuesioner Skrining Kesehatan 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sebanyak .....	3.686	Orang	
	KESEHATAN	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur	870.170	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , Dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	1.555	Orang	
	KESEHATAN	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	212.199	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3. Buku Kesehatan Lansia , Dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	1.555	Orang	
	KESEHATAN	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2. Tensimeter 3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	269	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Aplikasi Sistem Informasi PTM , Dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	1.313	Orang	
	KESEHATAN	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3. Pedoman dan Media KIE , Dll	33.041	Unit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	1.360	Orang	
	KESEHATAN	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	50	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dukungan Logistik seperti : 1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4. Media KIE , DII			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	61	Orang	
	KESEHATAN	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti :	25.235	Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2. Reagen Zn TB 3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5. Catridge Tes Cepat Molekuler 6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur , Dll			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	813	Orang	
	KESEHATAN	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ..... Dukungan Logistik seperti : 1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3. Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4. Lainnya...	74.925	Unit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk	Sebanyak .....	813	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
1		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	0	Ha		
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	0	Meter		
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	0	Ha		
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	0	Meter		
5		Rencana Tata Pengaturan air dan	Rencana Tata Pengaturan air dan tata	Ada	Ada		

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Ada	Ada	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m)	0	Sarpras	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				viii. Seawall dan Bangunan pengamanan pantai lainnya (m)			
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	30,212  30,910	97.75	%
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	141,590  163,089	86.81	%
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	274,905  390,553	70.38	%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota					
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada	Dokumen	Review Dokumen RISPAM Kabupaten Bondowoso akan dilaksanakan tahun 2024

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	Dokumen	Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Sebanyak .....	1	BUMD / UPTD	PDAM Kabupaten Bondowoso
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sebanyak .....	0	Izin	Kewenangan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak .....	0	Kerjasama	Tidak ada kerja sama dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lain
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	Sebanyak .....	192.158	Rumah	Jumlah rumah dengan akses SPALDS

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menggunakan SPALDS				
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak .....	0	Rumah	Sistem sanitasi yang digunakan OPD adalah SPALD-S
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sebanyak .....	192.158	Rumah	Jumlah rumah dengan akses SPALDS
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak .....	0	Rumah	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Sebanyak .....	0	Rumah	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak .....	192158		Rumah	Cakupan akses sanitasi 2023
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	192,158	74.35	%	Cakupan akses sanitasi 2023
					258,418			
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
					258,418			
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}} \times 100\%$	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
					258,418			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				$\sum$ rumah di wilayah pengembangan SPALD T				
		10	Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	$\sum$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat $\text{-----} \times 100\%$ $\sum$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	192,158	74.35	%	Cakupan akses sanitasi 2023
					258,418			
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\sum$ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia $\text{-----} \times 100\%$ $\sum$ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
					1			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\sum$ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia $\text{-----} \times 100\%$ $\sum$ Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
					12			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	0	0	%	Kabupaten Bondowoso belum memiliki IPLT
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota						
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah}} \times 100\%$	51	85	%	Rasio Laik Fungsi
					60			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)			
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak .....	154	Izin	Keterangan rasio kepatuhan IMB
		3	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Perda	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	Ada	Penetapan Keputusan	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak .....	0	Bangunan	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sebanyak .....	0	Bangunan	
		7	Jumlah bangunan gedung Negara milik	Sebanyak .....	0	Bangunan	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemerintah Kabupaten/Kota				
		8	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak .....	0	Bangunan	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang ....	1395.276	KM	
		2	Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang ....	0	KM	
		3	Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang ....	0	KM	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang ....	35.943	KM	
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang ....	0	KM	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang ....	3.703	KM	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang ....	12	Meter	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8	Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang ....	1395.276	KM	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang ....	2475.26	Meter	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	2	Orang	
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	70	Orang	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0	Orang	
		4	Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada (1)	Sistem informasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada (1)	Data	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang	Ada/Tidak	Tidak	Data/Informasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis				
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada (1)	Data/Informasi	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	161	Badan Usaha	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di	Sebanyak .....	599	Badan Usaha	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			wilayah Kabupaten/Kota				
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	161	Badan Usaha	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	161	Badan Usaha	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak .....	1	Izin	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	92	Pengawasan	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi	Sebanyak .....	0	Kecelakaan Konstruksi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kewenangan pengawasannya				
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	92	Pengawasan	
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sebanyak .....	0	Rumah	Surat Keterangan
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak .....	13	Rumah	Daftar Nama Rumah Korban Bencana
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak .....	39	Orang	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	0	Rumah	Surat Keterangan

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	10	Rumah	Daftar Nama Rumah Korban Bencana
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	13	Rumah	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak .....	0	Unit	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak .....	69	Orang	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas .....	0	Ha	
	PERUMAHAN RAKYAT	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan	Sebanyak .....	0	Rumah Tangga	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			rencana pemenuhan SPM				
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0	Rumah Tangga	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0	Rumah Tangga	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	10	Rumah Tangga	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah	Sebanyak .....	0	Rumah Tangga	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas .....	0	Ha	
	PERUMAHAN RAKYAT	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Seluas .....	831.6	Ha	SK KUMUH BONDOWOSO
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak .....	29	Unit	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Seluas .....	133.4	Ha	
	PERUMAHAN RAKYAT	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	258.418	Rumah	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak .....	794	Rumah	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak .....	70.530	Rumah	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak .....	0	Rumah	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- x 100% Jumlah total unit rumah	83,56	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak .....	57	Rumah	
	PERUMAHAN RAKYAT	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak .....	5	Perumahan	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak .....	540	Rumah	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak .....	540	Rumah	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak .....	540	Rumah	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak .....	5	Perumahan	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak .....	540	Rumah	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak .....	2	Pengembang	
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak .....	2	Pengembang	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak .....	5	Pengembang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak .....	4.653	Pelanggaran dan Pengaduan	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak .....	3.535	Orang	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak .....	28	Perda & Perkada	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak .....	2	Orang	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Sebanyak .....	28	SOP	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	(Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	Sarpras	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							bondowoso Tahun 2023
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
1		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1 1	100	%	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	255,332 796,911	32.04	%	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
1		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	1 1	100	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	1 1	100	%	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	32 64	50	%	
		4	Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	240 796,911	0.03	%	
		5	Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	32.04		%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		6	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	189	0.023	%	
					796,911			
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	2	100	%	
					2			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	2	100	%	
					2			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	32	100	%		
					32				
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	752	100	%		
					752				
		<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>							
		<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	186		Layanan		
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana	Tidak		sarana prasarana		

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak	Layanan	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak .....	0	Pos	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak .....	16	Sarpras	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009	Sebanyak .....	33	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran				
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak .....	0	Orang	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sebanyak .....	1	Kegiatan	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah .....	6	Layanan	
		2	Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sebanyak .....	10863	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak .....	1	Tim	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak .....	5341	Orang	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak .....	2	Unit	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sebanyak .....	5193	Orang	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak .....	1	Unit	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	Sebanyak .....	60	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			gepeng yang menerima paket sandang				
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak .....	37	Orang	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak .....	0	Peralatan	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak .....	1	Paket	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak .....	34	Orang	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak .....	0	Orang	
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau	Sebanyak .....	6	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			TKS dan/atau relawan social yang disediakan				
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	Sebanyak .....	150	Orang	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak .....	2	Kegiatan	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak .....	2	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sebanyak .....	5	Orang	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Sebanyak .....	3	Orang	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak .....	3	Orang	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sebanyak .....	5	Orang	
	SOSIAL	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak .....	75	Orang	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan sebanyak 75 orang
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak .....	0	Orang	Pada tahun 2023 tidak ada korban bencana yang mendapatkan bantuan paket sandang.
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak .....	0	Penampungan	Pada tahun 2023 Dinas Sosial P3AKB tidak memiliki tempat penampungan pengungsi,
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak .....	0	Paket	Pada tahun 2023 tidak ada paket permakanan khusus bagi kelompok rentan di Dinas Sosial P3AKB.
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak .....	75	Orang	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 75 orang

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak .....	231	Orang	jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia sebagai berikut : TKSK 23 orang Tagana 35 orang PKH 173 orang	
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada	Dokumen		
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	580.65 580.65	98.96	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				realisasi indikator - Target indikator ----- X 100% Realisasi				
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	49		Perusahaan	
	TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						
		1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ----- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	31 32	96.87	%	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	10 12	83.33	%	
		3	Rasio jumlah isntruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- X 100%	12 516	2.32	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah peserta pelatihan pada tahun n				
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	20	66.66	%	
					30			
		5	Persentase LPK yang memiliki	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100\%$	20	66.66	%	
					30			
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak .....	516		Orang	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$	516	100	%	
					516			
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100\%$	1,733	21,20	%	
					8,173			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	496	96.12	%	
					516			
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	98	100	%	
					98			
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ... ----- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n  Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	98	100	%	
					98			
	TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	10	1.21	%	
					825			
		2	Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	0		Data	
	TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	42	20.38	%	
					206			
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja	11	91.66	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Bersama (PKB) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	12			
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sebanyak .....	12		SP/SB	
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah... ----- X 100% Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	177	333.96	%	
					53			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	611	74.06	%	
					825			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	2	74.06	%	
					825			
		7	Jumlah mogok kerja	Sebanyak .....	0		Mogok Kerja	
		8	Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak .....	0		Perusahaan	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah .....	0		Perselisihan	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah .....	0		Perselisihan	
		11	Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah .....	0		Perselisihan	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak .....	0		Orang	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah .....	0		Perselisihan	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity	Ada/Tidak	Tidak		Lembaga Kerja Sama	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Kabupaten/Kota yang diberdayakan					
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan	0	0	%	
					1			
	TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota						
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	2.561		Lowongan Kerja	
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	2.454		Orang	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	24		BKK	
		4	Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	8.030		Orang	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sebanyak .....	1		Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		6	Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0		Lembaga	
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	8		Lembaga	
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak .....	1.733		Orang	
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- X 100% Jumlah CPMI/CTKI	98 98	100	%	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata .....	98		Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- X 100% Jumlah PMI yang pulang	13 13	100	%	
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- X 100% Jumlah PMI/TKI	98 98	100	%	
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	20 165	12.12	%	
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0 21	0		
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah	Sebanyak .....	30	Lembaga	Terdapat 30 Perangkat daerah yang melakukan	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG				analisa PPRg pada Anggaran program kegiatan dengan rincian sebagaimana terlampir
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	112	Program Kegiatan	Berdasarkan dokumen PPRG, Perangkat Daerah melakukan analisa pada anggaran yang responsif gender pada 112 kegiatan/sub kegiatan dengan rincian sebagaimana terlampir
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sebanyak .....	2	Media Massa	Pada tahun 2023 Media Massa dalam hal ini media elektronik melalui Siaran Radio yang bekerjasama untuk menyiarkan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak adalah: 1. Radio Mahardika

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							FM 2. Radio RRI Pro 2 Jember	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak .....	3	Lembaga	1. UPTD PPA Bondowoso 2. LKP3A PC Fatayat NU 3. Puspaga Harmonis Bondowoso	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	42 42	100	%	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan di kabupaten Bondowoso sebanyak 42 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, spsikis, dan penelantaran. Korban dan pelapor telah melaporkan kasusnya ke UPTD PPA dan Unit PPA Polres Bondowoso
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	154	Lembaga	Pada tahun 2023 Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, melaksanakan	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Capacity Building untuk Optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Berbasis Masyarakat dan Pesantren. Kegiatan ini melibatkan Lembaga Layanan Anak yang ada di Kabupaten Bondowoso, sehingga pada tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Puspaga Berbasis Masyarakat dan Pesantren, sebagaimana terlampir.
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak .....	1	Lembaga	Terdapat 1 Lembaga Layanan perlindungan Anak yang mendapatkan Bantuan Keuangan untuk memberikan layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan dari tahun

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							ketahun melalui P2TP2A yang pada tahun 2023 telah berubah dan ditetapkan menjadi UPTD PPA
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Sebanyak .....	37	Organisasi	Terdapat 37 Organisasi Wanita yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bondowoso sebagaimana dokumen terlampir
		2	Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak .....	46	Orang	Kegiatan pelatihan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebanyak 46 orang yang mengikuti pelatihan pembuatan roti O dan Roti Tawar
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	1	Lembaga	Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan pelatihan adalah dari

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0	Lembaga	Pada tahun 2023 tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AKB terkait peningkatan kapasitas dari lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang ada di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Sebanyak .....	2	Kebijakan/Program	PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEGIATAN :

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi				PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN : 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota 2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak .....	3	Lembaga	1. UPTD PPA Bondowoso 2. Puspaga Harmonis Bondowoso 3.

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
								LKP3A PC Fatayat NU Bondowoso
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	24	100	%	Pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Bondowoso yang dilaporkan sejumlah 24 kasus. Dengan seluruh kasus telah memperoleh pelayanan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi korban.
					24			
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)						
		1	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Tidak		Infrastruktur perundangan	
		2	tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		Pangan	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak		regulasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			daerah untuk pangan lokal				
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	pemberdayaan masyarakat	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Peta ketahanan dan kerentanan pangan	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	kerawanan	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	Cadangan pangan	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Pengawasan	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0	0	%	Izin lokasi sudah tidak berlaku digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
					1			
		2	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	0	0	%	Belum ada penyusunan Tim Kelompok Kerja Gugus Tugas Reforma Agraria untuk melaksanakan program tersebut
					1			
		3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai	0	0	%	Belum ada penyusunan Tim Kelompok Kerja Gugus Tugas Reforma Agraria untuk melaksanakan program tersebut
					1			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek				
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0	0	%	Belum ada program penyusunan Dokumen Izin Membuka Tanah yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023
					1			
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0	0	%	Belum ada program penyusunan Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023
					1			
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota						
		1	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap:	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap:	66.76 Indeks Kualitas Pencemaran Air 48.46		%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Indeks Kualitas Pencemaran Udara 86.75 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 61.21		
	LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Ada	Tersedianya data dan informasi	
	LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	4,581	100	%	
					4,581			
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7	0.15	%	
					4,581			
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- X 100% Jumlah usulan MHA	0	0	%	
					1			
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- X 100% Jumlah MHA yang ada	0	0	%	
					1			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	91	91	%	
					100			
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	2	100	%	
					2			
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik						
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	373	100	%	Penerbitan Akta Perkawinan
					373			
		2			59	100	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	59			Penerbitan Akta Perceraian
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	35,650 48,937	72.84	%	Penerbitan Akta Kematian
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ----- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	2 2	100	%	Penyajian data kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak .....	117		Desa	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak .....	109		Desa	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sebanyak .....	411	Lembaga	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak .....	209	Desa	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK	Ada	Dokumen	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022 - 2046
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai	18,2	MUKP	Dari Buku InfoGrafik Kinerja Utama Bangsa Kencana Hasil

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			wanita umur 25-49 tahun	usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.			Pemutakhiran Pedataan Keluarga Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN RI, 2024	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26,79	ASFR	Sumber Data kelahiran umur ibu 15-19 tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Banyaknya Wanita Umur 15-19 dari PKPK'23	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	104,47 2 132,84 9	78.63	%	Infografik Kinerja Utama Bangsa Kencana, Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, oleh BKKBN, 2024
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi organisasi kemasyarakatan) yang	Sebanyak .....	2	Stakholder	Berupa MoU / perjanjian kerjasama dengan Stakeholder lintas sektor terkait yaitu dengan Kantor Kementerian Agama	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK				Kabupaten Bondowoso, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso tentang pelaksanaan Program Bangga Kencana	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- X 100% Jumlah faskes	34 34	100	%	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- X 100% Jumlah pasangan usia subur	14,823 110,43 7	13.42	%	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI
		3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak .....	1		Kelompok Kerja KKBPK	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- X 100%	8,876 16,577	53.54	%	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan  KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari				
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota  Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50%	1,957 2,579	75.88	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah				
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- X 100% Jumlah keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	70,113 70,175	99.91	%	Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI.
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota						
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ----- X 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan	0 1	0	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan				
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	2,820 3,246	86.87	%	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- X 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	0 1	0	%	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	1,175 1,438	81.71		
	PERHUBUNGAN	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota						
		1			1,175	81.71	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	1,438			
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	58	100	%	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- X 100%	58	100	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah Perangkat Daerah				
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak	Ada		sistem elektronik	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat	29	100	%	
					29			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah				
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	36 58	62.06	%	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	58 58	100	%	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	16 16	100	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			diimplementasikan secara elektronik	----- X 100% Jumlah Layanan			
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- X 100% Jumlah layanan	133 277	48.01	%
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	298 298	100	%
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- X 100% layanan publik dan layanan administrasi	25 37	67.56	%
		8	Persentase perangkat daerah yang	Jumlah perangkat daerah yang	35	60.34	%

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menggunakan layanan pusat data pemerintah	menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	58		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	35 58	60.34	%
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	35 58	60.34	%
		11	Persentase data yang dapat dibagi pakai	Jumlah data yang dapat dibagi pakai ----- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	2,927 2,927	100	%
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi	34	58.62	%

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			inovasi yang mendukung smart city	inovasi yang mendukung smart city ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	58			
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah ASN pengelola TIK	0	0	%	Tidak Ada
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: <input type="checkbox"/> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran <input type="checkbox"/> Penganggaran <input type="checkbox"/> Strategi <input type="checkbox"/> Peta Jalan <input type="checkbox"/> Arah Kebijakan <input type="checkbox"/> Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling	Ada		peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab				
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota	92 219	42.00	%	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	1 1	100	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- X 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota				
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- X 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	1	100	%	
					1			
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas						
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- X 100%	0	0	%	
					521			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam				
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0 1	0	%	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	14,4		%	Data Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	9,77	%	Data Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Dinilai Kesehatannya
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	25,72	%	Data Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- X 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	640 100,40 2	0.63 %	Data jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	8	0.82 %	Data jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	972			
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	13	1.33	%	Data Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan
					972			
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	278	28.60	%	Data jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
					972			
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	13	1.33	%	Data jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan
					972			
		11			18	1.85	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	972			data jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	43.21		%	Data jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	14	1.44	%	Data jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						
		1			177	0.44	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	40,035			Data pertumbuhan wirausaha baru
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	7,925 40,212	19.70	%	Data jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	27 40,212	0.06	%	Data jumlah usaha mikro yang bermitra
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	70 40,142	0.17	%	Data jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi
		5			332	0.83	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	39,880			Data jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	700	1.74	%	Data jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
					40,212			
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	4,545	11.30	%	Data jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha
					40,212			
18	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota						
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	Ada Perda No. 3 Tahun 2016 Capaian Kinerja 100%		PERDA	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak .....			
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada Capaian kinerja 100%	Standar operasional prosedur	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak .....	1	Laporan	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak .....	13	Kegiatan	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak .....	1	Kegiatan	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak .....	1	Kegiatan	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	317	Konsultasi	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	13.761	Izin	
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan realisasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak .....	Rp. 5.278.663.378.114	penanaman modal	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak .....	5	Aparatur	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak .....	78	Perusahaan	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak .....	Ada sebanyak 14 instansi yang meminta data dan informasi	data dan informasi perizinan dan non peizinan	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak .....	604	Orang	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak .....	1.316	Orang	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Sebanyak .....	0	Orang	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Sebanyak .....	73	Orang	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan prestasi olahraga					
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak ..... Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap	291	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga			
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak .....	1	Event/Kegiatan	
20	STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada	buku profil daerah	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	1	Survey	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	1	Kompilasi	
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak .....	1	Survey	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak .....	1	Kompilasi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	3	100	%		
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral	21	100	%		
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah							
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- X 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	2	100	%		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- X 100% Jumlah SE yang ada	110	37.41	%		

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah				
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- X 100% Jumlah SE yang ada	100 294	34.01	%
		4	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ----- X 100% Jumlah titik pada PHKS	35 35	100	%
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak .....	2	Obyek	Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penyelamatan dan publikasi)				
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak .....	2	Obyek	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak .....	2	Obyek	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak .....	210	Orang	Pembinaan Seni Budaya Tahun 2023

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak .....	53	Cagar Budaya	Daftar Penetapan Cagar Budaya, Pada Tahun 2023 Tidak Ada Penghapusan Cagar Budaya
		6	Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak .....	1423	Cagar Budaya	Data Cagar Budaya Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak .....	0	Cagar Budaya	Tidak terdapat perizinan membawa cagar budaya keluar provinsi dikarenakan tidak pernah ada pengajuan
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak .....	0	Cagar Budaya	Pada Tahun 2023 tidak terdapat Kegiatan Penelitian dan Revitalisasi Cagar Budaya dikarenakan ketidakterediaan anggaran APBD Tahun 2023
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama,	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak .....	353	Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi Tahun 2023

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)				
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak .....	252	Koleksi	Rekapitulasi Koleksi Pusat Informasi Megalitik Bondowoso (PIMB) Tahun 2023
		11. a	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak .....	2649	Orang	Laporan Kunjungan Pusat Informasi Megalitikum (PIMB) Tahun 2023
		11. b	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak .....	37	Orang	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)			
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak .....	1	Tim	Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak .....	1	Tim	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2021-2023
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak .....	5	Orang	Sertifikat Kompetensi Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bondowoso
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak .....	37	Orang	Juru Pelihara / Tenaga Pelestari Cagar Budaya Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB +	37	Orang	Juru Pelihara / Tenaga Pelestari Cagar Budaya Kabupaten

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Museum) sebanyak .....			Bondowoso Tahun 2023	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak .....	37	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Cagar Budaya dan Museum Tahun 2023	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak .....	5	Kegiatan	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM Cagar Budaya Tahun 2023	
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	838,63 3  796,91 1	105.23	%	
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	108,17 7 796,91 1	13.57	%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		3	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	1,277	0.160	%	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya  Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	796,91 1	45  6.139	%	
						733		

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak .....	18	Kali	
	PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Sebanyak .....	2	Naskah Kuno	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak .....	0	Naskah Kuno	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak ..... Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur	0	Budaya Etnis	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan			
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif	365 1,313	27.79	%
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip inaktif	6,859 7.041	97.41	%
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis	6,544 6,544	100	%
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis	0 14,898	0	%

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan Kabupaten/Kota			
	KEARSIPAN	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)	2505	Arsip	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Arsip	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	27	Arsip	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	286	Arsip		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	6544	Arsip		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis (Jumlah Arsip)	5	Arsip		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan	Sebanyak .....	324	Rumah Tangga		

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			diversifikasi usaha (RTP)				
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0 0	%	Bondowoso tidak punya wilayah laut sehingga tidak ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak .....	30	Izin	Sumber Data: Sistem Online System Submission (OSS)
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	Sebanyak .....	147	Pembudidaya	data pendukung sample data pembudidaya karena tidak memungkinkan untuk di upload semua

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak .....	10.108.000	Ekor	sumber data valnas
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak .....	37	Kawasan	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak ..... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian</li> <li>• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan</li> </ul>	105	Sarpras	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata			
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak .....	599	TDUP	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Sebanyak .....	31.656	Orang	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	11	Kegiatan	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	0	Kegiatan	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak ..... Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang	15	Industri	1. Fotografi 2. Makanan Ringan 3. Fashion 4. Seni Pertunjukan 5. Kerajinan 6. Konveksi 7. Musik 8. Pemandu Wisata 9. Rental Kendaraan/ Travel 10. Content Creator 11. Pengembang Aplikasi 12. Media

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.			(TV/Radio) 13. Kopi 14. Event Organizer 15. Periklanan	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata	85 500	17	%	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	720 720	100	%	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak .....	43		Lokasi	
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak .....	5352		Unit	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak .....	111	Unit		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak .....	14	Dokumen		
		4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	111 111	100	%	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	14 14	100	%	
	PERTANIAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular						
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- X 100% Luas area terkena bencana  Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan	14.84		%	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bencana penyakit hewan menular			
28	KEHUTANAN	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota					
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak	dokumen	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak .....	105	Kelompok Masyarakat	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi .....ha	0	Ha	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0	Kejadian	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak .....	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan $\leq 5$ hari kerja ----- X 100%	1	100	%	Data perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	1			
				Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan $\leq 5$ hari kerja ----- X 100%	107	100	%	
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	107			
2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG $\leq 5$ hari kerja ----- X 100%	46	100	%	Data penerbitan TDG		
		Jumlah permohonan penerbitan TDG	46					
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- X 100%	0	0	%	Data gudang yang tidak mempunyai TDG		
		Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	1					
4				0	0	%	Data penerima waralaba dari	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :			waralaba dalam negeri	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq 2$ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100%	1			
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri				
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :	0	100	%	Data Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri
				Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq 2$ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100%	1			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri				
				c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :	0	0	%	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
				Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100%	1			
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan	0	0	%	Data jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan
					1			

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			berbaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	berbaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer				pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0 1	0	%	enerbitan SPKA yang tepat waktu
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai	100		%	Data Jumlah Pasar Daerah yang Dibangun dan Dimanfaatkan

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				peruntukannya (nilai 0.5)			
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6.23	%	Data koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok
	PERDAGANGAN	Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang disalurkan  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	96,58	%	Pupuk Bersubsidi
	PERDAGANGAN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100%	8 20,172	0.039 %	Data jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota				
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	345  1,477	23.35	%	Data sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota						
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0  1	0	%	Data jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota
	PERINDUSTRIAN	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)						
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	100% a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya		Dokumen	Data terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			ditetapkannya menjadi PERDA	b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Ya d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Ya e. Penetapan Perda RPIK (10%) Ya			
	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	85	100	%	Data jumlah realisasi izin yang diterbitkan
	PERINDUSTRIAN	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	67 20936	0.32	%	Data persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0		Kawasan	

NO	URUSAN	NO	IKK KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak ..... (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	0	Permukiman	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak .....	0	Permukiman	

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

**Tabel 2. 13**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Terhadap LPPD tahun 2023**

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	15,395	97.05	%	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek, emis kemenag dan Dukcapil
					15,862			
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	64,242	99.92	%	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek, emis kemenag dan Dukcapil
					64,288			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100%	31,529	94.60	%	Sumber data : Dapodikdasmen kemendikbudristek, emis kemenag dan Dukcapil
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	33,328			
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100%	3,000	100	%	Sumber data : Dapodikdasmen Kemendikbudristek
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	3,000			
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100%	476	0.059	%	Laporan Tahunan RS di seksi Yankes Rujukan dan Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso
					796,911			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota				
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	3	100	%	Sertifikat Akreditasi RS
				Jumlah RS di Kabupaten/Kota	3			
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	8,418	82.06	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10,258			
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	9,728	99.35	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
				Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	9,791			
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	8,815	94.53	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
				Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	9,325			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	43,371	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
					43,371			
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	91,051	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
					91,051			
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	417,758	82.55	%	Profil Kesehatan Tahun 2023 dan Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso
					506,046			
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	106,496	80.12	%	Profil Kesehatan Tahun 2023 dan Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso
					132,909			

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
				----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota				
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	169,872 202,709	83.80	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	10,158 10,158	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	1,560 1,560	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan	13,290 13,290	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
			pelayanan TBC sesuai standar	pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota				
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	13,879 13,879	100	%	Profil Kesehatan Tahun 2023
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	0 1	0	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	0	0	%	
					1			
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	4,506	15.06	%	
					29,901			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	127,104	49.18	%	Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM 2023
					258,418			
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	192,158	74.35	%	Cakupan akses sanitasi 2023
					258,418			
		24			154	100	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	154			
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- x 100% Jumlah Panjang jalan Kabupaten/Kota	902.826 1,395.276	64.70	%	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	70 2,621	2.67	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	327	100	%	
					327			
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023	10	100	%	Daftar Nama Korban Bencana
					10			
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100%	0	0	%	
					1			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	133.40 831.6	16.04	%	ba capaian pengurangan luasan kawasan kumuh tahun 2023
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	70,530 258,418	27.29	%	data rekapitulasi rumah layak huni dan rumah tidak layak huni tahun 2023
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	5 52	9.61	%	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100%	4,653 4,653	100	%	

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk				
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	28  28	100	%	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	255,332  796,911	32.04	%	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	193,243 796,911	24.24	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	752	100	%	
					752			
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan	93	100	%	Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bondowoso Tahun 2023
					93			

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
				Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota				
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	9,64		Menit	
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	5,341	49.16	49%	
					10,863			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	75	100	%	Tahun 2023 jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran sebanyak 75 orang
					75			
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	3	25	%	
					12			
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100%	496	0.11	%	
					449,210			

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)	SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan			
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	24,773,360,000,000 Ket. A 449,210 Ket. B	55,148,727.7665 Ket. D %	Data produktivitas total menunggu rilis data BPS
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	78 825	9.45 %	
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	1,733 2,454	70.61 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sejumlah Rp.}} \times 100\%$	370,001,221,538 2,116,269,441,128	17.48 %	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sejumlah Rp.

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD				370.001.221.538 Jumlah APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 sejumlah Rp. 2.116.269.441.128 Presentase ARG pada Belanja Langsung: 17,48% Jumlah presentase ARG mengalami peningkatan dibandingkan angka di tahun sebelumnya dikarenakan adanya tambahan Perangkat Daerah yang telah mengirimkan Dokumen hasil Analisa PPRG yakni sudah ada sebanyak 30 Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	42	100	%	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan di kabupaten Bondowoso sebanyak 42 kasus. Kasus kekerasan yang

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				----- x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	42		terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, spsikis, dan penelantaran. Korban dan pelapor telah melaporkan kasusnya ke UPTD PPA dan Unit PPA Polres Bondowoso
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	24 Orang  293,128 Orang	8.18  %	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten bondowoso diperoleh dari membandingkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi (24 kasus) dengan jumlah perempuan (selain anak) adalah 293.128 orang dan dikali dengan 100.000.
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	301,634.60 301,634.60	100  %	

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	513,987.97	98.73	%	Luas Tanah Sesuai Peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
					520,578.38			
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	%	Belum ada program Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum pada Tahun Anggaran 2023
				1				
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	1,395,645	100	%	Luas tanah yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan Luas KKPR yang terbit
					1,395,645			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	0	0	%	Belum ada program penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) pada tahun anggaran 2023
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0	0	%	Rekomendasi Kementerian LHK dalam rangka penyediaan tanah/pengeluaran dari kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat masih dalam proses
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0	0	%	Belum ada laporan terkait sengketa tanah garapan yang disampaikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219).	66.76 Indeks Kualitas Pencemaran Air 48.46		Indeks	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Pencemaran Udara 86.75 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 61.21			
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota	22,630 116,933.74	19.35	%	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	2 40	5	%	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100%	597,140 613,796	97.28	%	Perekaman KTP Elektronik

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
	PENCATATAN SIPIL			Jumlah penduduk wajib KTP-el				
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	61,785  174,123	35.48	%	Penerbitan KIA
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	182,403  188,207	96.91	%	Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah PD	12  50	24	%	Perjanjian Kerja Sama
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100%	0  1	0	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2023)				
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2023)	18	17.82	%	
					101			
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	2,05		TFR	Siperindu.Online
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	110,437 133,658	82.62	%	Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	4,890 133,658	3.65	%	Sumber data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN RI.
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1	0,9		Rasio konektivitas	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>x bobot angkutan jalan)  + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)  o IK1 (angkutan jalan)  = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut  o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut )  Keterangan:  IK1 (Angkutan Jalan)  • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah</p>			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>trayek perintis ditambah trayek AKAP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wialyah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul>			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30)</p>			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				(bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5				
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,374			
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58	100	%	
					58			

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
			disediakan oleh Dinas Kominfo	----- x 100% Jumlah PD				
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	11 11	100	%	
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk	5,456 796,911	0.68	%	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh kopera	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	132 972	13.58	%	Data Jumlah Koperasi Berkualitas

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	5,183 40,212	12.88	%	Data Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	(Jumlah Investasi tahun 2023 - jumlah Investasi tahun 2022) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun 2022 di Kabupaten/Kota	5,278,663,37 8,114 1,738,330,54 8,112	203.6 6	%	
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	2,595 171,676	1.511	%	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota masih menunggu rilis dari BPS
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100%	26,024 171,676	15.15	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota				
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	283		Medali/Penghargaan	
20	STATISTIK	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	35	60.34	%	
				----- x 100%	58			
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	35	60.34	%	
				----- x 100%	58			
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	547	84.80	%	
				----- x 100%	645			
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1,325	93.11	%	Rekapitulasi Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2023
				----- x 100%	1,423			
				Jumlah cagar budaya yang terdata				

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	57,2	%	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p>	19,04	%	

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)	SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
				UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan			
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	56.30	%	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan,	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	1561,16	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p>	<p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>			

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ----- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	1,177,869  1,380,040	85.35	%	Tangkap = 104.740 Kg Budidaya = 1.073.129 Kg total 1.177.869 Kg Target Produksi Perikanan Tangkap 104.740 Kg Budidaya 1.275.300 Kg , Total target 1.380.040 Kg data target produksi perikanan budidaya berdasarkan Renstra 2018 - 2023
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun 2023 - Jumlah wisatawan tahun 2022 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2022	31,656	111.6 4	%	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun 2023 - Jumlah wisatawan tahun 2022) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2022	523,448  351,565	48.89	%	
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	62,031  220,825	28.09	%	

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Jumlah Kamar yang tersedia x 365 hari				
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB ----- x 100% Total PDRB Berlaku	275,912,500 24,773,360,000	1.113 7	%	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata ----- x 100% Total realisasi PAD	6,461,386,006 208,882,106,677	3.09	%	
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	493,879 79,985	617.4 6	%	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2023 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2022 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2022	28,778 33,794	-14.84	%	Terjadi penurunan penyakit menular sebesar 14,84 % akibat turunnya wabah PMK
28	KEHUTANAN	96	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak		Dokumen Rencana	

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	1 1	100	%	Masih dalam tahap eksploitasi
30	PERDAGANGAN	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	5,717 40,212	14.21	%	Data jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	45,427.763 47,037.519	96.57	%	Data kinerja realisasi pupuk
		100	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	8 20,172	0.039	%	Data jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
31	PERINDUSTRIAN	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022	20,936	0.69	%	Data pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota
					20,791			
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP  Definisi Operasional : Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP  Keterangan :	8,539	106,7 37.5	%	Data pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)
					8			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>▪Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil</p>			

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.</li> <li>▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,</li> </ul>				

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
				<p>strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun</p> <p>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>				
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	85	100	%	Data jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p>	0	0	%	Data jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah

NO (1)	URUSAN (2)	N0 (3)	IKK HASIL (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SATUAN (7)	KETERANGAN (8)
			Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan				yang dikeluarkan oleh instansi terkait
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0	0	%	Data jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	90 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada		%	Data tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini ( <a href="https://bit.ly/laporanindustri2023">https://bit.ly/laporanindustri2023</a> )

NO	URUSAN	N0	IKK HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> <li>- Informasi bahan bakar/energi (10%)</li> <li>- Informasi tenaga kerja (10%)</li> <li>- Informasi Investasi (10%)</li> </ul> Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Tidak 6. Informasi tenaga kerja (10% Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada		
32	TRANSMIGRASI	107	-	-	-		OUT PUT

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**Tabel 2. 14**  
**Indikator Kinerja Fungsi Penunjang**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Terhadap LPPD Tahun 2023**

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PERENCANAAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	672,483,277,727.4 1,971,822,625,734.55	34.10	%

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				----- x 100% Jumlah APBD				
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	210,313,024,950.2 8	10.73	%	
					1,958,944,534,015. 28			
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada Level 3		SPIP	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada Level 3		APIP	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan	1,811,591,817,806. 03	68.57	%	

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(dikurangi transfer expenditures)	- transfer expenditures ----- x 100% Jumlah belanja APBD	1,971,822,625,734. 55		
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 9 WTP 1. Opini BPK Tahun 2021 : WTP 2. Opini BPK Tahun 2020 : WTP 3. Opini BPK Tahun 2019 : WTP 4. Opini BPK Tahun 2018 : WTP 5. Opini BPK Tahun 2017 : WTP 6. Opini BPK Tahun 2016 : WTP 7. Opini BPK Tahun 2015 : WTP 8. Opini BPK Tahun 2014 : WTP 9. Opini BPK Tahun 2013 : WDP 10. Opini BPK Tahun 2012 : WTP	Opini Laporan Keuangan	

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
2	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	1	100	%	
					1			
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	1,188	1,18		
					51			
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan ----- X 100%	736,100,000,000	38.97	%	
					1,888,420,856,074			

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				total belanja operasional dan modal				
		10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ----- X 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	932,700,000,000	13.70	%	
					820,300,000,000			

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
3	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,082	47.06	%	
					2,299			
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	322	14.00		
				2,299				
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk	166	51.55	%	
					322			

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				guru dan tenaga kesehatan)				
4	MANAJEMEN KEUANGAN	14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Realisasi Belanja Nilai absolut dari {----- - 1} X 100% Total Belanja APBD (sebelum perubahan)	1,971,822,625,734.55	-3.96	%	
					2,053,335,101,258			
		15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Total PAD dalam realisasi Nilai absolut dari {----- - 1} X 100% Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)	210,313,024,950.28	-4.33	%	
		16	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya			

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		17	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	220,295,311,541.3 3 1,569,343,979,797. 66	14.03	%	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)}} \times 100\%$	38 58	65.51	%	Tidak Ada
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci (11 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda}} \times 100\%$	3 12	25	%	Tidak Ada

NO	URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD			

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja yang disajikan setelah terdapat penyesuaian dengan Perubahan RKPD 2023 dan KU P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 15**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	2,97%
		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	3,40%
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	7,00%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4 Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,24%
3	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	5 Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	0,06%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	6 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	12%
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7 Rasio Panjang Jalan Baik dengan Jumlah Penduduk	1,20%
		8 Rasio Jaringan Irigasi	0,020
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	9 Indeks Kualitas Air	53,59
		10 Indeks Kualitas Udara	83,06
		11 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	12 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,33%
8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	13 Laju Pertumbuhan Penduduk	0,27%
9	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	14 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,86%
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	15 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7275
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	16 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50
		17 Nilai SAKIP	A
		18 Nilai Opini BPK	WTP
		19 Nilai EKPPD	3,226
12	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	20 Persentase konflik SARA yang ditangani	100%
13	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	21 Persentase ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	100%
14	Meningkatnya Derajat Pendidikan	22 Indeks Pendidikan	55,30
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan	23 Indeks Kesehatan	73,33
16	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Pemuda	24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,01
		25 Status Kabupaten Layak Anak	Nindya
		26 Status Kabupaten Layak Pemuda	Madya

#### B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2040, sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2040.

Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dalam penarikan kesimpulan terhadap kategori

capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara pengukuran kinerja diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis dikategorikan sesuai dengan rentang capaian, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 16**  
**Kategori Penilaian Capaian Kinerja**

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq$ 100%	Memuaskan
$85 \leq$ Capaian $<$ 100	Sangat Berhasil
$70 \leq$ Capaian $<$ 85	Berhasil
$55 \leq$ Capaian $<$ 70	Cukup Berhasil
Capaian $<$ 55	Kurang Berhasil

Adapun capaian indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 17**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
<b>Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan</b>								
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas</b>								
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK)	3,49%	3,51%	4%	4,62%	115,50%	4,00%	115,50%
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB)	5,19%	8,79%	5,05%	8,17%	161,78%	5,05%	161,78%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHK)	-	18,38	17,74	19	107,82%	17,74	107,82%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHB)	-	29,22	27,49	31	114,33%	27,49	114,33%
	Indeks Gini	0,334	0,365	0,28	0,350	75,00%	0,28	75,00%
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan</b>								
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	4,35%	4,59%	2,97%	6,42%	216,16%	2,97%	216,16%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,94%	12,61%	3,40%	8,84%	260,00%	3,40%	260%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	8,91%	12,23%	7,00%	10,23%	146,14%	7,00%	146%
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata</b>								
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	0,99%	1,06%	1,24%	1,11%	89,52%	1,24%	90%
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro</b>								
5	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	1,05%	0,05%	0,06%	0,06%	95,00%	0,06%	95,00%
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah</b>								
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	198,54%	-0,78%	12%	203,66%	1697,17%	12,00%	1697,17%
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi</b>								
7	Rasio panjang jalan baik dengan jumlah penduduk	-	1,25	1,2	1,13	94,17%	1,2	94,17%
8	Rasio Jaringan Irigasi	-	0,019	0,020	0,019	95,00%	0,02	95,00%
<b>Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif</b>								
<b>Tujuan 2 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup</b>								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,39	68,97	67,48	66,76	98,93%	67,48	98,93%
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan</b>								
9	Indeks Kualitas Air	50,00%	55,33	53,59	48,46	90,43%	53,59	90,43%
10	Indeks Kualitas Udara	85,33%	86,70	83,06	86,75	104,44%	83,06	104,44%
11	Indeks Tutupan Lahan	59,49%	59,57	62,54	61,21	97,87%	62,54	97,87%
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman</b>								
12	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,75%	0,33%	0,33	0,18	145,45%	0,00%	-4300%
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>								
<b>Tujuan 3 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan</b>								
	Persentase Tingkat Kemiskinan	14,73%	13,47%	13,00%	13,34%	97,38%	13,00%	97,38%
<b>Sasaran 8 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk</b>								
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,31%	0,37%	0,27	0,37%	198,63%	0,58%	136,21%
<b>Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka</b>								
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,46%	4,32%	1,86%	4,15%	-23,12%	1,86%	-23,12%
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat</b>								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan								
15	Indeks Desa Membangun	0,7081	0,7251	0,7275	0,7377	101,40%	0,7275	101,40%
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif								
Tujuan 4a : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik								
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,35)	B (65,01)	68,00	66,30	97%	67,5	96,31%
Sasaran 11 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,78	81,06	80,50	86,79	107,81%	80,5	107,81%
17	Nilai SAKIP	BB (73,03)	BB (74,02)	A	BB	92,53%	A	92,53%
18	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
19	Nilai EKPPD	3,22	3,22	3,226	2,626	100%	3,22	100%
Tujuan 4b : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat								
	Persentase Potensi Konflik Sosial yg ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatkan Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan								
20	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatkan Perlindungan terhadap Masyarakat								
21	Persentase Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	79,45	83,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul								
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia								
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,59	67,31	67,46	70,56	104,60%	67,46	104,60%
Sasaran 14 : Meningkatkan Derajat Pendidikan								
22	Indeks Pendidikan	56,72	57,71	55,30	58,20	105,24%	55,3	105,24%
Sasaran 15 : Meningkatkan Derajat Kesehatan								
23	Indeks Kesehatan	72,14	72,75	73,33	73,23	99,86%	73,33	99,86%
Sasaran 16 : Meningkatkan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda								
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,75	91,10	92,01	91,01*	98,91%	92,01	98,91%
25	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Nindya	Madya	85,71%	Nindya	85,71%
26	Status Kabupaten Layak Pemuda	-	-	Madya	Pratama	50%	Madya	50%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2024 dan Perangkat Daerah terkait

C. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 (Mengungkapkan analisis pencapaian kinerja antara perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya, realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level setara /provinsi/nasional)

#### 1. CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI DAN BERKUALITAS

Kinerja Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 5 (lima) Sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

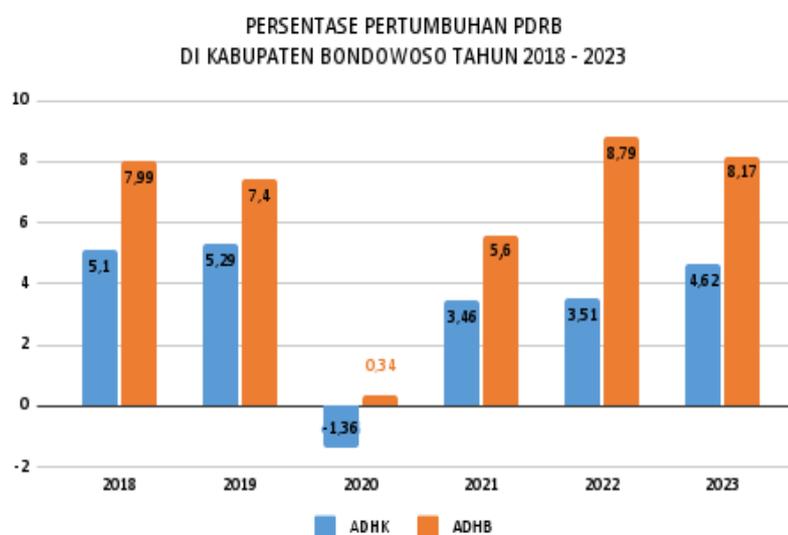
Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro

Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Upaya Kabupaten Bondowoso dalam pemulihan ekonomi pada Tahun 2023 dengan berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi dan sinergitas penanganan pandemi terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun masih perlu didorong untuk dapat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten sekitar.

**Diagram 2 . 1**



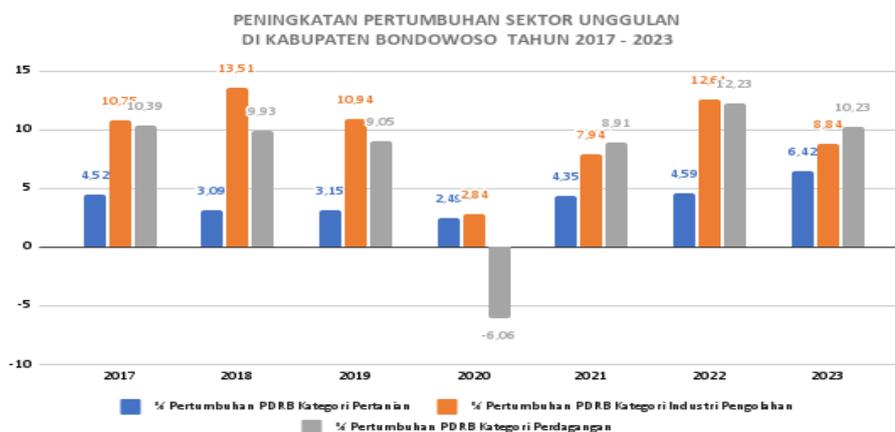
**Tabel 2. 18**  
**Capaian Kinerja Tujuan**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**  
**Yang Tinggi Dan Berkualitas Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan								
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas								
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK)	3,49%	3,51%	4%	4,62%	115,50%	4,00%	115,50%
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB)	5,19%	8,79%	5,05%	8,17%	161,78%	5,05%	161,78%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHK)	-	18,38	17,74	19	107,82%	17,74	107,82%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHB)	-	29,22	27,49	31	114,33%	27,49	114,33%
	Indeks Gini	0,334	0,365	0,28	0,350	75,00%	0,28	75%
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan								

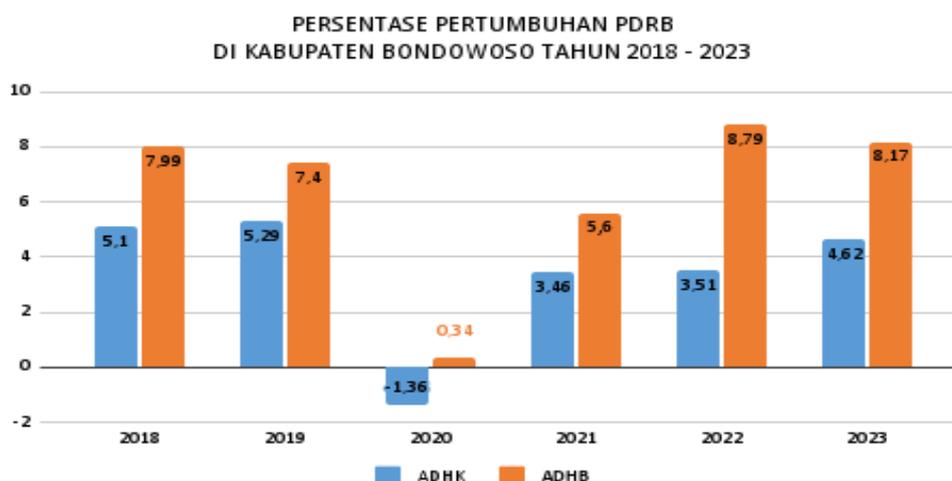
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	4,35%	4,59%	2,97%	6,42%	216,16%	2,97%	216%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,94%	12,61%	3,40%	8,84%	260,00%	3,40%	260%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	8,91%	12,23%	7,00%	10,23%	146,14%	7,00%	146%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata								
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	0,99%	1,06%	1,24%	1,11%	89,52%	1,24%	90%
Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro								
5	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	1,05%	0,05%	0,06%	0,06%	95,00%	0,06%	95,00%
Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah								
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	198,54%	-0,78%	12%	203,66%	1697,17%	12,00%	1697,17%
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi								
7	Rasio panjang jalan baik dengan jumlah penduduk	-	1,25	1,2	1,13	94,17%	1,2	94,17%
8	Rasio Jaringan Irigasi	-	0,019	0,020	0,019	95,00%	0,02	95,00%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 2.97% tercapai 6,42% atau tercapai 216,16% dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2023 ini masih menyumbang 216% dari target akhir RPJMD Tahun 2024.

**Diagram 2 . 2**



**Diagram 2.3**



Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan income tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total income seluruh penduduk.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi  
Yang Tinggi Dan Berkualitas Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif								
Tujuan 2 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,39	68,97	67,48	66,76	98,93%	67,48	98,93%
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan								
9	Indeks Kualitas Air	50,00%	55,33	53,59	48,46	90,43%	53,59	90,43%
10	Indeks Kualitas Udara	85,33%	86,70	83,06	86,75	104,44%	83,06	104,44%
11	Indeks Tutupan Lahan	59,49%	59,57	62,54	61,21	97,87%	62,54	97,87%
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman								
12	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,75%	0,33%	0,33	0,18	145,45%	0,00%	-4.300%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 2.97% tercapai 6.42% atau tercapai 216.16% dengan kategori memuaskan.

**Tabel 2. 20**  
**Hasil Pertanian**

No	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi	Luas Panen	99.086	88.166	73.677	74.594	79.985	Ha
		Produktivitas	6,152	6,154	6,155	6.172	6,175	Ton/ha
		Produksi	609.578	542.574	453.503	460.425	493.879	Ton
2	Jagung	Luas Panen	26.807	32.766	36.009	36.095	34353	Ha
		Produksi	140.604	172.054	172.054	193.106	174.807	Ton
		Produktivitas	5,245	5,251	5,273	5.350	5,36	Ton/ha
3	Kedelai	Luas Panen	138	52	21	22	94	Ha
		Produksi	207	78	32	32	62	Ton
		Produktivitas	1,502	1,509	1,510	1.504	1,58	Ton/ha

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Untuk produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan indikator capaian produktivitas mencapai target, hal ini dikarenakan sumber daya pertanian yang mendukung yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Modal, Manusia, dan teknologi yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terus ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan sumberdaya dapat efisien, dan produktivitas dapat meningkatkan.

Produktivitas padi terealisasi 6,18 ton/Ha (100,08%). Pencapaian produktivitas padi dan jagung mencapai target karena didukung dengan adanya dukungan teknis dari pengadaan bantuan benih unggul bermutu dan berkualitas, bantuan alat mesin pertanian, bantuan jaringan irigasi, serta pembinaan dan pendampingan dalam penerapan teknologi tepat guna yang menerapkan Good Agriculture Practice (GAP). Bantuan benih unggul yang diberikan pada petani merupakan dukungan dari Anggaran Pemerintah Pusat Dirjen Tanaman Pangan

dan TP Provinsi Jawa Timur dengan memberikan bantuan berupa BLBU Padi IP 400 seluas 1.1525 Ha, BLBU Padi Biofortifikasi 3.000 Ha, BLBU padi inbrida (Gernas ) 3.500 Ha, BLBU padi lahan kering 250 Ha, dan BLBU padi Inbrida 3.000 Ha serta pendampingan dari penyuluh pertanian setempat.

Selain itu sumber daya pertanian yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas tersebut diantaranya Sumber Daya Alam (SDA), Modal, Manusia, dan teknologi yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terus ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan sumberdaya dapat efisien, dan produktivitas dapat meningkat.

Produktivitas jagung 5,36 ton/ha (103,28%). Pencapaian produktivitas jagung mencapai target karena didukung dengan adanya dukungan teknis dari pengadaan bantuan benih unggul bermutu dan berkualitas, bantuan alat mesin pertanian, bantuan jaringan irigasi, serta pembinaan dan pendampingan dalam penerapan teknologi tepat guna yang menerapkan Good Agriculture Practice (GAP). Untuk Bantuan benih unggul jagung yang diberikan pada petani merupakan dukungan dari Anggaran Pemerintah Pusat Dirjen Tanaman Pangan berupa BLBU Jagung seluas 5.672 Ha.

Pada Kedelai produktivitas terealisasi sebesar 1,58 ton/Ha (103,95%),target ini tercapai karena petani melakukan budidaya sesuai penerapan teknologi tepat guna

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Bantuan untuk Tanaman Pangan, Holtikultura dan Kopi dropping bantuan tidak tepat waktu
2. Terjadinya anomali cuaca

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Menyesuaikan dengan dropping dan menyiapkan lahan untuk tanam.
2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang penggunaan varietas yang sesuai dengan keadaan cuaca, Penerapan Praktik Pertanian Berkelanjutan: Praktik pertanian berkelanjutan seperti konservasi tanah dan air, rotasi tanaman, serta penggunaan pupuk organik dapat membantu

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) Kategori Pertanian, didukung oleh 4 program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan , yaitu terdiri dari :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program penyuluhan pertanian
4. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner

Di Kabupaten Bondowoso sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar ketiga yang memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Bondowoso. Industri pengolahan non migas mencatatkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023. Ini menandakan aktivitas di sektor industri masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Nilai PDRB ADHB Kategori Industri Pengolahan merupakan salah satu indikator tujuan dari meningkatnya pertumbuhan sektor industri . Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 3.567,46 milyar rupiah Sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 6.366 milyar.

Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan PDRB ADHB kategori industri pengolahan dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 3,40% tercapai 8,84% atau tercapai sebesar 260,00% dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2023 ini menyumbangkan 260% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Masih banyak produk Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso yang perlu ditingkatkan kualitasnya serta dipenuhi syarat-syarat standar produksi dan pemasarannya.

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Diselenggarakan pengembangan Sentra Industri Kecil dengan fokus

kegiatan pada pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi dan pemberian stimulan sarana produksi

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) Kategori Industri Pengolahan, didukung oleh 1 program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Pembangunan Industri

Peningkatan ekonomi juga terjadi di Kabupaten Bondowoso dimana realisasi Nilai PDRB ADHB Kategori Perdagangan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4.510,42 milyar rupiah dari realisasi pada tahun 2022 sebesar 2.330,19 milyar rupiah.

Sedangkan kinerja utama presentasi pertumbuhan PDRB kategori perdagangan dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 7,00% tercapai 10,23% atau tercapai 146,14 % dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2023 ini masih menyumbang 146% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB) kategori perdagangan, didukung oleh 4 program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu terdiri dari :

1. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2. Peningkatan sarana distribusi perdagangan
3. Pengembangan ekspor
4. Standarisasi dan perlindungan konsumen

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dengan indikator kinerja utama persentase kontribusi kategori pariwisata terhadap PDRB dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 1,24% terealisasi sebesar 1,11 % atau dengan capaian kinerja sebesar 89,52 %, bila dibanding dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 90% dengan kategori sangat berhasil, maka Tahun 2023 kontribusi pariwisata terhadap PDRB mengalami kenaikan sebesar 1,24% dari target RPJMD. Namun bila capaian realisasi dibandingkan dengan tahun 2021, Tahun 2022 cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan, yaitu masih tetap di angka 0,90%. hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid-19. Sektor pariwisata merupakan sektor

yang terkena dampak secara langsung dari pandemi covid 19 yaitu menurunnya jumlah kunjungan wisata dan pemanfaatan hotel serta restoran.

Peningkatan kunjungan wisatawan adanya brand Kabupaten Bondowoso Ijen Geopark menjadi Ijen Unesco Global Geopark, memberikan ruang tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi, dimana keunikan Kabupaten Bondowoso yang memiliki banyak potensi wisata baik alam, sejarah, sosial budaya, dan religi perlu direncanakan secara berkelanjutan, dan di dukung dengan kemitraan baik dengan stakeholder terkait maupun dengan pelaku usaha pariwisata. Kekayaan alam Bondowoso yang patut untuk dibanggakan dan pengelolaan pariwisata yang baik menjadikan Bondowoso memiliki julukan highland paradise. Adapun Ijen Geopark Wilayah Bondowoso adalah sebagai berikut :

**Gambar 2. 1**  
**Ijen Geopark Kawah Ijen**  
**Wilayah Bondowoso**



**Gambar 2. 2**  
**Kawah Wurung**



**Gambar 2. 3**  
**Biosite Kopi Kluncing**



**Gambar 2. 4**  
**Geosite Black Lava Plalangan**



Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB dari kategori Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, didukung oleh 3 program pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, yaitu terdiri dari :

1. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

Permasalahan pada aspek pariwisata yang penting untuk ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Munculnya brand Kabupaten Bondowoso Ijen Geopark Unesco Global Geopark yang masih memerlukan dukungan kuat dari stakeholder terkait
2. masih kurangnya infrastruktur dasar pariwisata
3. masih kurangnya Visibilitas dan amenities Pariwisata
4. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata
5. Rendahnya kualitas SDM pariwisata yang berkompeten
6. masih rendahnya kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata di destinasi wisata
7. belum optimalnya paket wisata
8. belum ada inovasi pembelian tiket wisata secara online

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

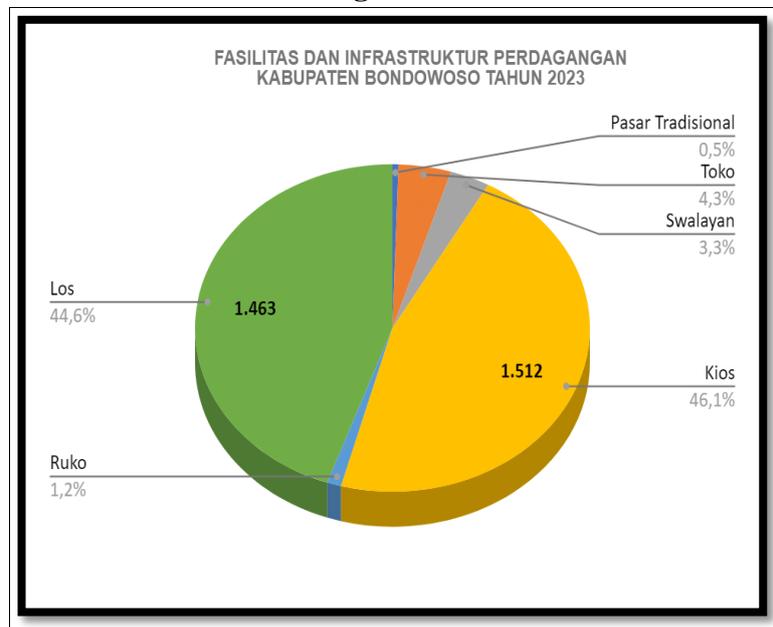
1. Penguatan citra dan daya saing pariwisata secara internasional melalui City Branding Ijen Geopark perlu dipromosikan secara terintegrasi dan didukung oleh seluruh stakeholder terkait dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi kabupaten Bondowoso sektor pariwisata.
2. meningkatkan infrastruktur dasar pariwisata melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di daerah menuju destinasi wisata
3. meningkatkan visibilitas dan amenities Pariwisata

4. meningkatkan promosi Pariwisata dengan menggunakan media elektronik maupun media massa berbasis online dan offline
5. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang berkompeten
6. meningkatkan kemitraan dengan para pelaku usaha pariwisata
7. Perlu dibuat paket wisata yang menarik agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
8. perlu dilakukan inovasi pembelian tiket secara online

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya usaha skala mikro dengan indikator kinerja utama persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,06% tercapai 0,06% atau tercapai 95% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 0,06 % dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada UMKM, seperti dukungan pembiayaan KUR, BPUM, dan Subsidi Bunga Non KUR guna memastikan UMKM dapat naik kelas. Realisasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil pada tahun 2023 adalah sebesar 0.057% artinya dari 40.212 usaha mikro ada 23 unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

**Diagram 2 . 4**



Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Skala Mikro

didukung dengan 6 (enam) program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

1. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Pengembangan UMKM

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

Sebagian besar Usaha Mikro belum bisa untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri dari segi kelembagaan, SDM pelaku usaha serta permodalan dan juga kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dunia usaha yang berkembang sangat cepat

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

Peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui : penguatan kelembagaan, pendataan UM, fasilitasi kemitraan, fasilitasi akses permodalan, pemasaran, kemudahan perizinan serta pelatihan-pelatihan ketrampilan SDM pelaku usaha dan Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pemberian dukungan sarana prasarana usaha

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan investasi daerah dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 12% terealisasi 203,66% atau tercapai 1697,17% dengan kategori memuaskan.

Nilai investasi Kabupaten Bondowoso tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah Rp 3.540.332.830.002,- atau sebesar 203,66% dibandingkan tahun 2022. Realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 5.278.663.378.114,- dengan jumlah NIB yang terbit sebanyak 5.989 NIB sedangkan tahun 2022 nilai investasi sebesar Rp 1.738.330.548.112,- dengan jumlah NIB yang terbit sebanyak 6.620 NIB.

Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam prosedur pengurusan perizinan.

Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis resiko yaitu aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang berlaku secara nasional. Dengan sistem ini pelaku usaha dapat melakukan permohonan setiap waktu, dimana saja selama internet tersedia, serta dapat diterbitkan secara realtime. Sedangkan untuk perizinan non usaha dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online (SIAPO).

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, maka pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso memiliki inovasi SIJEMPOL (Sistem Ijin Jemput Bola Secara Mobile), dimana petugas pelayanan perizinan mendatangi tempat-tempat strategis (pasar, alun-alun, pusat pertokoan, dll) untuk melayani pemohon yang akan mengurus perizinan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah didukung dengan 3 (tiga) program pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bondowoso
2. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM.

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada investor

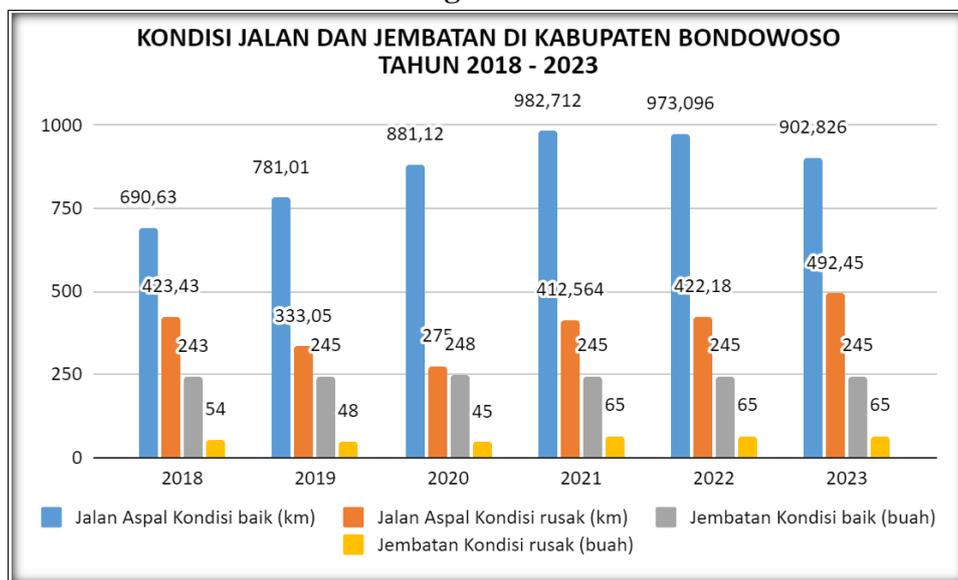
2. Mengadakan sosialisasi serta pendampingan dalam penyampaian LKPM

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dengan indikator kinerja Rasio Panjang jalan baik dengan jumlah penduduk dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 1,2% tercapai 1,13% atau tercapai 94,17% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbang 94,17% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Sedangkan indikator kinerja rasio jaringan irigasi dengan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,020% atau tercapai 0,019% atau tercapai 95,00% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbang 95,00% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

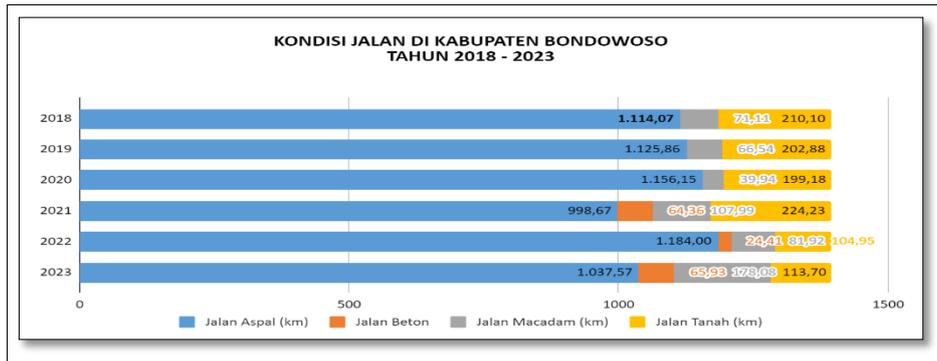
Kondisi jalan dan jembatan sebagai sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

**Diagram 2 . 5**



Sumber : Dinas BSBK, Tahun 2024

**Diagram 2 . 6**  
**Kondisi Jalan dan Jembatan**



Sumber : Dinas BSBK, Tahun 2024

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja Utama Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, didukung 4 program pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Program penyelenggaraan jalan belum mencapai target kinerja yang direncanakan karena beberapa lokasi tidak terlaksana dan beberapa lokasi masuk dalam KDP
2. Presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik tidak mencapai, targer dikarenakan laju kerusakan lebih tinggi dari pada penanganan kerusakan yang dilaksanakan
3. Peralatan Berat sebagai penunjang kinerja melebihi masa umur ekonomisnya
4. Belum meratanya Sumber Daya Manusia
5. Anomali iklim menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi di satu titik tertentu yang berdampak pada terjadinya bencana alam (longsor, banjir, angin puting beling)

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke**

**depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Melakukan penganggaran kembali pada Tahun 2024
  2. Meningkatkan pemeliharaan untuk menekan laju kerusakan
  3. Peremajaan secara bertahap dan optimalisasi peralatan yang ada saat ini.
  4. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso secara rutin .
  5. Melakukan penyiapan perencanaan konstruksi bangunan pengendali banjir dan bekerja sama dengan OPD lain dan Pihak ketiga dalam upaya meminimalisir kerugian akibat bencana.
2. CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2 TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Tujuan Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu:

1. Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan
2. Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 menunjukkan angka 66,76 dengan capaian kinerja sebesar 98,93% kategori capaian kinerja sangat berhasil.

**Tabel 2. 21**  
**Capaian Kinerja Tujuan**  
**Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif								
Tujuan 2 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,39	68,97	67,48	66,76	98,93%	67,48	98,93%
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan								
9	Indeks Kualitas Air	50,00%	55,33	53,59	48,46	90,43%	53,59	90,43%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
10	Indeks Kualitas Udara	85,33%	86,70	83,06	86,75	104,44%	83,06	104,44%
11	Indeks Tutupan Lahan	59,49%	59,57	62,54	61,21	97,87%	62,54	97,87%
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman								
12	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,75%	0,33%	0,33	0,18	145,45%	0,00%	-4300%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator kinerja utama indeks kualitas air dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 53,59 tercapai 48,46 atau tercapai 90,43% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 90,43% dari target akhir RPJMD Tahun 2024. Indikator kinerja utama indeks kualitas udara dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 83,06 tercapai 86,75 atau tercapai sebesar 104,44% dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 104,44% dari target akhir RPJMD Tahun 2024. Sedangkan Indikator kinerja utama indeks kualitas tutupan lahan dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 61,62 tercapai 59,57 atau tercapai sebesar 96,67% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2022 ini telah menyumbangkan 95,25% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Perhitungan IKLH merupakan komposit dari komponen IKA, IKU dan IKL. Capaian IKLH Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 68,97 menjadi 66,76. Realisasi target indikator IKLH pada tahun ini mencapai 98,93%. Dengan hasil capaian IKLH tersebut kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bondowoso masih tergolong nilai kategori "Sedang".

### **Perhitungan Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA dihitung berdasarkan penghitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH. Baku mutu air yang digunakan adalah baku mutu air sungai dan sejenisnya kelas III (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran

VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan 8 (delapan) parameter untuk kualitas air sungai yang dihitung, yaitu BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH dan Nitrat. Hasil perhitungan IKA Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar 48,46 sehingga capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas air sebesar 86,99% dan masuk dalam kategori "Kurang".

Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Berdasarkan nilai Pij, dapat dikategorikan tingkat pencemarannya.

**Tabel 2. 22**  
**Kategori Tingkat Pencemaran**

N0	Nilai Pij	Keterangan
1	$0,0 < Pij < 1,0$	Memenuhi Baku Mutu
2	$1,0 < Pij < 5,0$	Tercemar Ringan
3	$5,0 < Pij < 10,0$	Tercemar Sedang
4	$Pij > 10$	Tercemar Berat

Dari hasil perhitungan IKA dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 yaitu 48,46 dengan kategori “Sangat Berhasil”. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKA Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,33. Capaian ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai target dengan capaian sebesar 90,43%.

### **Perhitungan Indeks Kualitas Udara**

Kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan. Salah satu komponen lingkungan hidup tersebut adalah udara. Kualitas udara berhubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu udara perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal.

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara

diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Data yang digunakan untuk perhitungan IKU adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual passive yang dilakukan oleh KLHK bekerjasama dengan daerah. Metode Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung menggunakan data pemantauan udara ambien rata-rata tahunan dengan parameter pencemar SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (sumber: IKLH Indonesia, 2014).

Adapun rumus perhitungan IKU sebagai berikut:

$$IKU = 100 - ((50/0.9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$$

Ieu = rata-rata (SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref EU (20 µg/m<sup>3</sup>), dan NO<sub>2</sub> hasil pemantaun dibagi baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref EU (40 µg/m<sup>3</sup>)).

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili kawasan industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. IKU dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama 2 (dua) periode. Nilai IKU Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 86,70 di Tahun 2022 dan 86,75 di Tahun 2023. Hasil capaian realisasi IKU sebesar 103,25% dari indeks yang ditargetkan 84,02 dengan nilai kategori "Baik".

Dari hasil perhitungan IKU dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2023 yaitu 104.44% dengan target sebesar 83,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara adalah "Memuaskan". Pada Tahun 2023 Indeks Kualitas Udara sebesar 86,75 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,70. Nilai tersebut sudah melebihi target akhir RPJMD di tahun 2023 yaitu 83,06. Hasil capaian IKU Kota Bondowoso terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,44%.

### **Perhitungan Indeks Kualitas Lahan**

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas

Ekosistem Gambut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lokasi pemantauan Kualitas Tutupan Lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain sedangkan lokasi pemantauan Kualitas Ekosistem Gambut meliputi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKL meliputi: Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH), belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati (TK koefisien nilai 0,6 untuk tutupan di luar hutan. koefisien masing-masing Provinsi untuk nilai IKL Nasional. Perhitungan IKL menggunakan aplikasi IKLH dari KLHK yang dalam penginputannya dibagi sesuai kewenangannya. Perhitungan luas tutupan vegetasi dalam kawasan hutan (hutan dan belukar) menjadi kewenangan pusat untuk input datanya. Sedangkan Provinsi dan Kabupaten menghitung/menginput luas tutupan vegetasi di luar kawasan hutan (RTH, Taman Kehati Kebun Raya). Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 hanya mencapai 94,26% dari nilai indeks yang ditargetkan, yaitu 64,94. Dibanding tahun sebelumnya, nilai IKL cukup mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2022 Nilai IKL Kabupaten Bondowoso sebesar 59,57.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar 61,21 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 59,57 dengan capaian kinerja sebesar 97,87% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan didukung dengan 4 (empat) program pada Dinas Lingkungan Hidup yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
6. Program pengelolaan Persampahan.

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Nilai capaian IKLH sangat tergantung pada ketersediaan data-data pendukung perhitungan dari setiap komponennya baik IKA, IKU dan IKL. IKA dan IKU memerlukan lebih banyak data dan penentuan titik lokasi pemantauan yang representatif wilayah Kabupaten. sedangkan IKL lebih dituntut pada tingkat kepiawaian SDM yang menangani dalam membaca dan membentuk data dari citra satelit menjadi data perhitungan yang diharapkan
2. Dari 10 data hasil pemantauan 5 titik lokasi sampling air sungai Sampean beberapa parameter memang masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Ditambah ada kesalahan teknis memasukan data dari 4 data propinsi yang masuk ke perhitungan data IKA Kabupaten Bondowoso. Koordinasi lebih lanjut terkait penginputan data dengan propinsi sudah dilakukan.;
3. Sebaran lokasi sampling masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten, relatif masih terkonsentrasi di pusat kota
4. Nilai Indeks Kualitas Lahan yang dicapai masuk dalam kategori "Sedang", namun hasil capaian Indeks Kualitas Lahan masih kurang dari target yang ditetapkan

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Menambah jumlah titik pantau dan meningkatkan kualitas SDM agar lebih lihai dalam mengolah data menjadi nilai indeks yang diharapkan

2. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perijinan, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik .
3. Menyiapkan anggaran APBD untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara, melakukan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar, Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara.
4. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan, merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman pada area berfungsi lindung untuk mempertahankan serta meningkatkan luas belukar pada fungsi lindung, Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya yang telah ada, perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan, perlu meningkatkan upaya publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan indikator kinerja persentase lingkungan permukiman kumuh dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,33% tercapai 0,18% atau tercapai 145,45% dengan kategori memuaskan.

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh dilaksanakan melalui program kawasan permukiman dan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha dan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dengan total realisasi sebesar Rp. 4.863.088.500 dan capaian realisasi sebesar 95,48% ditahun 2023

Perkembangan luasan kawasan kumuh dipicu dengan pesatnya penambahan penduduk di kawasan perkotaan sehingga kawasan permukiman menjadi kumuh dan kotor. Dengan adanya program Kawasan Permukiman dan

program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh akhirnya dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarpras kawasan permukiman seperti jalan lingkungan, MCK dan saluran drainase. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengurangan luasan kawasan kumuh yaitu 79,5 Ha dengan realisasi capaian kinerja 1,57 Ha sedangkan Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengurangan luasan kawasan kumuh yaitu 77,03 Ha dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 4 Ha.

Dari Pendataan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso terdapat 71.732 unit rumah tidak layak huni (data 2021). Dengan adanya program Kawasan Permukiman dan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang akhirnya dapat mengatasi permasalahan tersebut dan terjadi jumlah penurunan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) mejadi rumah layak huni (RLH) terjadi peningkatan yang signifikan. Penurunan jumlah RTLH tiap tahunnya kurang lebih 1.000 unit pertahunnya. sehingga pada tahun 2023 jumlah RTLH yang ditangani sebanyak 223 unit

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman didukung dengan 3 program pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta karya dan Tata Ruang yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2. Program Pembangunan Perumahan
3. Program Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Munculnya Kawasan kumuh baru di desa/kelurahan kawasan kecamatan;
2. Ketersediaan rumah layak huni terbatas;

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Memetakan kawasan kumuh dan merencanakan penanganannya;
2. Membagi perencanaan peningkatan kualitas kawasan agar segera tuntas;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat;

4. Fasilitasi pengembangan perumahan

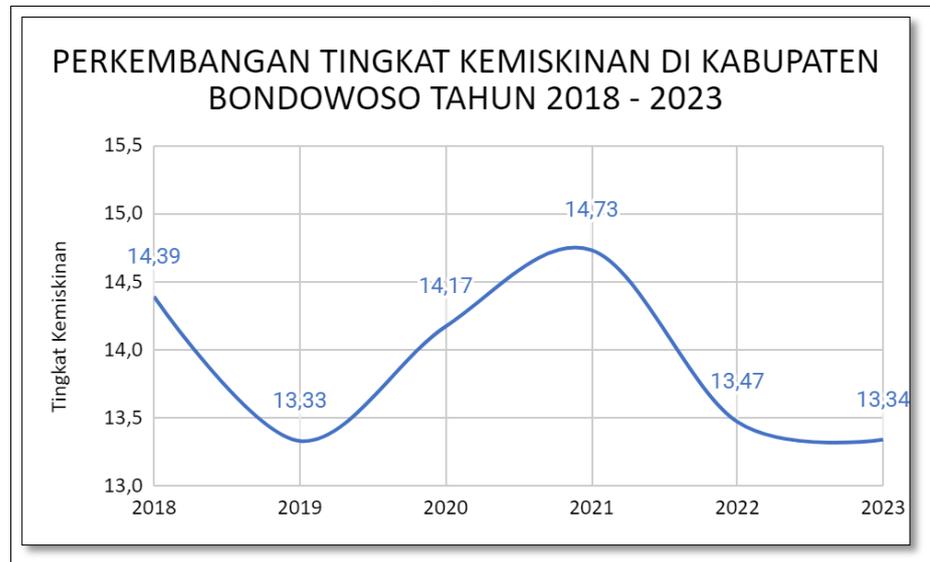
3. **CAPAIAN KINERJA TUJUAN 3 MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN**

Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Tingkat Kemiskinan. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu :

1. Sasaran 8 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
2. Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Sasaran 10 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menurunkan angka kemiskinan di Bondowoso cukup baik dengan tren yang terus menurun dan mampu kembali pada keadaan sebelum pandemic covid-19. Menekan angka laju kemiskinan adalah prioritas pada tahun 2023 dengan hasil menunjukkan angka 13,34% dengan capaian kinerja sebesar 97,38% kategori capaian kinerja sangat memuaskan.

**Diagram 2 . 7**



**Tabel 2. 23**  
**Capaian Kinerja Tujuan**  
**Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
<i>Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</i>								
<i>Tujuan 3 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan</i>								
	<i>Persentase Tingkat Kemiskinan</i>	14,73%	13,47%	13,00%	13,34%	97,38%	13,00 %	97,38 %
<i>Sasaran 8 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk</i>								
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,31%	0,37%	0,27%	0,37%	198,63%	0,58%	136,21%
<i>Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka</i>								
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,46%	4,32%	1,86%	4,15%	-23,12%	1,86%	-23,12 %
<i>Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat</i>								
15	Indeks Desa Membangun	0,7081	0,7251	0,7275	0,7377	101,40%	0,7275	100,40%

Capaian kinerja sasaran strategis terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja utama laju pertumbuhan penduduk dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,27% tercapai 0,37% atau tercapai 198,63% dengan kategori cukup berhasil. Salah satu kebijakan yang mendukung keberhasilan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Total Fertility Rate.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara umum faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non alami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten

Bondowoso telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat signifikan dari target sebesar 0,58 realisasi 0,37 sehingga capaian kinerja 136,21 persen. Hal - hal yang mendukung keberhasilan pencapaian tersebut diantaranya adalah menurunnya Angka TFR, Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB dan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga.

Prosentase usia perkawinan adalah perhitungan usia menikah pada perempuan dibawah 20 tahun. Pada tahun 2023 tercapai sebesar 36 persen atau telah terjadi 1960 pernikahan pada umur dibawah 20 tahun dari total perkawinan sebanyak 5049

Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih cenderung rendah. Realisasi sebesar 13,42 % atau sebesar 14.823 PUS yang menggunakan MKJP dari total PUS pengguna kontrasepsi modern sebesar 110.437

Unmetneed merupakan presentase wanita yang saat ini tidak menggunakan metode kontrasepsi dan tidak ingin anak lagi atau menunda kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Realisasi di Kabupaten Bondowoso sudah cukup rendah, hal ini berarti kualitas pelayanan KB sudah berjalan secara maksimal. Beberapa hal yang mendukung berhasilnya capaian tersebut adalah tingkat pengetahuan SDM masyarakat, dukungan suami dan keluarga serta kualitas pelayanan dan sosial budaya.

ASFR merupakan angka kelahiran tertentu di usia 15 - 19 tahun. di kabupaten Bondowoso capaiannya sudah cukup berhasil. Hal - hal yang mendukung diantaranya adalah faktor pendidikan dan pengetahuan wanita.

### **Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penggunaan KB MKJP harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju generasi emas di masa yang akan datang
2. Masih banyak pernikahan usia dibawah 20 tahun yang terjadi baik secara formal maupun non formal(sirri)
3. Masih banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik,kondom)

4. Masih ada beberapa masyarakat SDM rendah yang memberikan info negatif tentang pelayanan KB
5. Masih tingginya pernikahan di usia muda dapat menyebabkan meningkatnya angka ASFR 15 - 19

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

Advokasi dan KIE tentang Pendewasaan Usia perkawinan dengan usia ideal menikah untuk Perempuan 21 tahun dan laki - laki 25 tahun perlu terus digaungkan terutama dikalangan remaja. Juga Advokasi kepada PUS dan Akseptor KB untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang perlu terus ditingkatkan. Salah satu upaya dengan menjalin koordinasi

Capaian kinerja Sasaran Strategis Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk didukung dengan 1 program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator kinerja utama Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 1,86% tercapai 4,15% atau tercapai -23,12% Tingkat capaian kinerja TPT pada tahun 2023 sebesar -23,12% dengan kategori kurang berhasil.

Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena adanya pelaksanaan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan SDM / skill masyarakat, penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui media, kerjasama / MOU dengan perusahaan-perusahaan dalam / luar daerah, penyuluhan ketenagakerjaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta jaminan sosial tenaga kerja menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap di dunia kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 4,15% menurun dibanding Tahun 2022 sebesar 4,32%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indikator Kinerja Utama Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didukung dengan 3 program pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Penempatan Tenaga Kerja
3. Hubungan Industrial

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

Keterampilan/keahlian/kompetensi SDM pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

Peningkatan keterampilan / keahlian SDM pencari kerja melalui pelatihan kerja dan sesuai kebutuhan pasar kerja

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja utama Indeks Desa Membangun (IDM) dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,7275 terealisasi sebesar 0,7377 dengan capaian 101,40% termasuk kategori memuaskan, naik sebesar 0,0126 dibandingkan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,7251. Sedangkan capaian realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 101,40%.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berstatus Maju dimana terdapat 83 Desa Berkembang, 101 Desa Maju dan 25 Desa Mandiri lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 101 Desa Berkembang, 91 Desa Maju dan 17 Desa Mandiri. Capaian kinerja ini memuaskan tetapi perlu adanya peningkatan agar desa-desa dapat segera naik status dari Desa Berkembang ke Desa Maju serta dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Kabupaten Bondowoso terdiri dari 209 Desa dan 10 Kelurahan. Sebagian besar masyarakat Bondowoso tinggal di Desa begitu juga masyarakat miskin sebagian besar tinggal di desa, oleh karena itu peran Desa dalam pengentasan Kemiskinan menjadi sangat vital. Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan di

Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi (IKL). IDM bertujuan untuk :

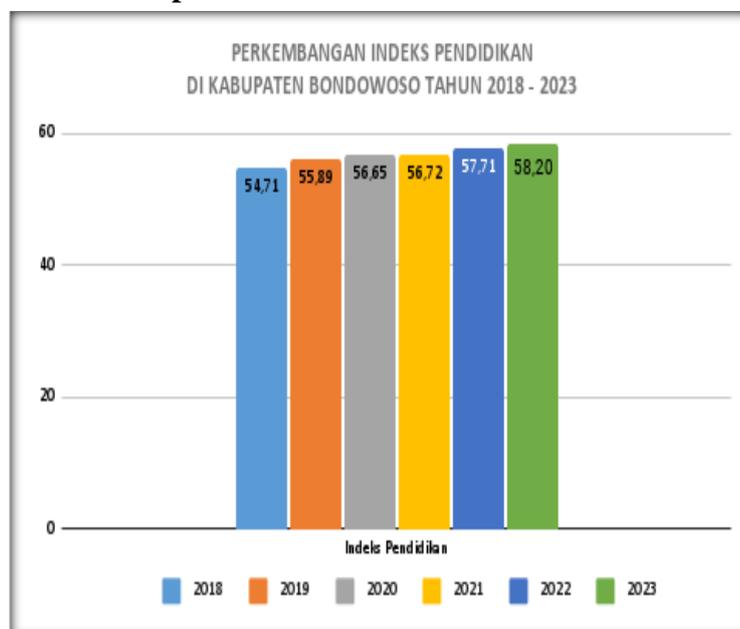
1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Nilai IDM Kabupaten Bondowoso merupakan rata-rata dari nilai IDM seluruh desa di Kabupaten Bondowoso. IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri, klasifikasi ini ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

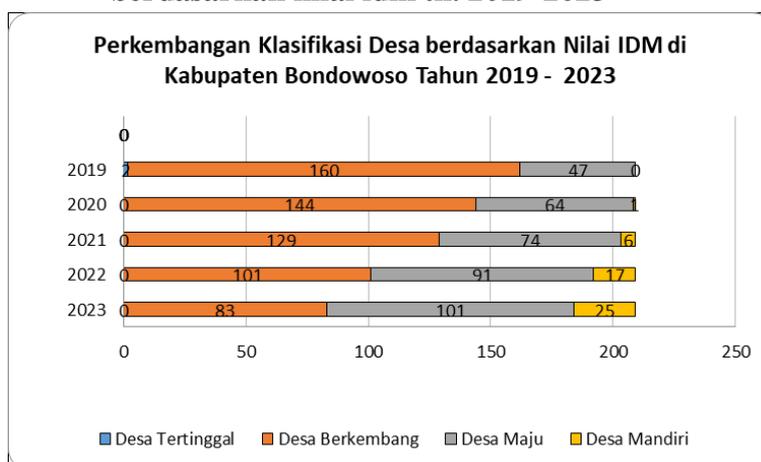
1. Desa Sangat Tertinggal :  $\leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $> 0,4907$  dan  $\leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $> 0,5989$  dan  $\leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $> 0,7072$  dan  $\leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $> 0,8155$

Berikut perkembangan nilai IDM Kabupaten Bondowoso tahun 2019-2023 :

**Diagram 2 . 8**  
**Perkembangan IDM**  
**Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 - 2023**



**Diagram 2 . 9**  
**Perkembangan klasifikasi desa**  
**berdasarkan nilai idm th. 2019-2023**



Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat sebesar 101,40% dengan kategori sangat memuaskan yang didukung dengan 5 program yaitu :

1. Program Administrasi Pemerintah Desa
2. Rehabilitasi Sosial
3. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
4. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Penanganan Kerawanan Pangan

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

Permasalahan dalam melaksanakan capaian kinerja tujuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai keberhasilan terkait capaian IDM yaitu masih banyak desa yang tidak mau status IDM-nya meningkat karena khawatir anggaran Dana Desa (DD) nya berkurang serta usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih fokus pada kegiatan fisik sehingga bidang lain pendukung IDM kurang optimal diintervensi.

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

Pembinaan kepada desa tentang adanya formula alokasi kinerja dalam penghitungan Dana Desa (DD) bagi desa yang status IDM-nya meningkat dan

menyarankan kepada desa agar mengundang tokoh dari berbagai unsur pada saat penyusunan perencanaan desa sehingga bisa disinergikan dengan intervensi IDM serta belum optimalnya peran PD dan PLD dalam fasilitasi update status IDM.

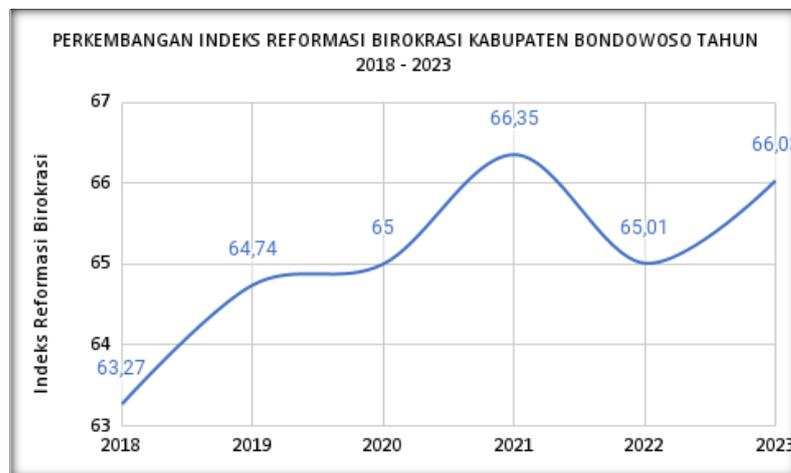
4. CAPAIAN KINERJA TUJUAN 4 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kinerja Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 1(satu) Sasaran yaitu:

1. Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kinerja tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tercapai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 sebesar 66,03 naik jika dibandingkan capaian Tahun 2022 yang nilainya 65,01. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso mengalami pasang surut dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso masih relative baik.

**Diagram 2 . 10**



Kinerja Tujuan Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Potensi Konflik Sosial yg ditangani. Pencapaian Tujuan tersebut

didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Sasaran 12 : Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
2. Sasaran 13 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat

**Tabel 2. 24**  
**Capaian Kinerja Tujuan**  
**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**  
**dan Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban**  
**Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat								
Tujuan 3 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan								
	Persentase Tingkat Kemiskinan	14,73%	13,47%	13,00%	13,34%	97,38%	13,00%	97,38%
Sasaran 8 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk								
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,31%	0,37%	0,27	0,37%	198,63%	0,58%	136,21%
Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka								
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,46%	4,32%	1,86%	4,15%	-23,12%	1,86%	-23,12%
Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat								
15	Indeks Desa Membangun	0,7081	0,7251	0,7275	0,7377	101,40%	0,7275	101,40%
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif								
Tujuan 4a : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik								
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,35)	B (65,01)	68,00	66,30	97%	67,5	96,31%
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,78	81,06	80,50	86,79	107,81%	80,5	107,81%
17	Nilai SAKIP	BB (73,03)	BB (74,02)	A	BB	92,53%	A	92,53%
18	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
19	Nilai EKPPD	3,22	3,22	3,226	2,626	100%	3,22	100%
Tujuan 4b : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
	Persentase Potensi Konflik Sosial yg ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan								
20	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat								
21	Persentase Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	79,45	83,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 80,50 tercapai 86,79 atau tercapai 107,81% dengan kategori memuaskan. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 107,81% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia'.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik.

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai

tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan: (1) Perencanaan pembangunan semakin responsive sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) Belanja aparatur yang semakin proporsional; (4) Belanja publik yang semakin dominan; serta (5) Perumusan kebijakan publik semakin responsive sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif

Selama kurun waktu tiga tahun, penilaian SAKIP Kabupaten Bondowoso masih berada pada kategori BB dengan besaran nilai 73,03 pada tahun 2021, 74,02 pada tahun 2022 dan 74,77 pada tahun 2023. Tingkat capaian kinerja nilai SAKIP pada tahun 2023 mencapai 92,53% dengan kategori sangat berhasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,77 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi..

**Tabel 2. 25**  
**Data Nilai Hasil Evaluasi SAKIP**  
**Kabupaten Bondowoso 2019– 2023**

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai				Bobot	Nilai 2023
			2019	2020	2021	2022		
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,06	24,33	24.39	24.58	30	24.72
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,05	18,09	18.61	21.58	30	21.72
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,55	10,41	11.09	11.25	15	11.12
d.	Evaluasi Internal	10	7,45	7,30	8.06	16.79	25	17.21

e.	Capaian Kinerja	20	12,19	12,89	11.47			
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,30	73,03	73.62	74.2	100	74.77
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB		BB

Sumber : Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. Sedangkan dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah (LKD) pengelolaan anggaran tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingkat capaian kinerja penilaian Opini BPK pada tahun 2022 mencapai 100,00%. Persentase capaian indikator tersebut dengan kategori capaian kinerja memuaskan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah didukung dengan 8 program yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pendaftaran Penduduk
3. Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Aplikasi Informatika
5. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
6. Perekonomian dan Pembangunan
7. Penyelenggaraan Pengawasan
8. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**Permasalahan (terkait Nilai Opini BPK atas LKPD)**

1. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan belum optimal;
2. Tertib administrasi dan disiplin anggaran belum dilaksanakan secara optimal;
3. Belum terdatanya aset kabupaten secara valid;
4. Belum sempurnanya perhitungan asas manfaat penggunaan aset.

5. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di OPD belum optimal;

**Solusi Permasalahan (terkait Nilai Opini BPK atas LKPD)**

1. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan;
2. Menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK tahun sebelumnya;
3. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
5. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
6. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui aplikasi Sistem;
8. Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikembangkan BPKP.

**Permasalahan (terkait Nilai SAKIP)**

Dalam perolehan nilai SAKIP terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria perencanaan kinerja yang berkualitas, karena masih ditemukan indikator kinerja yang kurang relevan dan cukup untuk mengukur kinerja yang ditetapkan dan juga penetapan target kinerja yang ada belum semuanya menggambarkan progress perbaikan pencapaian kinerja;
2. Penjenjangan kinerja yang dimiliki di level pemerintah daerah dan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun berdasarkan kerangka berpikir logis dan hubungan antar level kinerja belum sepenuhnya berdasarkan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja;
3. Kinerja individu yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP) belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/perangkat daerah. hal ini dapat dilihat pada penyusunan matriks peran hasil yang menggambarkan hubungan kinerja individu dan kinerja organisasi/perangkat daerah tidak saling mempengaruhi.
4. laporan kinerja pada level pemerintah daerah yang tertuang pada LPPD belum sepenuhnya mengungkapkan analisis pencapaian kinerja,

khususnya terkait dengan upaya perbaikan kedepan yang digunakan sebagai masukan perbaikan perencanaan ke depan;

5. Pada sebagian laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan informasi pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara detail dan analisis yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran terkait dengan keberhasilan/kegagalan terhadap seluruh kinerja yang ditetapkan;
6. Pemanfaatan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Hal ini dikarenakan masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal.

#### **Solusi (terkait Nilai SAKIP)**

1. Mendorong perencanaan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026 untuk lebih berkualitas, yaitu dengan menetapkan indikator kinerja yang relevan dan cukup mengukur kinerja dan menetapkan target kinerja yang dapat memberikan gambaran progress perbaikan pencapaian kinerja tiap tahunnya;
2. Memastikan LPPD kedepannya untuk dapat mengungkapkan analisis pencapaian kinerja, khususnya terkait dengan upaya perbaikan kedepan yang digunakan sebagai masukan perbaikan perencanaan ke depan;
3. Memastikan kembali sebagian laporan kinerja perangkat daerah kedepannya untuk dapat mengungkapkan informasi pencapaian kinerja yang diperjanjikan secara detail sekaligus memberikan analisis terkait dengan keberhasilan/kegagalan terhadap seluruh kinerja yang ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan laporan tersebut berisi temuan dan rekomendasi yang detail dan langsung menjawab akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengimplementasian SAKIP;
5. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada perangkat daerah guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan perangkat daerah. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar suku,

agama, ras dan antar golongan dengan indikator kinerja utama persentase potensi konflik SARA yang ditangani dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% tercapai 100% dengan kategori memuaskan, tingkat capaian tetap dibandingkan capaian Tahun 2023. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Selama tahun 2023 dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Kabupaten Bondowoso, Badan kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa meredam kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif, namun demikian kewaspadaan diperlukan untuk menjaga situasi dengan dilakukannya pemantauan diwilayah Kabupaten Bondowoso, gesekan-gesekan antar golongan dan antar pendukung yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial dimasyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi di Wilayah Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan yang dapat menimbulkan konflik SARA di tahun 2023 yakni salah satunya adalah kejadian pada Toko Suzana, dimana kertas foto copy yang sudah tidak terpakai yang dibelakangnya ada tulisan arab ( Lafal Al Quran) oleh karyawan dari toko tersebut dipergunakan untuk Nota Pembelian. Untuk mencegah gejolak dari masyarakat Bakesbangpol bersama dengan FKUB dan Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap pemilik toko dan karyawannya. Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 9 Ayat 2 maka Peran FKUB sendiri dalam moderasi beragam untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hasil pemanggilan menurut keterangan karyawan toko tersebut tidak mengetahui kalau kertas tersebut ada lafal Al Quran dan tidak ada unsur kesengajaan hanya kelalaian, untuk pemeriksaan lebih lanjut diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Upaya pencegahan terhadap potensi konflik SARA melalui pendekatan kultural dan peningkatan pemahaman keagamaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, serta membina hubungan harmonis dan

menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah, sehingga tidak timbul konflik sosial maupun konflik SARA selama tahun 2019-2023.

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

Permasalahan yang masih diperkirakan muncul di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan isu SARA dan isu sosial perluantisipasi sedini mungkin. Misalnya :

1. Heterogennya masyarakat Kota Bondowoso sehingga rawan terjadi gesekan dimasyarakat yang dapat menyebabkan potensi konflik SARA
2. Adanya unjuk rasa yang dapat memicu konflik Sosial
3. Masih adanya Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini
4. Kerukunan dan toleransi masyarakat yang perlu ditingkatkan
5. Banyaknya ormas yang tidak aktif namun legalitas dari ormas tersebut banyak yang terlewat masa aktifnya atau kadaluarsa (Badan Hukum atau SKT) Sehingga legitimasinya meragukan

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Permasalahan isu SARA dan isu sosial perlu antisipasi sedini mungkin. Adapun upaya yang dilakukan dengan melalui dialog, pertemuan FKUB dan FPK, pemantauan dan pengamanan wilayah, sosialisasi maupun pembinaan sehingga tercipta suasana berwawasan kebangsaan demi menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa, Dilakukan Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Secara Kontinyu bersinergi dengan instansi terkait sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif dalam pelaksanaan ajang pesta Demokrasi;
2. Meningkatkan jalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menekan gesekan-gesekan yang berpotensi konflik
3. Melakukan Pemantauan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan diwilayah Kabupaten Bondowoso (Waspada adanya ATHG)
4. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah penggunaan narkoba dan pemberian sosialisasi
5. Meningkatkan toleransi, hormat – menghormati dan saling menghargai

- dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa
6. Melakukan himbuan kepada ormas supaya diaktifkan kembali legalitasnya dan diberdayakan agar apabila nanti ada bantuan dari pemerintah maka sudah siap, himbuan yang dilakukan dapat melalui pembinaan atau kunjungan ke kantor ormas

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dengan indikator kinerja utama persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir RPJMD Tahun 2023.

Perencanaan yang matang dan manajemen risiko merupakan ujung tombak dari keberhasilan kegiatan sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dari dukungan kegiatan dari APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Faktor-faktor yang berikut berkontribusi pada keberhasilan capaian kinerja BPBD Kabupaten Bondowoso tahun 2023 dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso:

1. Adanya peraturan perundang – undangan yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana di Kabupaten Bondowoso;
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan bencana;
4. Tersedianya peralatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bondowoso;
5. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat;
6. Peningkatan kompetensi Tim reaksi cepat;
7. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Capaian kinerja Sasaran Strategis meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dengan indikator kinerja utama persentase ketangguhan daerah

dalam menghadapi bencana didukung dengan 2 program yaitu :

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Penanggulangan Bencana

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi;
2. Masih rendahnya pemahaman serta peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam manajemen bencana yang berdampak terhadap rendahnya kesiapsiagaan pada saat pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana;
3. Luasnya Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bondowoso;  
d.Minimnya sarana dan prasarana kebencanaan dalam menunjang kinerja penanggulangan bencana;
4. Terjadinya perubahan rencana penanganan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung.

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. Optimalisasi program penanggulangan bencana sesuai penanganan kejadian bencana;
  2. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi korban bencana;
  3. Koordinasi yang baik antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan kejadian bencana agar tetap dalam kondisi baik;
  4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator kinerja
5. CAPAIAN KINERJA TUJUAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) Sasaran yaitu :

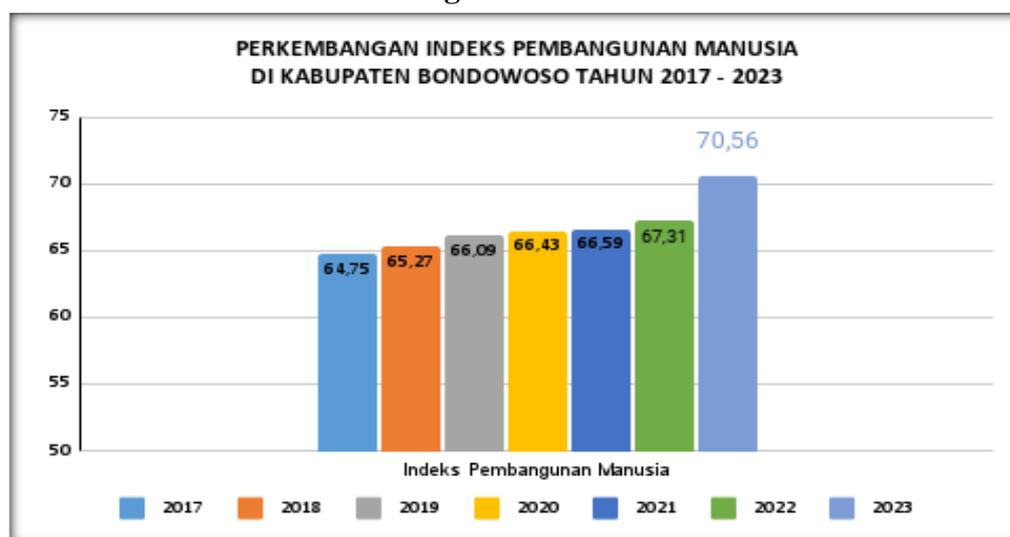
1. Sasaran 14 : Meningkatnya Derajat Pendidikan
2. Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Sasaran16 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan

Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak

IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 66,59% pada tahun 2021, tahun 2022 mencapai 67,31%, dan tahun 2023 mencapai 70,56%. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup. Pandemi covid-19 tidak menghambat peningkatan kinerja IPM di Kabupaten Bondowoso.

**Diagram 2 . 11**



**Tabel 2. 26**

**Capaian Kinerja Tujuan**

**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul								
Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia								
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,59	67,31	67,46	70,56	104,60%	67,46	104,60%
Sasaran 14 : Meningkatnya Derajat Pendidikan								
22	Indeks Pendidikan	56,72	57,71	55,30	58,20	105,24%	55,3	105,24%
Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Kesehatan								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET/CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
23	Indeks Kesehatan	72,14	72,75	73,33	73,23	99,86%	73,33	99,86%
Sasaran 16 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda								
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,75	91,10	92,01	91,01*	98,91%	92,01	98,91%
25	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Nindya	Madya	100%	Nindya	85,71%
26	Status Kabupaten Layak Pemuda	-	-	Madya	Pratama	50%	Madya	50%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator kinerja utama indeks pendidikan dari target dari target 55.15% terealisasi sebesar 57.71% atau tercapai 104.64%, sedangkan untuk tahun 2023 dari target 55.30% terealisasi sebesar 58.20% atau tercapai 105.24% dengan kategori memuaskan, atau naik sebesar 2.90% dibandingkan dengan tahun 2022 dan telah menyumbangkan 105.24% dari target akhir RPJMD tahun 2023.

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai komponen Indeks Pendidikan di kota/kabupaten di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan dengan indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar indeks pendidikan dapat meningkat di masa yang akan datang. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso berpedoman pada RPJMD kabupaten bondowoso tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Bondowoso. Dinas Pendidikan sendiri masuk dalam Misi Ke-5 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dengan sasaran kerjanya Meningkatkan Derajat Pendidikan dengan indikator kinerja utamanya adalah Capaian Indeks Pendidikan. Pasca berakhirnya covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 maka masyarakat sudah dapat beraktifitas normal seperti sedia kala. Capaian Indeks Pendidikan sendiri didukung oleh dua indikator yaitu Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah dan

Indeks Harapan Lama Sekolah. Angka Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-rata lama sekolah tahun 2022 dari target 5.60 tahun terealisasi sebesar 6.22 tahun atau sebesar 111.07%, sedangkan tahun 2023 dari target 5.61 tahun terealisasi sebesar 6.38 tahun atau sebesar 113.93% serta meningkat sebesar 0.16 digit. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang menamatkan sekolahnya.

**Diagram 2 . 12**  
**Perkembangan Indeks Pendidikan**



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Indeks Pendidikan adalah salah satu indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung peningkatan indeks pendidikan.

Perkembangan indeks pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya pendidikan. Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah populasi yang di gunakan adalah penduduk usia 25 tahun ke atas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun keatas masih dalam proses sekolah. indikator ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah diidentifikasi sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

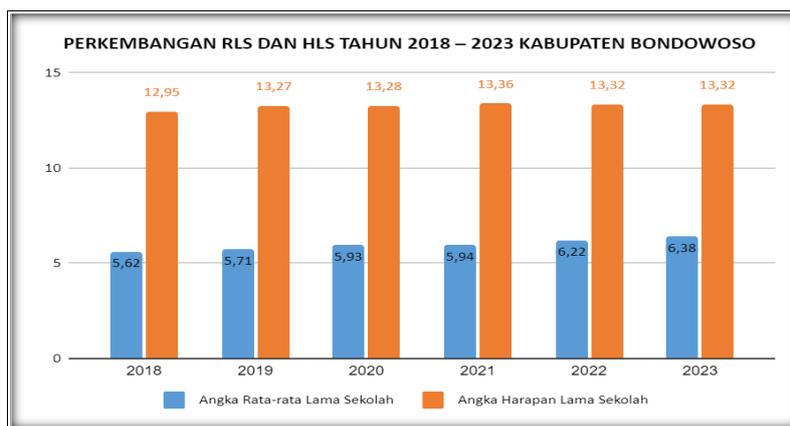
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian RLS tahun 2022 adalah dengan target sebesar 5,60 tahun, terealisasi sebesar 6,22 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,08. Sedangkan pada tahun 2023 dari target 5.61 tahun terealisasi sebesar 6.38 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah masih berada pada tingkat Sekolah Dasar. Rata-rata lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaian RLS, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta kondisi perekonomian mayoritas penduduk Kabupaten Bondowoso yang masih menengah ke bawah.

Capaian tersebut tidak lepas dari usaha dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendidikan. Intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah dilakukan melalui kegiatan peningkatan Akses dan layanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak yang tidak mampu dengan tujuan agar tidak mudah Drop Out (DO).

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. di Kabupaten Bondowoso sendiri, Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 5,5 tahun meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar 6,22 tahun. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang menamatkan sekolah. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah propinsi dan nasional, Kabupaten bondowoso mempunyai tingkat pendidikan rendah yang ditamatkan oleh penduduk usia 25 tahun keatas Pada tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah :

Kabupaten Bondowoso	: 6,38 tahun
Propinsi Jawa Timur	: 8,03 tahun
Nasional	: 8,69 Tahun

**Diagram 2 . 13**  
**Rata –rata lama Sekolah**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2023 Kabupaten bondowoso jatuh pada angka 6,38 Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Bondowoso usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SD kelas V-VI.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana angka rata–rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Capaian RLS tahun 2023 adalah dengan target sebesar 5,61 tahun, terealisasi sebesar 6,38 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 113,73. Sedangkan pada tahun 2023 dari target 5.60 tahun terealisasi sebesar 6.22 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 111.07 persen. Untuk rata-rata lama sekolah penduduk Jawa imur pada tahun 2023 sudah mencapai 8,03 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini rata rata pendidikan penduduk Kabupaten Bondowoso adalah masih berada pada tingkat Sekolah Dasar. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaian RLS, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta kondisi perekonomian mayoritas penduduk Kabupaten Bondowoso yang masih menengah ke bawah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah melakukan kebijakan pengembangan pendidikan keaksaraan, kesetaraan dengan melaksanakan bimbingan dan orientasi teknis bagi tutor pendidikan keaksaraan dan terlaksananya ujian nasioal paket A, paket B, dan

Paket C dengan sasaran penduduk usia 25 – 45 tahun yang tidak pernah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 2023, dari target 11.000 warga belajar pada PKBM, capaian peserta pendidikan kesetaraan adalah 15.078 warga belajar yang terinci pada tabel berikut :

**Tabel 2. 27**  
**Capaian Peserta Pendidikan Kesetaraan**

No	Wilayah	Jumlah Peserta didik PKBM		
		Jml	L	P
1	Kec. Binakal	195	200	395
2	Kec. Bondowoso	626	434	1060
3	Kec. Botolinggo	526	637	1163
4	Kec. Cermee	435	363	798
5	Kec. Curahdami	210	178	388
6	Kec. Grujugan	541	628	1169
7	Kec. Ijen	102	67	169
8	Kec. Jambesari Darus Sholah	349	289	638
9	Kec. Klabang	124	59	183
10	Kec. Maesan	317	386	703
11	Kec. Pakem	309	288	597
12	Kec. Prajekan	288	338	626
13	Kec. Pujer	466	363	829
14	Kec. Sukosari	176	185	361
15	Kec. Sumber Wringin	718	776	1494
16	Kec. Taman Krocok	58	41	99
17	Kec. Tamanan	360	364	724
18	Kec. Tapen	346	324	670
19	Kec. Tegalampel	176	334	510
20	Kec. Tenggarang	57	95	152
21	Kec. Tlogosari	409	385	794
22	Kec. Wonosari	803	816	1619
23	Kec. Wringin	142	136	278
Total		7.733	7.686	15.419

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/052200> 315-12-2023.

Capaian tersebut tidak lepas dari usaha dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendidikan akan terus berusaha meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah sampai melampaui minimal sama dengan Angka Rata-Rata lama sekolah Tingkat Provinsi.

Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah sebesar 13,32 tahun, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 13.31 tahun. Capaian ini berada 0.06 dibawah harapan lama sekolah penduduk Jawa Timur yang pada tahun 2023 masih mencapai 13,37 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah masih berada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Untuk peningkatan Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Pendidikan selain “Bondowoso Ramah Anak Pendidikan Inklusi (Bondowoso RAPI)”, Dimana inovasi ini diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar bisa memperoleh pendidikan yang sama dengan anak normal, ada juga inovasi pendidikan berupa Gerakan Literasi Mengaji dimana trik ini untuk menarik siswa baik yg aktif maupun tidak aktif, dimana kita tau bahwa penduduk bondowoso mayoritas adalah umat islam dan yang terbaru inovasi Dinas Pendidikan adalah “Tajin Karak” yang telah memperoleh Top Inovasi Tingkat Kabupaten dan sedang berkopetisi di Tingkat Provinsi.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Dana Program Indonesia Pintar dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus di tanggung oleh orang tua siswa serta dapat mengurangi angka Droup Out (DO).

**Diagram 2 . 14**  
**Harapan lama Sekolah**



Disamping itu pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan untuk memenuhi kriteria 8 standart nasional pendidikan di tiap-tiap lembaga sekolah yang dapat di gambarkan antara lain melalui :

1. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang sekolah dasar

Angka Partisipasi Sekolah diukur dari jumlah penduduk usia 7-12 yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dimana penghitungannya tidak hanya di tingkat sekolah dasar saja melainkan apabila ada penduduk usia 12 tahun sudah sekolah di jenjang pendidikan menengah maka partisipasinya masuk pada usia 7-12 tahun

**Tabel 2. 28**  
**Sebaran Penduduk 7-12 Tahun yang Bersekolah**  
**Angka partisipasi Sekolah (aps) sd/mi/paket a Dinas Pendidikan**  
**Kab. Bondowoso Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun Jenjang SD/MI/Paket A			Jumlah penduduk usia 7- 12 tahun			Capaian kinerja (%)
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Binakal	656	608	1.264	663	679	1.342	94,16
2	Bondowoso	4.994	4.628	9.622	3.489	3.368	6.857	140,33
3	Botolinggo	1.161	1.008	2.169	1.235	1.156	2.391	90,7
4	Cermee	1.846	1.678	3.524	1.872	1.778	3.650	96,55
5	Curahdami	1.318	1.183	2.502	1.477	1.465	2.942	85,03
6	Grujugan	1.584	1.425	3.008	1.632	1.612	3.244	92,74
7	Ijen	508	457	965	511	467	978	98,67
8	Jambesari Ds	1.514	1.396	2.910	1.583	1.559	3.142	92,61
9	Klabang	624	612	1.236	672	664	1.336	92,53
10	Maesan	2.155	1.999	4.155	2.122	2.057	4.179	99,42
11	Pakem	877	793	1.669	902	861	1.763	94,69
12	Prajejan	1.042	937	1.979	1.000	968	1.968	100,55
13	Pujer	1.670	1.454	3.124	1.683	1.576	3.259	95,87
14	Sukosari	863	741	1.604	637	581	1.218	131,69
15	Sumber Wringin	1.182	1.118	2.300	1.401	1.409	2.810	81,86
16	Taman Krocok	512	508	1.020	630	652	1.282	79,56
17	Tamanan	1.787	1.594	3.381	1.735	1.586	3.321	101,79
18	Tapen	1.276	1.121	2.397	1.300	1.280	2.580	92,91
19	Tegalampel	1.084	899	1.983	1.143	1.021	2.164	91,63
20	Tenggarang	1.862	1.612	3.474	1.876	1.843	3.719	93,42
21	Tlogosari	1.900	1.686	3.586	1.989	1.846	3.835	93,51
22	Wonosari	1.630	1.579	3.209	1.574	1.613	3.187	100,7
23	Wringin	1.660	1.501	3.160	1.592	1.529	3.121	101,26
	Jumlah	33.704	30.537	64.242	32.718	31.570	64.288	99,93

2. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama

Angka Partisipasi Sekolah diukur dari jumlah penduduk usia 13-15 yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama dimana penghitungannya tidak hanya di tingkat SMP saja melainkan apabila ada penduduk usia 13 tahun masih sekolah pada jenjang sekolah dasar dan ada penduduk usia 15 tahun sudah sekolah di jenjang pendidikan menengah atas maka partisipasinya masuk pada usia 13-15 tahun.

**Tabel 2. 29**  
**Sebaran penduduk 13-15 tahun yang bersekolah**  
**(Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B**  
**Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso Tahun 2023)**

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun bersekolah			Jumlah penduduk usia 13-15 tahun			Capaian kinerja (%)
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Binakal	154	179	333	372	323	695	47,91
2	Bondowoso	3.082	3.134	6.216	1.870	1.827	3.697	168,14
3	Botolinggo	504	485	989	671	612	1.283	77,08
4	Cermee	828	849	1.677	977	983	1.960	85,56
5	Curahdami	627	714	1.341	755	692	1.447	92,67
6	Grujugan	827	759	1.586	890	787	1.677	94,57
7	Ijen	118	78	196	280	218	498	39,36
8	Jambesari Ds	924	898	1.822	827	836	1.663	109,56
9	Klabang	222	210	432	355	366	721	59,92
10	Maesan	867	659	1.526	1.131	1.072	2.203	69,27
11	Pakem	340	340	680	467	497	964	70,54
12	Prajekan	499	504	1.003	502	501	1.003	100
13	Pujer	734	767	1.501	838	764	1.602	93,7
14	Sukosari	340	252	592	309	267	576	102,78
15	Sumber Wringin	482	437	919	753	686	1.439	63,86
16	Taman Krocok	322	263	585	295	305	600	97,5
17	Tamanan	925	713	1.638	933	856	1.789	91,56
18	Tapen	727	548	1.275	703	657	1.360	93,75
19	Tegalampel	479	386	865	599	508	1.107	78,14
20	Tenggarang	995	910	1.905	962	880	1.842	103,42

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya derajat pendidikan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pendidikan didukung dengan 4 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Program Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Perijinan

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. Pemulihan pasca covid-19 yang mengakibatkan masih mengakibatkan jumlah siswa yang bersekolah relative rendah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan Sosialisasi guna peningkatan jumlah siswa yang bersekolah.
2. Berkurangnya anggaran akibat pandemi covid-19. Solusi : memaksimalkan sisa anggaran untuk kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.
3. Masih terdapat angka Droup Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Untuk mengurangi angka DO dilakukan evaluasi dan monitoring serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder).
4. Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya. Untuk memenuhi kekurangan dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
5. Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
6. Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan untuk Kabupaten Bondowoso masih kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan, untuk melakukan pemerataan diupayakan penataan kembali mengacu pada hasil school mapping dan melalui Data pokok pendidikan (DAPODIK).
7. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar bagi keluarga tidak mampu

8. Optimalisasi penggunaan Bantuan operasional sekolah (BOS)
9. Meningkatkan kerjasama dengan dunia Usaha dan Dunia Industri
10. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan dengan indikator kinerja utama indeks kesehatan dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 73,33% tercapai 73,23% atau tercapai 99,86% dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran strategis di atas didukung dengan 4 program pada Dinas Kesehatan, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Indeks Kesehatan Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meski begitu, kenaikan yang dicapai masih belum signifikan atau bahkan sesuai dengan target. Indeks Kesehatan merupakan indikator yang kompleks, karena dipengaruhi beragam faktor, seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Kesehatan perlu diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan sumberdaya kesehatan, sebagaimana dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 30**  
**Pemeliharaan dan Peningkatan**  
**Sumberdaya Kesehatan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2020	2021	2023
<b>Sarana dan Prasarana Kondisi Baik</b>					
1	Puskesmas	unit	25	25	8
2	Pustu	unit	63	63	27
3	Ponkesdes	unit	75	75	
4	Pusling dan ambulans	unit	33	33	26
<b>Tenaga Kesehatan</b>					
1	Dokter Spesialis	orang	79	83	60
2	Dokter Umum	orang	125	130	124
3	Dokter Gigi	orang	48	48	49
4	Bidan	orang	683	718	709
5	Perawat	orang	1.118	1.214	1259

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

Upaya peningkatan kesehatan dioptimalkan dengan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Selama upaya peningkatan kesehatan di Bondowoso pada tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan.

**Permasalahan (menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan/permasalahan)**

1. masih ada faktor yang menyebabkan indeks kesehatan belum terpenuhi
2. Masih ada ibu hamil K1 Akses (memeriksa kehamilan setelah umur kehamilan 3 bulan), ibu hamil abortus 395
3. Masih ada ibu bersalin yang melahirkan di dukun
4. Masih tingginya komplikasi pada neonatus dan ibu hamil serta ibu

bersalin karena persalinan caesar

5. Masih terbatasnya akses usia lanjut pada fasilitas kesehatan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukan screening kesehatan jika tidak ada keluhan
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan jika tidak ada keluhan

**Solusi (menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/Solusi perbaikan kinerja)**

1. memenuhi sarana prasarana kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya serta akses piuntuk ke pelayanan kesehatan
2. Optimalisasi screening terhadap semua ibu hamil
3. Kunjungan rumah kepada ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan
4. Optimalisasi screening terhadap semua ibu hamil sehingga tidak ada komplikasi pada neonatus
5. Melakukan screening kesehatan kepada usia lanjut dengan melakukan kunjungan rumah.
6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan screening kesehatan
7. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan screening kesehatan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas gender serta perlindungan perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender mempunyai target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 92,01% terealisasi 91,01% atau mencapai 98,91% dengan kategori Sangat Berhasil.

Indikator status kabupaten layak anak mempunyai target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Nindya tIndeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bondowoso sudah tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan Tingkat Pendidikan Antara Perempuan dan Laki - Laki sudah mulai seimbang. Begitu juga dengan dimensi Kesehatan, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan antara laki - laki dan perempuan sudah mulai berimbang. Dari Faktor Ekonomi yang dapat dilihat adalah mulai seimbangya formasi peluang kerja bagi laki - laki dan perempuan.

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

**3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**

**3.1.1 Dana Dekonsentrasi**

**1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN propinsi Jawa Timur dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor 440/541/430.9.7/2023 Tentang Pencapaian Kinerja Bersama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur Tanggal 15 Februari 2023.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Perjanjian ini dalam implementasinya untuk mencapai sasaran kinerja bersama program Bangga Kencana secara maksimal di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Tahun 2023 yang berbasis kinerja dan selanjutnya dituangkan dalam indikator kinerja program Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur serta digunakan sebagai alat ukur prestasi kinerja.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a) Capaian Kinerja

**Tabel 3. 1**  
**Capaian kinerja**  
**Sasaran kinerja kabupaten bondowoso**

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,85	2,05	89,19
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	68,73	82,63	120,22
3	Presentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmeet Need)	5,59	3,66	134,77

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR15 - 19)	25	26,79	92,84
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56,34	57,25	101,62
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	20	18,2	91
7	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	13.629	4.059	29,78
8	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan Genre	120	105	87,5
9	Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	20	19	95
10	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	231	25	10,82
11	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	28	28	100
12	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	49	34	69,39
13	Jumlah keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	32.179	29.658	92,17
14	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	120	80	66,67
15	Jumlah kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan pelayanan ramah lansia	20	19	95
16	Jumlah kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga	1	1	100

NO	SASARAN KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
17	Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	8	8	100
18	Jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	49	34	69,39
19	Jumlah kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting	274	260	94,89
20	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	1	3	300
21	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting	49	34	69,39
22	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	61,45	53,54	87,13
23	Cakupan calon PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	60	100	166,67
24	Cakupan keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan	60	100	166,67
25	Presentase desa / kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 HPK	80	69	86,25
26	Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	70	100	142,86

a) Realisasi Anggaran

**Tabel 3. 2**  
**Realisasi anggaran**  
**Program/keg/sub keg/jenis belanja**

NO	PROGRAM/KEG/SUB KEG/JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Pelatihan Tim Pendamping Keluarga	474.880.000	474.880.000	-	100
2	Peningkatan Pelayanan KB di RS dalam rangka monitoring dan evaluasi	19.500.000	19.500.000	-	100
3	Workshop pemutakhiran PK 23 bagi manager, supervisor dan kader	53.150.000	53.150.000	-	100
4	Fasilitasi pengumpulan dan updating data di rumah data kependudukan	23975.000	23.975.000	-	100
5	Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor	4.100.000	4.100.000	-	100
6	Orientasi penggunaan KKA di kelompok BKB melalui orientasi pembentukan SOTH tingkat kecamatan	30.290.000	30.290.000	-	100
7	Kegiatan kelas pengasuhan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa di kelompok BKB melalui orientasi pembukaan SOTH tingkat kecamatan	8.050.000	8.050.000	-	100
8	Kegiatan pembelian ATTG kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor di kampung KB	894.400	894.400	-	100
9	Workshop pemutakhiran PK 23 bagi kader	7.650.000	7.650.000	-	100
10	Koordinasi Teknis dalam rangka Workshop Pemutakhiran PK 23 bagi kader tambahan Bondowoso	4.500.000	4.500.000	-	100
11	Kegiatan workshop verifikasi dan validasi bagi kader	12.350.000	12.350.000	-	100

NO	PROGRAM/KEG/SUB KEG/JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
12	Biaya Pengiriman Sarpras Pemutakhirn PK 23	1.400.000	1.400.000	-	100
13	Biaya Pengiriman Sarpras Pemutakhirn PK 23	2.100.000	2.100.000	-	100
14	Biaya Pengiriman Sarpras Pemutakhirn PK 23	2.100.000	2.100.000	-	100
15	Biaya Transport Verval	1.800.000	1.800.000	-	100
	TOTAL	646.739.400	646.739.400	-	100

d. Permasalahan dan Solusi

**Tabel 3. 3**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1	Pola pikir dan adat budaya di Kabupaten Bondowoso menjadi permasalahan utama. Masih banyak orang tua yang merasa gelisah apabila anaknya tidak menikah cepat, takut menjadi gunjingan dan budaya bertunangan / nikah sirri dengan kedok menghindari zina	Advokasi dan KIE kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi pemuda
2	Kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih dipegang teguh oleh pasangan usia subur	Advokasi dan KIE terhadap PUS terkait penggunaan alat kontrasepsi
3	Masih banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom)	Advokasi dan KIE kepada akseptor terkait penggunaan MKJP harus lebih dimaksimalkan lagi

e. Saran dan Tindak lanjut

Advokasi dan KIE terhadap Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu terus dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi salah satu kunci Pengentasan Kemiskinan. Menekan

angka Laju Pertumbuhan Penduduk untuk mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas merupakan Program Prioritas Nasional yang harus kita wujudkan bersama. Demikian pula dengan Penurunan Angka Stunting. Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai salah satu upaya untuk menekan angka stunting perlu terus dilaksanakan agar remaja Indonesia bisa menjadi Remaja yang Sehat, Cerdas, dan Ceria menuju Generasi Emas di masa yang datang.

## **2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja**

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso menerima pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi /Banprog sebanyak 11 (Sebelas) paket program pelatihan yaitu: Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi

- a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Latihan Kerja Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-026.13.2.051102/2023 Tanggal Tgl Revisi 24 Mei 2023
  - b) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2023 (Revisi 1 s.d 5)
- a. Gambaran Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi yang dilaksanakan oleh UPTD–Pelatihan Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso terdiri dari:

- a) Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi 280 JP (1 Paket 16 Orang)
- b) Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran 260 JP (2 paket 32 Orng)
- c) Pelatihan Practical Office Advance 260 JP (1 Paket 16 Orang)
- d) Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin 260 JP (1 Paket 16 Orang)
- e) Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga 240 JP (1 Paket 16 Orang)
- f) Pelatihan Plate Welder SMAW 2G/PC 260 JP (2 Paket 16 Orang)
- g) Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional 280 JP (1 Paket 16 Orang)
- h) Bahan Pelatihan Pembuatan Pakaian 240 JP (1 Paket 16 Orang)
- i) Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga 240 JP (16 orang)– (1 paket)

Keseluruhan pelatihan tersebut dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja Bondowoso, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Tabel 3. 4  
Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja	Sumber Dana
Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rp 846.520.000,00	Rp 840.688.056,00	99,31 %	APBN

**3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso juga memperoleh alokasi tugas Dekonsentrasi dari APBN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur dan APBN Kementerian Pertanian (Direktorat Hortikultura), Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Dekonsentrasi Pertanian
  - a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tabel 3. 5  
Program Peningkatan  
Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

a)	Dasar Hukum	:	DIPA No. 018.04.4.059179/2023
b)	Instansi Pemberi TP	:	Kementerian Pertanian
c)	SKPD Penerima	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur
d)	Sumber Anggaran	:	APBN Tugas Pembantuan

b. Gambaran Umum Pelaksanaan tugas Pembantuan

Penetapan penanggung jawab program dan kegiatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dekonsentrasi satuan kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan APBN Kementerian Pertanian bagian Direktorat Jenderal Hortikultura memberikan tanggung jawab kepada provinsi jawa timur untuk diberikan pada kabupaten/kota yang

menerima sesuai dengan dasar hukum DIPA DIPA No. 018.04.4.059179/2023. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tugas Pembantuan adalah Program yang bersumberdana dari APBN, untuk Kabupaten Bondowoso, dimana Satuan Kerja pengampunya adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai pelaksana kegiatan.

Jenis Kegiatan dalam Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura adalah:

- a) Fasilitasi Bantuan Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan berupa Power Thresher multiguna mobile (3 unit)
  - b) Fasilitasi Bantuan Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura berupa bangsal (3 unit), sarana pasca panen (3 paket) dan prasarana pasca panen (3 paket).Bantuan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan berupa BLBU Padi IP 400, BLBU Padi Biofortifikasi, BLBU Jagung dan BLBU padi Inbrida
  - c) Bantuan Produksi Tanaman Sayuran dan Obat berupa Kampung Jahe (3 Kampung) dan Kampung Tanaman Obat (Kunyit) (2 Kampung).
  - d) Bantuan Domedryer berupa Pengering Tanaman Obat (2 kelompok).
  - e) Kawasan kampung Cabai 20 Ha
  - f) Budidaya padi lahan kering dengan bantuan berupa BLBU padi lahan kering dan BLBU padi Inbrida.
- c. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

**Tabel 3. 6**  
**Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
'EC. 5885 Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Power Thresher multiguna mobile	3 Unit	3 Unit	DIPERTAPANG JATIM
'EC. 5885 Pasca Panen, Pengelolaan	Bangsal	3 Unit	3 Unit	Dirjen Hortikultura

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Pasca panen	3 Paket	3 Paket	Dirjen Hortikultura
	Prasarana Pasca Panen	3 Paket	3 Paket	Dirjen Hortikultura
Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan	BLBU Padi IP 400	1.525 Ha	1.525 Ha	Dirjen Tanaman Pangan
	BLBU Padi Biofortifikasi	3.000 Ha	3.000 Ha	Dirjen Tanaman Pangan
	BLBU Jagung	5.672 Ha	5.672 Ha	Dirjen Tanaman Pangan
	BLBU padi inbrida (Gernas )	3.500 Ha	3500 Ha	Dirjen Tanaman Pangan
Produksi Tanaman Sayuran dan Obat	Kampung Jahe	3 kampung	3 kampung	Dirjen Hortikultura
Produksi Tanaman Sayuran dan Obat	Kampung Tanaman Obat (Kunyit)	2 kampung	2 kampung	Dirjen Hortikultura
Bantuan Domedryer	Pengering Tanaman Obat	2 Kelompok	2 Kelompok	Dirjen Hortikultura
Kawasan Kampung Cabai	Tersedianya Cabai	20 Hektar	20 Hektar	TP Propensi
Budi daya Padi lahan Kering	BLBU padi lahan kering	250 Ha	250 Ha	TP Provinsi
Budi daya Padi Inbrida	BLBU padi Inbrida	3000 Ha	3000 Ha	TP Provinsi

a. Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan yang ada dalam kegiatan dekonsentrasi dropping bantuan tidak tepat waktu.

b. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyesuaikan dengan dropping dan menyiapkan lahan untuk tanam.

2) Dekonsentrasi Perkebunan

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Yang Diterima

Program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

**Tabel 3. 7**  
**Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

a)	Dasar Hukum	:	DIPA No. 018.05.1.238830/2023
b)	Instansi Pemberi TP	:	Direktorat Jenderal Perkebunan
c)	SKPD Penerima	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso
d)	Sumber Anggaran	:	APBN Dekonsentrasi

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Penetapan penanggung jawab program dan kegiatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tugas dekonsentrasi APBN Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan tanggung jawab kepada kabupaten bondowoso untuk diberikan pada kabupaten/kota yang menerima sesuai dengan dasar hukum DIPA DIPA No. 018.04.4.059179/2023. Program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Dekonsentrasi adalah Program yang bersumberdana dari APBN, untuk Kabupaten Bondowoso sebagai pelaksana kegiatan.

Jenis Kegiatan dalam Program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar adalah:

- a) Sub Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika 200 Ha untuk 6 kelompok tani, dengan bantuan berupa Benih Kopi Bersertifikat sebanyak 200.000 batang, Pupuk Organik sebanyak 40.000 kg, Pupuk NPK sebanyak 10.000 kg.
- b) Sub Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika 100 Ha (Relaksasi AA) untuk 4 kelompok tani, dengan bantuan berupa Benih Kopi Bersertifikat sebanyak 100.000 batang, Pupuk Organik sebanyak 20.000 kg, Pupuk NPK sebanyak 5.000 kg.
- c) Sub Kegiatan Peremajaan Tanaman Kopi Arabika 200 Ha (Relaksasi AA) untuk 7 kelompok tani, dengan bantuan berupa Benih Kopi Bersertifikat sebanyak 200.000 batang, Pupuk Organik sebanyak 40.000 kg, Pupuk NPK sebanyak 10.000 kg.

c. Capaian kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi

**Tabel 3. 8**

**Capaian kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
EC.1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Perluasan Tanaman Kopi Arabika	200 Ha	200 Ha	Dirjen Perkebunan
	Perluasan Tanaman Kopi Arabika	100 Ha	100 Ha	Dirjen Perkebunan
	Peremajaan Tanaman Kopi Arabika	200 Ha	200 Ha	Dirjen Perkebunan

d. Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan yang ada dalam kegiatan dekonsentrasi dropping bantuan tidak tepat waktu.

e. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyesuaikan dengan dropping dan menyiapkan lahan untuk tanam.

3) Dekonsentrasi Pangan

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Yang Diterima

Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional

**Tabel 3. 9**

**Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

a)	Dasar Hukum	:	DIPA No. 125.01.3.690703/2023
b)	Instansi Pemberi TP	:	Badan Pangan Nasional
c)	SKPD Penerima	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso
d)	Sumber Anggaran	:	APBN Dekonsentrasi

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional diberikan kepada daerah dalam rangka akselerasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional hingga ke daerah. Dana dekonsentrasi tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan baik dari

aspek ketersediaan dan stabilitas pangan, kerawanan pangan dan gizi, serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bondowoso mendapatkan dukungan dana dekonsentrasi Bapanas sebesar Rp. 147.743.000 .Anggaran tersebut dipergunakan untuk 8 kegiatan.

c. Capaian kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi

**Tabel 3. 10**  
**Capaian kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi**

No.	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Gerakan Pangan Murah 2 kali	48.125.000	47.897.000	99,53
		- Rakor Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
		- Pemantauan Penyaluran Beras SPHP			
		- Pemantauan Harga Pangan			
2	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah	- Penyusunan Prognosa Pangan Strategis	7.974.000	7.964.000	99,87
		- Penyusunan Prognosa Pangan Wilayah			
3	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	5.015.000	4.868.000	97,07
4	Penguatan Cadangan Pangan Nasional	- Updating data lumbung pangan	4.480.000	4.310.000	96,21
		- Pemantauan Stok cadangan pangan masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)			
5	Fasilitasi Penyusunan	Penyusunan Peta Ketahanan dan	23.500.000	23.180.000	98,64

No.	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Prosentase
	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Kerentanan Pangan (FSVA)			
6	Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Lapooran Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG)	9.580.000	9.580.000	100,00
7	Registrasi Keamanan Pangan Segar	- Sosialisasi keamanan mutu pangan segar - Pengujian keamanan mutu pangan segar	32.327.000	32.146.100	99,44
8	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Kabupaten Bondowoso (SP SABA)	Uji Laboratorium pengawasan post market	16.742.000	15.931.750	95,16
Total			147.743.000	145.876.850	98,74

d. Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan yang ada dalam kegiatan dekonsentrasi waktu pelaksanaan yang terbatas dikarenakan DIPA baru turun tanggal 15 Agustus 2023

e. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk kegiatan.

#### 4. Badan Pendapatan Daerah

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 tahun 2007 tentang Pembagian dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Jawa Timur;
  - 6) Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
  - 7) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2019 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - 8) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan PBB P2.
  - 9) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bondowoso (Pasal 8 ayat 2.j)
- b. Gambaran Umum

Salah satu dari jenis pajak daerah di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dimana Pajak Bumi dan Bangunan ini dipungut oleh pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak kabupaten/kota.

Adapun tujuan dari pengalihan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini adalah agar adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tujuan pembangunan daerah dapat lebih cepat terlaksana. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas bumi dan bangunan kecuali untuk pertambangan, perhutanan dan perkebunan, sedangkan subjeknya adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan.

Keberadaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi atau

bangunan kecuali kawasan yang digunakan dalam pertambangan dan perkebunan. Sudah wajar dan sepatasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya.

Oleh karena Pajak Bumi Bangunan Pedesaan berada di wilayah pemerintahan desa sementara kewenangan pengelolaan pendapatan di daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso melaksanakan tugas penugasan kepada pemerintah desa untuk memungut PBB Pedesaan kepada wajib pajak di desa. Sementara itu fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 pasal 8 ayat 2.j berbunyi : “pelaksanaan fasilitasi pengupayaan dan pembantuan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Untuk pengelolaan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso menjadi Koordinator untuk 22 Kecamatan (Non Kecamatan Ijen = PBB P3) 213 kelurahan/desa sebagai berikut:

**Tabel 3. 11**  
**Pengelolaan PBB P2**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso**

1. Kec. Binakal (8 Desa)	2. Kec. Bondowoso (4 Desa dan 7 Kelurahan)
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Baratan</li> <li>o-Desa Bendelan</li> <li>o-Desa Binakal</li> <li>o-Desa Gadingsari</li> <li>o-Desa Jeruksoksok</li> <li>o-Desa Kembangan</li> <li>o-Desa Sumber Tengah</li> <li>o-Desa Sumber Waru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Kembang</li> <li>o-Desa Pancoran</li> <li>o-Desa Pejaten</li> <li>o-Desa Sukowiryo</li> <li>o-Kel. Badean</li> <li>o-Kel. Blindungan</li> <li>o-Kel. Dabasah</li> <li>o-Kel. Kademangan</li> <li>o-Kel. Kotakulon</li> <li>o-Kel. Nangkaan</li> <li>o-Kel. Tamansari</li> </ul>
3. Kec. Botolinggo (8 Desa)	4. Kec. Cermee (15 Desa)
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Botolinggo</li> <li>o-Desa Gayam</li> <li>o-Desa Gayam Lor</li> <li>o-Desa Klekehan</li> <li>o-Desa Lanas</li> <li>o-Desa Lumutan</li> <li>o-Desa Penang</li> <li>o-Desa Sumber Canting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Bajuran</li> <li>o-Desa Batu Ampar</li> <li>o-Desa Batu Salang</li> <li>o-Desa Bercak</li> <li>o-Desa Bercak Asri</li> <li>o-Desa Cermee</li> <li>o-Desa Grujugan</li> <li>o-Desa Jirek Mas</li> <li>o-Desa Kladi</li> <li>o-Desa Palalangan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Ramban Kulon</li> <li>o-Desa Ramban Wetan</li> <li>o-Desa Solor</li> <li>o-Desa Suling Kulon</li> <li>o-Desa Suling Wetan</li> </ul>
<b>5. Kec. Curahdami (11 Desa dan 1 Kelurahan)</b>	<b>6. Kec. Grujugan (11 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Curahpoh</li> <li>o-Desa Jetis</li> <li>o-Desa Kupang</li> <li>o-Desa Locare</li> <li>o-Desa Pakuwesi</li> <li>o-Desa Panambangan</li> <li>o-Desa Petung</li> <li>o-Desa Poncogati</li> <li>o-Desa Selolembu</li> <li>o-Desa Sumber Salak</li> <li>o-Desa Sumber Suko</li> <li>o-Kel. Curahdami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Dadapan</li> <li>o-Desa Dawuhan</li> <li>o-Desa Grujugan Kidul</li> <li>o-Desa Kabuaran</li> <li>o-Desa Kejawan</li> <li>o-Desa Pekauman</li> <li>o-Desa Sumber Pandan</li> <li>o-Desa Taman</li> <li>o-Desa Tegal Mijin</li> <li>o-Desa Wanisodo</li> <li>o-Desa Wonosari</li> </ul>
<b>7. Kec. Jambesari Darus Sholah (9 Desa)</b>	<b>8. Kec. Klabang (11 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Grujugan Lor</li> <li>o-Desa Jambeanom</li> <li>o-Desa Jambesari</li> <li>o-Desa Pejagan</li> <li>o-Desa Pengarang</li> <li>o-Desa Pucanganom</li> <li>o-Desa Sumber Anyar</li> <li>o-Desa Sumberjeruk</li> <li>o-Desa Tegalpasir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Besuk</li> <li>o-Desa Blimbing</li> <li>o-Desa Karang Anyar</li> <li>o-Desa Karang Sengon</li> <li>o-Desa Klabang</li> <li>o-Desa Klampokan</li> <li>o-Desa Leprak</li> <li>o-Desa Pandak</li> <li>o-Desa Sumber Suko</li> <li>o-Desa Wonoboyo</li> <li>o-Desa Wonokerto</li> </ul>
<b>9. Kec. Maesan (12 Desa)</b>	<b>10. Kec. Pakem (8 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Gambangan</li> <li>o-Desa Gunungsari</li> <li>o-Desa Maesan</li> <li>o-Desa Pakuniran</li> <li>o-Desa Penanggungan</li> <li>o-Desa Pujer Baru</li> <li>o-Desa Secolor</li> <li>o-Desa Suger Lor</li> <li>o-Desa Sumber Anyar</li> <li>o-Desa Sumber Pakem</li> <li>o-Desa Sumpersari</li> <li>o-Desa Tanahwulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Andungsari</li> <li>o-Desa Ardisaeng</li> <li>o-Desa Gadingsari</li> <li>o-Desa Kupang</li> <li>o-Desa Pakem</li> <li>o-Desa Patemon</li> <li>o-Desa Petung</li> <li>o-Desa Sumberdumpyong</li> </ul>
<b>11. Kec. Prajekan (7 Desa)</b>	<b>12. Kec. Pujer (11 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Bandilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Alas Sumur</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Cangkring</li> <li>o-Desa Prajekan Kidul</li> <li>o-Desa Prajekan Lor</li> <li>o-Desa Sempol</li> <li>o-Desa Tarum</li> <li>o-Desa Walidono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Kejayan</li> <li>o-Desa Mangli</li> <li>o-Desa Maskuning Kulon</li> <li>o-Desa Maskuning Wetan</li> <li>o-Desa Mengok</li> <li>o-Desa Padasan</li> <li>o-Desa Sukowono</li> <li>o-Desa Randu Cangkring</li> <li>o-Desa Suko Kerto</li> <li>o-Desa Sukodono</li> </ul>
<b>13. Kec. Sukosari (4 Desa)</b>	<b>14. Kec. Sumberwringin (6 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Kerang</li> <li>o-Desa Nogosari</li> <li>o-Desa Pecalongan</li> <li>o-Desa Sukosari Lor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Rejo Agung</li> <li>o-Desa Sukorejo</li> <li>o-Desa Sukorejo Kidul</li> <li>o-Desa Sumber Gading</li> <li>o-Desa Sumberwringin</li> <li>o-Desa Tegaljati</li> </ul>
<b>15. Kec. Taman Krocok (7 Desa)</b>	<b>16. Kec. Tamanan (9 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Gentong</li> <li>o-Desa Kemuningan</li> <li>o-Desa Kretek</li> <li>o-Desa Paguan</li> <li>o-Desa Sumberkokap</li> <li>o-Desa Taman</li> <li>o-Desa Trebungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Kalianyar</li> <li>o-Desa Karang Melok</li> <li>o-Desa Kemirian</li> <li>o-Desa Mengen</li> <li>o-Desa Sukosari</li> <li>o-Desa Sumber Anom</li> <li>o-Desa Sumber Kemuning</li> <li>o-Desa Tamanan</li> <li>o-Desa Wonosuko</li> </ul>
<b>17. Kec. Tapen (9 Desa)</b>	<b>18. Kec. Tegalampel (7 Desa dan 1 Kelurahan)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Cindogo</li> <li>o-Desa Gunung Anyar</li> <li>o-Desa Jurang Sapi</li> <li>o-Desa Kalitapen</li> <li>o-Desa Mangli Wetan</li> <li>o-Desa Mrawan</li> <li>o-Desa Taal</li> <li>o-Desa Tapen</li> <li>o-Desa Wonokusumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Karanganyar</li> <li>o-Desa Klabang</li> <li>o-Desa Klabang Agung</li> <li>o-Desa Mandiro</li> <li>o-Desa Purnama</li> <li>o-Desa Tanggulangin</li> <li>o-Desa Tegalampel</li> <li>o-Kel. Sekarputih</li> </ul>
<b>19. Kec. Tenggarang (11 Desa dan 1 Kelurahan)</b>	<b>20. Kec. Tlogosari (10 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Bataan</li> <li>o-Desa Dawuhan</li> <li>o-Desa Gebang</li> <li>o-Desa Kajar</li> <li>o-Desa Kesemek</li> <li>o-Desa Koncer D.A.</li> <li>o-Desa Koncer Kidul</li> <li>o-Desa Lojajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Brambang Darussalam</li> <li>o-Desa Gunosari</li> <li>o-Desa Jebung Kidul</li> <li>o-Desa Jebung Lor</li> <li>o-Desa Kembang</li> <li>o-Desa Pakisan</li> <li>o-Desa Patemon</li> <li>o-Desa Sulek</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Pekalangan</li> <li>o-Desa Sumber Salam</li> <li>o-Desa Tangsil Kulon</li> <li>o-Kel. Tenggarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Tlogosari</li> <li>o-Desa Trotosari</li> </ul>
<b>21. Kec. Wonosari (12 Desa)</b>	<b>22. Kec. Wringin (13 Desa)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Bendoarum</li> <li>o-Desa Jumpong</li> <li>o-Desa Kapuran</li> <li>o-Desa Lombok Kulon</li> <li>o-Desa Lombok Wetan</li> <li>o-Desa Pasarejo</li> <li>o-Desa Pelalangan</li> <li>o-Desa Sumberkalong</li> <li>o-Desa Tangsil Wetan</li> <li>o-Desa Traktakan</li> <li>o-Desa Tumpeng</li> <li>o-Desa Wonosari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o-Desa Ambulu</li> <li>o-Desa Ampelan</li> <li>o-Desa Banyuputih</li> <li>o-Desa Banyuwulu</li> <li>o-Desa Bukor</li> <li>o-Desa Glingseran</li> <li>o-Desa Gubrih</li> <li>o-Desa Jambewungu</li> <li>o-Desa Jatisari</li> <li>o-Desa Jatitamban</li> <li>o-Desa Sumbercanting</li> <li>o-Desa Sumbermalang</li> <li>o-Desa Wringin</li> </ul>

Pada tahun 2023, jumlah anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.394.422.600,00 yang terbagi kedalam 10 sub kegiatan yaitu:

- a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i) Penagihan Pajak Daerah
- j) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

**Tabel 3. 12**  
**Pagu Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Pengelolaan Pendapatan Daerah**  
**Badan Pendapatan Daerah TA. 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.394.422.600,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.394.422.600,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	225.000.000,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	94.000.000,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.000.000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	283.000.000,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	20.000.000,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	296.000.000,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	93.100.000,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	220.992.600,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	2.071.750.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	40.580.000,00

Sumber: SIPD TA.2023

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) realisasi penerimaan dari 22 kecamatan di Kabupaten Bondowoso (non Kec. Ijen) 79% sudah

lunas PBB P2. Jumlah ketetapan di 213 desa sebanyak 356.596 SPPT dengan nilai baku Rp. 16.487.867.518,00 terealisasi 305.762 SPPT senilai Rp. Rp. 13.371.289.634,00 ditambah dengan pendapatan denda PBB P2 sebesar Rp. 46.106.239,00 sehingga total realisasi PBB P2 (Baku dan denda) menjadi sebesar Rp. 13.242.684.424,00

Adapun rincian nilai ketetapan dan baku Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) per kecamatan di tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 13**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan**  
**Per Kecamatan**  
**Tanggal 01 Januari S.D 31 Desember 2023**

No	Kecamatan	Ketetapan PBB P2		REALISASI		TUNGGAKAN		REALISASI PBB-2023 (%)
		SPPT	BAKU	SPPT	POKOK	SPPT	SISA BAKU	
1	MAESAN	22,333	837.083.629,00	21,895	774,344,017	438	62,739,612	93%
2	GRUJUGAN	16,920	727.189.986,00	15,742	582,795,022	1,178	144,394,964	80%
3	TAMANAN	16,551	750.936.932,00	6,269	334,011,751	10,282	416,925,181	44%
4	JAMBESARI DS.	14,394	474.458.608,00	13,439	394,839,062	955	79,619,546	83%
5	PUJER	19,950	912.688.393,00	16,803	617,459,294	3,147	295,229,099	68%
6	TLOGOSARI	19,630	994.272.566,00	15,572	527,134,161	4,058	467,138,405	53%
7	SUKOSARI	9,128	249.828.846,00	9,124	248,220,778	4	1,608,068	99%
8	SUMBER WRINGIN	14,283	456.543.193,00	14,281	455,554,272	2	988,921	100%
9	TAPEN	19,485	996.429.973,00	11,158	538,056,564	8,327	458,373,409	54%
10	WONOSARI	18,589	1.335.922.419,00	15,829	1,040,459,811	2,760	295,462,608	78%
11	TENGGARANG	15,155	1.008.381.915,00	11,349	774,303,982	3,806	234,077,933	77%

No	Kecamatan	Ketetapan PBB P2		REALISASI		TUNGGAKAN		REALISASI PBB-2023 (%)
		SPPT	BAKU	SPPT	POKOK	SPPT	SISA BAKU	
12	BONDOWOSO	26,995	3.242.461.052,00	18,214	2,487,257,288	8,781	755,203,764	77%
13	CURAH DAMI	15,269	480.160.184,00	14,966	458.243.858,00	303	21.916.326,00	95%
14	BINAKAL	8,396	248.624.723,00	8,395	248.160.510,00	1	464.213,00	100%
15	WRINGIN	20,834	457.851.954,00	20,829	455.900.134,00	5	1.951.820,00	100%
16	PAKEM	15,563	319.827.121,00	15,562	319.319.217,00	1	507.904,00	100%
17	TEGALAMPEL	13,031	493.881.318,00	12,468	462.291.613	563	31.589.705,00	94%
18	TAMAN KROCOK	9,394	224.336.336,00	9,393	221.222.036,00	1	3.114.300,00	99%
19	KLABANG	11,431	521.058.684,00	11,428	519.749.393,00	3	1.309.291,00	100%
20	BOTOLINGGO	12,779	367.610.534,00	11,278	334.912.491,00	1,501	32.698.043,00	91%
21	PRAJEKAN	15,177	629.307.811,00	8,429	428.275.093,00	6,748	201.032.718,00	68%
22	CERMEE	21,309	759.011.341,00	20,827	733.278.752,00	482	25.732.589,00	97%
JUMLAH		356,596	16.487.867.518,00	303,250	12.955.789,099	53,346	3.532.078.419,00	79%

No	Kecamatan	Ketetapan PBB P2		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PBB P2 TAHUN 2023			
		SPPT	BAKU	SPPT	POKOK	DENDA	REALISASI
1	MAESAN	22,333	837.083.629,00	21,982	777,723,475	620,452	778,343,927
2	GRUJUGAN	16,920	727.189.986,00	15,865	595,382,296	3,515,714	598,898,010
3	TAMANAN	16,551	750.936.932,00	6,433	347,924,100	2,427,327	350,351,427
4	JAMBESARI DS.	14,394	474.458.608,00	13,470	396,929,863	381,199	397,311,062
5	PUJER	19,950	912.688.393,00	16,850	619,915,868	551,750	620,467,618
6	TLOGOSARI	19,630	994.272.566,00	15,627	531,902,717	847,865	532,750,582
7	SUKOSARI	9,128	249.828.846,00	9,147	249,808,952	625,639	250,434,591
8	SUMBER WRINGIN	14,283	456.543.193,00	14,325	457,372,825	414,911	457,787,736
9	TAPEN	19,485	996.429.973,00	11,311	552.230.334,00	2,032,830	554.263.164,00
10	WONOSARI	18,589	1.335.922.419,00	15,902	1.046.948.708,00	1,518,348	1.048.467.056,00
11	TENGGARANG	15,155	1.008.381.915,00	11,519	795.540.719,00	4,255,834	799.796.553,00
12	BONDOWOSO	26,995	3.242.461.052,00	19,283	2.610.272.027,00	24,246,263	2.634.518.290,00
13	CURAH DAMI	15,269	480.160.184,00	14,967	458.888.715,00	309,531	459.198.246,00
14	BINAKAL	8,396	248.624.723,00	8,400	248.362.051,00	96,740	248.458.791,00

No	Kecamatan	Ketetapan PBB P2		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PBB P2 TAHUN 2023			
		SPPT	BAKU	SPPT	POKOK	DENDA	REALISASI
15	WRINGIN	20,834	457.851.954,00	20,830	456.362.702,00	175,776	456.538.478,00
16	PAKEM	15,563	319.827.121,00	15,566	319.372.207,00	0	319.372.207,00
17	TEGALAMPEL	13,031	493.881.318,00	12,516	465.475.919,00	1,165,018	466.640.937,00
18	TAMAN KROCOK	9,394	224.336.336,00	9,414	221.995.019,00	222,585	222.217.604,00
19	KLABANG	11,431	521.058.684,00	11,428	519.749.393,00	0	519.749.393,00
20	BOTOLINGGO	12,779	367.610.534,00	11,282	334.971.845,00	16,096	334.987.941,00
21	PRAJEKAN	15,177	629.307.811,00	8,619	436.325.899,00	1,202,839	437.528.738,00
22	CERMEE	21,309	759.011.341,00	21,026	753.122.551,00	1,479,522	754.602.073,00
JUMLAH		356,596	16.487.867.518,00	305,762	13.196.578.185,00	46,106,239	13.242.684.424,00

Terdapat 5 kecamatan dengan capaian 100% yaitu:

1.	Kecamatan Pakem	(8 desa)	100%	Rp.	319.372.207,00
2.	Kecamatan Klabang	(11 desa)	100%	Rp.	519.749.393,00
3.	Kecamatan Wringin	(13 desa)	100%	Rp.	456.538.478,00
4.	Kecamatan Sumberwringin	(6 desa)	100%	Rp.	457.787.736,00
5.	Kecamatan Binakal	(8 desa)	100%	Rp.	248.458.791,00

Terdapat 4 kecamatan dengan capaian >95<100% yaitu:

6.	Kecamatan Taman Krocok	(7 desa)	99%	Rp.	222.217.604,00
7.	Kecamatan Sukosari	(4 desa)	99%	Rp.	250.434.591,00
8.	Kecamatan Cermee	(15 desa)	97%	Rp.	754.602.073,00
9.	Kecamatan Curahdami	(12 desa/kel)	95%	Rp.	459.198.246,00

12 Kecamatan lainnya mencapai target dibawah 100% yaitu:

10.	Kecamatan Tegalampel	(11 desa)	94%		
11.	Kecamatan Maesan	(12 desa)	93%		
12.	Kecamatan Botolinggo	(6 desa)	91%		
13.	Kecamatan Cermee	(15 desa)	93%		
14.	Kecamatan Jambesari DS	(11 desa)	83%		
15.	Kecamatan Grujungan	(9 desa)	80%		
16.	Kecamatan Wonosari	(7 desa)	78%		
17.	Kecamatan Bondowoso	(11 desa)	77%		
18.	Kecamatan Tenggarang	(10 desa)	77%		
19.	Kecamatan Pujer	(12 desa)	68%		
20.	Kecamatan Prajekan	( desa)	68%		
21.	Kecamatan Tapan	( desa)	54%		
22.	Kecamatan Tlogosari	( desa)	53%		

d. Permasalahan dan kendala

- a) Masih banyaknya target pendapatan terutama PBB yang tidak sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan upgrade sistem tentang penarikan PBB dan BPHTB. Salah satunya perlu mengadakan survei, karena selama ini sistem pengawasan kontrol pendapatan dari pajak dan retribusi belum maksimal
- b) Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah;

- c) Pentingnya mempertahankan kinerja Petugas Pemungut di Desa dalam melaksanakan tugas pembantuan pemungutan PBB P2;
- d) Besarnya piutang pajak daerah dan tingkat capaian penagihan tunggakan pajak masih rendah;
- e. Saran dan Tindak Lanjut
  - a) Bapenda akan terus mengintensifkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ke kecamatan dan desa dengan melibatkan satgas pajak yang terdiri dari Inspektorat dan Satpol PP termasuk ke PPAT dan PPATS untuk BPHTB.
  - b) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c) Pemberian penghargaan kepada kepala desa berprestasi yang berhasil lunas PBB P2 secara tepat waktu
  - d) Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah

## Bab IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

**Tabel 4.1**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
		pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

#### 4.1.3 Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PAUD	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana	395,750,000	350,000,000	88.44 %

PROGR AM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSE NTASE
		satuan pendidikan yang rusak			
PROGR AM SPM PENDID IKAN DASAR	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	13,578,211,800	4,969,263,189	36.60 %
Program Indonesi a Pintar Jenjang SD			15,880,050,000	15,388,650,000	96.91 %
Program Indonesi a Pintar Jenjang SMP			6,886,875,000	6,684,375,000	97.06 %

#### 4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yg menangani SPM berjumlah 28 orang.

#### 4.1.5 Hasil Capaian

**Tabel 4. 1**  
**Tabel Indeks Hasil Capaian**

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
PAUD	APS	35.977	35.977	100%
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan	1.112	387	34.80%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	minimal akreditasi B			
	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	2.600	1.129	43.42%
	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	56	42	75%
	Kecukupan formasi guru ASN	9	9	100%
	Indeks distribusi guru	95	95	100%
	Proporsi PTK bersertifikat	1.114	632	56.73%
PENDIDIKAN DASAR	SD			
	APK	49.911	49.911	100%
	APS	49.911	49.911	100%
	APM	48.568	48.568	100%
	Kemampuan literasi	53.31	53.31	100%
	Kemampuan numerasi	39.18	39.18	100%
	Perbedaan Skor Literasi	53.31	53.31	100%
	Perbedaan Skor numerasi	39.18	39.18	100%
	Indeks iklim keamanan	66.4	66.4	100%
	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	66.22	66.22	100%
	Proporsi PTK bersertifikat	4550	1751	38.48%
	SMP			
	APK	33.094	33.094	100%
	APS	33.094	33.094	100%
	APM	33.094	33.094	100%
	Kemampuan literasi	51.77	51.77	100%
Kemampuan numerasi	37.77	37.77	100%	

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Perbedaan Skor Literasi	51.77	51.77	100%
	Perbedaan Skor numerasi	37.77	37.77	100%
	Indeks iklim keamanan	62.95	62.95	100%
	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	62.96	62.96	100%
	Proporsi PTK bersertifikat	1443	601	41.65%
PENDIDIKAN KESETARAAN	APK	15.281	15.281	100%
	APS	15.281	15.281	100%
	APM	15.281	15.281	100%
	Kemampuan literasi	16.78	16.78	100%
	Kemampuan numerasi	24.58	24.58	100%
	Perbedaan Skor Literasi	16.78	16.78	100%
	Perbedaan Skor numerasi	24.58	24.58	100%
	Indeks iklim keamanan	58.79	58.79	100%
	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	54.74	54.74	100%

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Masih rendahnya capaian literasi, numerasi
2. Pengurangan anggaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya capaian program dan kegiatan. Solusi : Semaksimal mungkin menggunakan anggaran yang ada
3. Masih terdapat angka Droup Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Untuk mengurangi angka DO dilakukan evaluasi dan monitoring serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (*stakeholder*).
4. Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya. Untuk memenuhi kekurangan dapat dilakukan

penambahan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

5. Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
6. Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan untuk Kabupaten Bondowoso masih kekurangan guru yang signifikan sehingga masih banyak kelas yang diisi oleh tenaga sukarelawan, untuk melakukan pemerataan diupayakan penataan kembali mengacu pada hasil school mapping dan melalui Data pokok pendidikan (DAPODIK).
7. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar bagi keluarga tidak mampu
8. Optimalisasi penggunaan Bantuan operasional sekolah (BOS)
9. Penyediaan biaya pembinaan bagi siswa berprestasi
10. Meningkatkan kerjasama dengan dunia Usaha dan Dunia Industri
11. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
12. Penyediaan Bantuan Operasional Madrasah Diniyah
13. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
14. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pendidikan kesetaraan untuk menjangkau penduduk usia 25 samapai 45 tahun agar kembali bersekolah melalui paket A, B, dan C sehingga diharapkan dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso.

## **4.2 Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);

#### 4.2.2 Target Pencapaian Spm

**Tabel 4. 2**  
**Target Pencapaian**  
**Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
1	Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KESEHATAN
2	Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4	kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
		kesehatan						
5	kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
6	kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
7	kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
8	kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
		mendapatkan pelayanan kesehatan						
9	kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
11	kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indicator	Target	Batas waktu	
12	kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunity Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

#### 4.2.3 Anggaran

**Tabel 4. 3**  
**Program Kegiatan**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1.737.321.900	1.527.477.700	87.92 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	8.790.000	8.563.000	97.42 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	39.080.000	30.500.000	78.05 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	743,052,300	666,424,950	89.69 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	163.557.000	133.381.525	81.55 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	244.005.000	213.318.100	87.42 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	6.540.000	6,514.000	99.60 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	802.825.000	802.142.810	99.92 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	143.355.000	109,822.000	76.61 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	127,414,000	81,275,500	63.79 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	310.009.000	290.946.100	93.85 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	18.400.000	18.345.370	99.70 %
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	31.347.500	27.734.700	88.47 %
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.702.215.000	2.697.545.542	99.83 %
		Pengadaan Obat Vaksin	7.600.250.360	7.326.136.326	96.39 %
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	165000.000	152.493.750	92.42 %
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.052.693.800	851.155.800	80.86 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.216.937.31 2	13.106.835.947	76.13 %
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	65.020.000	63.359.000	97.45 %
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.773.753.72 8	8.572.289.900	43.35 %
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	269.369.000	249.204.750	92.51 %

#### 4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yg menangani SPM di Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang.

#### 4.2.5 Hasil Capaian

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Capaian**

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	3700	3700	100%
	Tablet tambah darah	1112000	1112000	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	8418	8418	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	8418	8418	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	8418	8418	100%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	8418	8418	100%
	Kartu ibu/rekam medis ibu	8418	8418	100%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8418	8418	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	62	62	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	567	567	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat	644	644	100%
	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	8418	8418	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf, Kartu ibu (rekam medis), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9728	9728	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	62	62	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin Hepatitis B0, Vitamin K1 injeksi, Salep/tetes mata antibiotic, Formulir bayi baru lahir, Formulir Manajemen	8815	8815	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Terpadu Bayi Muda (MTBM), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	62	62	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK), Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	43371	43371	100%
	Vitamin A Biru	8400	8400	100%
	Vitamin A Merah	50300	50300	100%
	Vaksin imunisasi dasar: HBO	8942	8942	100%
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	9026	9026	100%
	Vaksin imunisasi dasar: Polio	8830	8830	100%
	Vaksin imunisasi dasar: IPV, Vaksin imunisasi dasar: Rubella	8815	8815	100%
	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	8898	8898	100%
	Vaksin imunisasi dasar: Campak	8645	8645	100%
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	8758	8758	100%
	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak, Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	8645	8645	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	9043	9043	100%
	Peralatan Anafilaktik	200	200	100%
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	39	39	100%
	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	5396	5396	100%
	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	341	341	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Buku raport kesehatanku, Buku pemantauan kesehatan, Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah,	25	25	100%
	Kuesioner skrining kesehatan	91051	91051	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	35	35	100%
	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	41	41	100%
	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	500	500	100%
	Tenaga Non kesehatan : Guru	450	450	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Alat : KIT IVA Tes, Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi	25	25	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
	Alat ukur berat badan, Alat : Alat ukur tinggi badan, Alat : Alat ukur lingkar perut, Alat : Tensimeter, Alat : Glukometer	219	219	100%
	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	288943	288943	100%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1095	1095	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	106087	106087	100%
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), Buku kesehatan lansia,	25	25	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	25	25	100%
	Obat Hipertensi	642300	642300	100%
	Alat : Glukometer	219	219	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Alat : Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	10158	10158	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	26	100%
	Obat Diabetes Melitus	18322	18322	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	5	5	100%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	25	25	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	50	50	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir pencatatan dan pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP),	25	25	100%
	Reagen Zn TB	143	143	100%
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1300	1300	100%
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether	16300	16300	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			
	Catridge tes cepat molekuler	7500	7500	100%
	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31	31	100%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	90	90	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner), Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK,	25	25	100%
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	11350	11350	100%
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	13879	13879	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	62	62	100%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	12	12	100%

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut merupakan uraian yang menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bondowoso, ada indikator yang masih belum mencapai target nasional beserta permasalahannya, yakni :

##### 1. *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV*

Capaian orang yang berisiko HIV diskriminasi HIV sampai TW 3 sebanyak 10.197 orang atau 99,45% dari target 10.253 orang.

Permasalahan dari program HIV AIDS yaitu belum ada pembinaan terhadap Populasi Kunci (Ponci) dikarenakan kita tidak mempunyai Penjangkau Ponci sehingga capaian untuk skrining Ponci kurang maksimal dan kurang maksimalnya koordinasi internal dinas kesehatan antar bidang dan program yang berkaitan dengan HIV.

##### 2. *Pelayanan Kesehatan anak usia pendidikan dasar*

Capaian Screening pada anak usia sekolah belum tercapai permasalahannya, yakni pada saat pemeriksaan screening anak usia sekolah murid tidak masuk sekolah dan murid melaksanakan PKL.

##### 3. *Pelayanan Kesehatan Ibu hamil*

Permasalahannya antara lain masih banyaknya Ibu hamil yang datang berkunjung ke Nakes usia kehamilan diatas 3 bulan, karena anggapan yang salah tentang pemeriksaan di awal kehamilan akan menyebabkan keguguran, ataupun kehamilan memang disembunyikan atau tidak di kehendaki. Mobilitas ibu hamil yang tinggi, terutama di daerah perkotaan sehingga sulit di deteksi domisili Ibu hamil di wilayah termasuk daerah-daerah dengan warga yg banyak tinggal atau bekerja di luar propinsi, datang kembali hanya untuk bersalin, sehingga kehamilannya tidak terpantau.

Masih adanya kasus kematian Ibu dimana penyebab terbanyak adalah penyakit penyerta pada ibu hamil, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pasangan usia subur untuk menunda kehamilan ketika menderita penyakit, kurangnya screening atau deteksi dini penyakit pada calon Ibu/ ibu hamil oleh petugas. Masih ada kematian Ibu yang terlambat dirujuk dikarenakan bertempat tinggal di daerah terpencil, hal ini disebabkan karena sulitnya akses untuk menjangkau tempat tinggal ibu hamil tersebut, kurangnya jumlah tenaga

kesehatan ( Bidan ) yang bertempat tinggal di wilayah, terutama di daerah terpencil dan kurangnya jumlah Dokter di Puskesmas

4. *Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*

Permasalahannya adalah banyaknya Bayi Baru Lahir yang tidak dilakukan IMD, terutama Bayi yang lahir di Rumah sakit dengan Operasi caesar dan mengalami komplikasi. Masih tingginya angka kematian bayi ( AKB ), disebabkan banyaknya komplikasi dalam kehamilan ( Pre eklamsi ), Ibu hamil Anemi dan KEK, mengakibatkan bayi terlahir BBLR dan mengalami komplikasi Asfiksia. Kurangnya Sarana prasarana pertolongan dan perawatan Gawat darurat Neonatal pada FKTP dan FKTL.

5. *Pelayanan kesehatan Balita*

permasalahannya adalah masih adanya orang tua yang tidak membawa balitanya ke Posyandu lagi karena sudah selesai Imunisasi. Masih adanya orangtua yang menolak Imunisasi. Pemanfaatan Buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta Edukasi masih kurang.

6. *Pelayanan kesehatan pada usia lanjut*

permasalahannya adanya lansia yang tidak hadir pada posyandu lansia dikarenakan mereka masih bekerja pada saat pelaksanaan posyandu. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi kehadiran lansia di posyandu anak atau cucu yang bekerja sehingga tidak dapat mengantar para lansia ke posyandu lansia selain itu juga anggaran untuk pengadaan BMHP stick kolesterol, gula darah dan asam urat untuk pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut masih belum mencukupi semua sasaran, sehingga cakupan skrining kesehatan pada usia lanjut di triwulan III berada di angka 60,85% belum mencapai target 100%.

7. *Pelayanan kesehatan pada usia produktif*

permasalahannya adalah masih rendahnya kehadiran masyarakat di posbindu-posbindu dan pos layanan kesehatan untuk dilakukan skrining deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM), masyarakat masih enggan hadir dikarenakan merasa tidak ada keluhan. Penduduk usia banyak yang bekerja pada saat jam kerja. penduduk usia produktif banyak yang bekerja pada saat pelaksanaan posbindu. Sehingga cakupan skrining kesehatan usia produktif di tribulan III masih 34,05% dari target 100% setahun penduduk usia produktif dilakukan skrining kesehatan standar.

#### 8. *Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi*

Hipertensi sering disebut “the silent killer” karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Oleh karena itu penderita hipertensi banyak yang tidak berkunjung ke faskes untuk melakukan pemeriksaan rutin mereka cenderung periksa jika ada keluhan saja jika tidak maka tidak periksa sehingga untuk memenuhi target dimana prevalensi hipertensi sesuai hasil Riskesdas 2018 adalah 31,7% dari jumlah penduduk tidak tercapai. Sehingga cakupan skrining kesehatan penderita hipertensi di tribulan III masih 24,25% dari target 100% dalam setahun. Adapun solusi dan strategi penyelesaian permasalahan antara lain:

#### 9. *Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Tinggi HIV*

1. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu,
2. Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan,
3. Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional
4. Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah, dan
5. Penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

#### 10. *Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB*

Strategi penanggulangan TB dalam pencapaian eliminasi nasional TB meliputi:

- a. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
  1. Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial
  2. Regulasi dan peningkatan pembiayaan
  3. Koordinasi dan sinergi program

b. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu

Peningkatan jejaring layanan TB melalui

1. PPM (publicprivate mix) dalam penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat
2. Peningkatan kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL, dan lain sebagainya
3. Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat/saran diagnostik yang baru
4. Kepatuhan dan Kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding
5. Bekerja sama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan Semesta (health universal coverage).

c. Pengendalian faktor risiko

1. Promosi lingkungan dan hidup sehat.
2. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB
3. Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB
4. Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi.

d. Peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB

1. Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat
2. Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah

e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB

1. Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat
2. Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB
3. Pemberdayaan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat

11. *Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar*

Tenaga kesehatan datang kembali ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan ulang pada anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah atau PKL (Praktek Kerja Lapangan)

ANGKA KEMATIAN IBU ( AKI )/ ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB )

1. Penguatan AMPSR ( Pembentukan Tim, pengesahan Tim dengan SK Bupati ), pelaksanaan AMPSR minimal 4 kali dalam satu tahun, penyusunan rekomendasi, dan pelaksanaan hasil rekomendasi
2. Usulan kelengkapan sarana, alat, dan obat-obatan dalam penanganan Gawat Darurat Maternal dan Neonatal di semua FKTL ( Rumah sakit ) dan FKTP ( Puskesmas )
3. Perbaikan pada sistem rujukan
4. Penambahan tenaga kesehatan ( Bidan ) pada daerah terpencil
5. Penambahan Dokter Umum di Puskesmas
6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ( Tim Puskesmas : Dokter, Perawat, Bidan ) melalui Pelatihan dan OJT Gadar Matneo
7. Pembinaan Tim Ahli ( dokter spesialis Obsgyn dan dokter spesialis anak) dalam pelayanan KIA dan gawat darurat maternal neonatal
8. Peningkatan kapasitas Tim PONEK dan PONEK
9. Edukasi masyarakat tentang penundaan pernikahan muda dan Kehamilan di usia dini
10. Edukasi masyarakat ( WUS/ PUS ) tentang skrining layak hamil

#### 12. *Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*

1. Penguatan ANC Terpadu di Puskesmas, memastikan semua ibu hamil mendapatkan pelayanan komprehensif dengan 10 T dan pemeriksaan oleh Dokter pada TW 1 dan TW III
2. Pemanfaatan USG di Puskesmas
3. Pemanfaatan Buku KIA dalam edukasi Ibu hamil dan keluarga serta sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan
4. Pelaksanaan Kelas Ibu hamil
5. Pendampingan Ibu hamil Resiko tinggi oleh kader
6. Meningkatkan kunjungan rumah, dan membawa Ibu hamil ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 10 T
7. ANC Terpadu mobile, dilaksanakan untuk menjangkau pelayanan Ibu hamil pada daerah terpencil

#### 13. *Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*

1. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi ( P4K )

2. Pemenuhan sarana dan tenaga FKTP dalam pelayanan Persalinan
3. Kesiapsiagaan Rujukan

14. *Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*

1. Rujukan dini terencana kasus komplikasi dalam kehamilan
2. Pemenuhan obat esensial dasar untuk Bayi baru lahir
3. Koordinasi dengan RS, Dokter Spesialis Obsgyn, dan Dokter spesialis anak untuk melaksanakan IMD pada semua persalinan kecuali pada Bayi yang mengalami komplikasi
4. Peningkatan kapasitas petugas ( Dokter dan Bidan ) dalam Manajemen Terpadu Bayi Muda ( MTBM )

15. *Pelayanan Kesehatan Balita*

1. Peningkatan kapasitas petugas ( Dokter dan Bidan ) dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK )
2. Pemenuhan Screening kit dan pedoman SDIDTK
3. Peningkatan kapasitas kader dan Guru TK/PAUD dalam Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan
4. Pemanfaatan Buku KIA untuk screening, pencatatan, dan edukasi pada Orang tua Balita
5. Pemantauan perkembangan oleh orang tua dan kader dengan menggunakan Buku KIA
6. Peningkatan kapasitas petugas ( Dokter, Bidan dan Perawat) dalam manajemen Terpadu balita Sakit ( MTBS )
7. Monev pelaksanaan SDIDTK dan MTBS
8. Edukasi masyarakat untuk tetap berkunjung ke Posyandu sampai Balita berusia 60 bulan
9. Edukasi Imunisasi Dasar Lengkap

16. *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut*

1. Pihak Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai program posyandu lansia kepada masyarakat khususnya lansia guna meningkatkan pengetahuan lansia mengenai manfaat posyandu lansia.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam program posyandu lansia guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia

3. Program posyandu lansia diharapkan menjadi suatu program unggulan yang dilakukan oleh puskesmas dalam meningkatkan kesejahteraan lansia guna meningkatkan kunjungan lansia ke posyandu lansia
4. Pengadaan BMHP pemeriksaan kolesterol, gula darah dan asam urat bagi usia lanjut

#### *17. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif*

1. Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas melakukan sosialisasi terkait penting dan manfaat dari skrining kesehatan utamanya pada penduduk usia produktif untuk mencegah dan deteksi dini faktor resiko penyebab penyakit tidak menular
2. Mengintegrasikan kegiatan posbindu dengan posyandu lansia, serta membuka layanan posyandu di kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat banyak
3. Advokasi tingkat kabupaten untuk penyusunan peraturan daerah terkait pelaksanaan posbindu di masyarakat

#### *18. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi*

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan skrining Kesehatan melalui Posbindu dan posyandu lansia di masyarakat
2. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan penderita hipertensi
3. Bekerjasama dengan FKTP dan Klinik serta RS di seluruh kabupaten Bondowoso untuk pelayanan dan pelaporan pelayanan penderita Hipertensi

### **4.3 Urusan Pekerjaan Umum**

#### **4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar**

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

**Tabel 4.5**  
**Target Pencapaian**  
**Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

#### 4.3.3 Anggaran

**Tabel 4. 6**  
**Anggaran**

Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota	Pembangunan spam jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	10.425.000.000	8.325.384.554	79.86 %
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	11.000.000.000	11.000.000.000	100%

#### 4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 1 (SATU) orang.

#### 4.3.5 Hasil Capaian

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	persentase
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari),	950	950	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	persentase
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	820	820	100%

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

**Tabel 4. 7**  
**Permasalahan dan Solusi**

NO	JENIS LAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Rendahnya keberlanjutan pengoperasian penyimpanan dan sumber mata air di masyarakat	Peningkatan keberlanjutan pengoperasian penyimpanan dan sumber mata air di masyarakat
		Kurangnya sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk

NO	JENIS LAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan	menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan
		Kurangnya pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
		Belum meratanya akses dan pelayanan masyarakat terhadap sarana air minum	Peningkatan akses dan pelayanan masyarakat terhadap sarana air minum
		Belum adanya identifikasi ulang atau rewiuw berskala pada Dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum) sebagai dasar terencananya suatu program pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyeluruh(comprehensive), berkelanjutan (sustainable) dan terarah (focus) yang bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Dilakukan identifikasi ulang atau rewiuw tiap berapa tahun sekali pada Dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum) sebagai dasar terencananya suatu program pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyeluruh(comprehensive), berkelanjutan (sustainable) dan terarah (focus) yang bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Perlu adanya update tentangdokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan	Dilakukan updating pada dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan
		Belum maksimalnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terutama dalam pengangkutan tinja dalam septik tank	Peningkatan lembaga pengelola sanitasi dan pengadaan Truk Pengangkut Tinja dalam sub sistem pengangkutan pada Sistem

NO	JENIS LAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Air Limbah (RISPAL)	Pembuatan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Air Limbah (RISPAL)
		Kurangnya fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Peningkatan IPAL yang merata pada tiap daerah
		Belum adanya fasilitas IPLT	Dilakukan pembangunan fasilitas IPLT

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

##### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

**Tabel 4. 8**  
**Target Pencapaian**  
**Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang PEKERJAAN

	KABUPATEN/KOTA	huni						UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	FASILITAS I PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	

#### 4.4.3 Anggaran

**Tabel 4.9**  
**Anggaran**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Pembangunan rumah bagi korban bencana	200.000.000	200.000.000	100%

Kabupaten/Kota			
Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.dana APBD	650.000.000	650.000.000	100%
Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.dana BNPB	3.250.000.000	3.250.000.000	100%

#### 4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM adalah 2 (DUA) orang.

#### 4.4.5 Hasil Capaian

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Capaian**

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	10	10	100%
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	78	78	100%

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### 1) PERMASALAHAN:

1. Akses jalan menuju lokasi Pembangunan relokasi untuk mobilitas bahan kurang memadai.
2. Pada saat Pembangunan Rumah layak huni cuaca sering tidak menentu/hujan, sehingga menghambat pekerjaan.
3. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Bencana

##### 2) SOLUSI:

1. Berkoordinasi dengan pihak desa untuk Bersama-sama secara bergotong royong membuat jalan masuk ke lokasi Pembangunan relokasi
2. Pembangunan rumah layak huni dilaksanakan secara lembur disaat malam hari sehingga selesai tepat waktu
3. Pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan dilakukan sosialisasi pentingnya mitigasi bencana.

## 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

**Tabel 4. 11**  
**Target Pencapaian**  
**Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			keterangan
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara Kabupaten /Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN/KOTA
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
		bencana						
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		indikator	Target	Batas waktu	indikator	Target	Batas waktu	
		kebakaran						

#### 4.5.3 Anggaran

**Tabel 4. 12**  
**Anggaran**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	176.500.000	173.023.963	98.03 %
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	106.332.400	101.247.500	95.22 %
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan	246.892.000	230.682.250	93.43 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wal i Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.895.038.100	5.577.292.703	94.61 %
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.208.000	47.516.610	83.06 %
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.824.097.500	1.660.717.807	91.04 %
PENANGGULAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	57.930.500	57.738.450	99.67 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	102.136.800	101.032.300	98.92 %
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	74.891.200	73.705.994	98.42 %
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	390.571.500	385.749.400	98.77 %
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	393.161.500	389.215.300	99.00 %
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	31.350.000	30.945.000	98.71 %
		Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	40.383.400	40.383.400	100.00 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		bencana Kabupaten/Kota			
		Penyusunan rencana kontijensi	28.260.900	28.034.600	99.20 %
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	10.230.000	10.230.000	100.00 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	19.080.000	6.900.000	36.16 %
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	37.362.900	37.315.500	99.87 %
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	14.465.200	14.458.600	99.95 %
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	445.482.500	439.198.200	98.59 %
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca bencana	12.012.782.500	12.002.000.870	99.91 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		Kabupaten/Kota			
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	61.200.000	60.618.700	99.05 %
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	18.000.000	15.835.150	87.97 %
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.000.000.000	2.999.000.000	99.97 %
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	12.000.000	10.696.200	89.14 %

#### 4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 121 orang dari Satpol PP dan 29 orang dari BPBD.

#### 4.5.5 Hasil Capaian

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Capaian**

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	27	27	100%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	28	28	100%
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	86	86	100%
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	622.665	616.297	98%
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap	1.140	1.140	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)			
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	187	187	100%
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KEBENCANAAN)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	321	321	100%
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	63	63	100%
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	298	298	100%
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	6	6	100%
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	14	14	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	8	8	100%
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	42	42	100%
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	93	93	100%
	Pelayanan penyelamatan dan	44	44	100%

Jenis layanan	Indeks capaian	Jumlah yg dilayani	Jumlah terlayani	Persentase
	evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)			

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

##### A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain :

1. Dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Jumlah personil belum sesuai kebutuhan, karena rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk harus ada 6 personil, berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
3. Masih adanya pelanggaran pada perijinan untuk jenis perdagangan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk berusaha (NIB) dan serta pendirian bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Kurangnya tenaga penyidik (PPNS)
5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas terutama untuk sarana pemadam kebakaran dan patroli.
6. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan / penanganan awal bencana kebakaran

##### B. Solusi

Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, diperlukan koordinasi antara Satpol PP, TNI dan POLRI dalam pelaksanaan kegiatan patroli wilayah dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso;
2. Diperlukan pengadaan/rekrutmen personil Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012;
3. Meningkatkan sosialisasi dalam penegakan Perda dan Perkada;
4. Diperlukan pengadaan/rekrutmen tenaga PPNS
5. Diperlukan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang baru untuk optimalisasi pelayanan pemadaman kebakaran, Mobil Patroli dan Truck Patroli untuk
6. meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan dini bencana kebakaran

Permasalahan dan Solusi di Bidang Kebencanaan :

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM
2. Ketidaksihesuaian Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD dengan Permendagri No. 46 Tahun . 2008 dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008
3. Luasnya Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Bondowoso

Solusi :

1. Meningkatkan SDM secara bertahap dengan cara melakukan sosialisasi kebencanaan
2. Melakukan evaluasi dan kerja sama dengan OPD terkait tentang SOTK berdasarkan Undang – Undnag yang berlaku.
3. Melaksanakan pemetaan terhadap Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bondowoso

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

**Tabel 4. 14**  
**Target Pencapaian**  
**Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal bidang SOSIAL

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
	dan pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti						
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator kinerja capaian						Keterangan
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	
		bagi korban bencana kabupaten/kota						

#### 4.6.3 Anggaran

**Tabel 4.15**  
**Anggaran**

PROGR AM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
REHABI LITASI SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan permakanan	717.000.000	712.802.500	99.41 %
		Penyediaan sandang	20.000.000	19.926.500	99.63 %
		Penyediaan alat bantu	202.400.000	193.533.650	95.62 %
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15.000.000	14.230.000	94.87 %
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social	150.000.000	137.230.000	91.49 %
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak	335.000.000	280.361.600	83.69 %

		terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat			
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan makanan	40.000.000	38.660.400	96.65 %
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50.000.000	10.546.000	21.09 %
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		150.000.000	150.000.000	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyanggah masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza		180.000.000	170.000.000	94.44%
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		30.000.000	29.971.000	99.90%

#### 4.6.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani SPM sebanyak 10 orang.

#### 4.6.5 Hasil Capaian

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Capaian**

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Telantar di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan	20	20	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat, Penyediaan sandang	2	2	100%
	Penyediaan permakanan, Pemberian bimbingan fisik,	50	50	100%

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
	mental, spiritual dan social, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar			
	Penyediaan alat bantu	37	37	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K), Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan, Layanan rujukan	5	5	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10	10	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian	4	4	100%

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
	peayanan reunifikasi keluarga			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	30	30	100%
	Penyediaan permakanan	100	100	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	150	150	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat, Pemberian	5	5	100%

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
	bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			
	Penyediaan permakanan	5043	5043	100%
	Penyediaan alat bantu	10	10	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	12	12	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	11	11	100%
	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan, Layanan rujukan	10	10	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100%

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan, Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat, Penyediaan permakanan	40	40	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social, Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Layanan rujukan	14	14	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	100%
	Akses ke layanan	20	20	100%

JENIS LAYANAN	INDEKS CAPAIAN	JUMLAH YG DILAYANI	JUMLAH TERLAYANI	PERSENTASE
	pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan			
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan permakanan, Pelayanan dukungan Psikososial	75	75	100%

#### 4.6.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

##### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain :

1. Masih banyak terdapat lansia terlantar yang belum masuk DTKS
2. Masih banyak terdapat disabilitas terlantar yang belum masuk DTKS
3. jumlah penerima layanan anak adopsi masih cenderung sedikit
4. jumlah sekolah SD yang mengusulkan program tetirah cukup tinggi
5. Masih banyak PPKS anak dan disabilitas yang membutuhkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Masih terdapat Penerima Manfaat (ODGJ) yang mengalami putus obat dikarenakan berhentinya pengobatan

b. Solusi

Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Mengusulkan kepada pihak desa untuk dimasukkan DTKS
2. Mengusulkan kepada pihak desa untuk dimasukkan DTKS
3. perlu adanya sosialisasi anak adopsi di tingkat desa/ kecamatan
4. dibutuhkan tambahan anggaran untuk mengirim klien anak tetirah agar dapat mengirim beberapa kali dalam setahun
5. Perlu adanya tambahan anggaran untuk bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Edukasi dan Bimbingan pada keluarga inti ODGJ serta mendorong lingkungan untuk meningkatkan kepedulian pada ODGJ melalui pembentukan Desa Inklusi Ramah ODGJ.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun yang menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan merupakan upaya optimal yang dicapai dari hasil kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif, legislatif maupun masyarakat pada umumnya. Capaian tersebut harus dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. LPPD ini juga dalam rangka memberi informasi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memacu kreatifitas dan kerja keras menuju “TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain prestasi dan keberhasilan juga terdapat kelemahan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu melalui mekanisme LPPD ini, kami mengharapkan rekomendasi konstruktif agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat Bondowoso. Semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Bondowoso,     Maret 2024

**Pj. BUPATI BONDOWOSO**



**Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M.**